

27. RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mewujudkan visi, misi, dan program kepala daerah, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melibatkan beberapa tahapan utama, mulai dari persiapan hingga penetapan. Secara umum, tahapan tersebut meliputi persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2025-2029 dan tugas serta fungsi Perangkat Daerah. Renstra juga harus selaras dengan visi dan misi kepala daerah serta kebijakan nasional.

Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang kemudian menjadi pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Renstra juga menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, serta menjadi bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Mengingat peran dan fungsi Renstra Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar sangat penting bagi Kecamatan Kepanjenkidul dan masyarakat, maka penyusunan Renstra Kecamatan Kepanjenkidul dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Keterkaitan Renstra Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025-2029 dengan dokumen-dokumen Perencanaan lainnya:

a. Keterkaitan Renstra dengan RPJMN

Renstra disusun berdasarkan RPJMN. Setiap kementerian/lembaga atau perangkat daerah wajib menyelaraskan Renstra mereka dengan RPJMN, memastikan bahwa tujuan dan prioritas pembangunan di tingkat nasional tercermin dalam kegiatan dan program di tingkat instansi atau daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM Daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

- b. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur
RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) provinsi dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah memiliki hubungan yang erat. RPJMD berfungsi sebagai dokumen induk yang menjadi acuan bagi penyusunan Renstra. Renstra, pada gilirannya, merupakan penjabaran lebih rinci dari RPJMD dalam lingkup masing-masing Perangkat Daerah. Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 276 ayat (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Pembangunan daerah kabupaten/kota. Sehingga secara teknis Renstra akan selaras dengan RPJMD Kota dan RPJMD Provinsi Jawa Timur. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan daerah Kota/Kabupaten dapat mendukung pembangunan provinsi Jawa Timur. Dengan demikian Renstra dapat dipastikan selaras dan mendukung pencapaian RPJMD Provinsi Jawa Timur. Dimana Tujuan Renstra disandingkan dan diselaraskan dengan Nawa Bhakti Satya sebagai misi dalam naskah RPJMD Provinsi Jawa Timur.
- c. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Blitar.
Renstra berpedoman pada RPJMD sebagai dokumen perencanaan berwawasan 5 (lima) tahunan:
 - 1) Renstra sebagai dokumen teknis sebagai penjabaran RPJMD.
 - 2) Renstra memuat visi, misi arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh OPD yang berkoordinasi dengan BAPPEDA.
- d. Keterkaitan Renstra dengan Renstra K/L
Renstra (Rencana Strategis) perangkat daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga). Berikut adalah beberapa aspek keterkaitan antara keduanya:
 1. Keselarasan Tujuan:
Renstra perangkat daerah dan Renstra K/L harus selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan daerah.
 2. Keterpaduan Program:
Program-program yang tercantum dalam Renstra perangkat daerah harus terpadu dengan program-program yang tercantum dalam Renstra K/L.
 3. Konsistensi Kebijakan:
Kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam Renstra perangkat daerah harus konsisten dengan kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam Renstra K/L.
 4. Sinkronisasi Kegiatan:
Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renstra perangkat daerah harus sinkron dengan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renstra K/L.

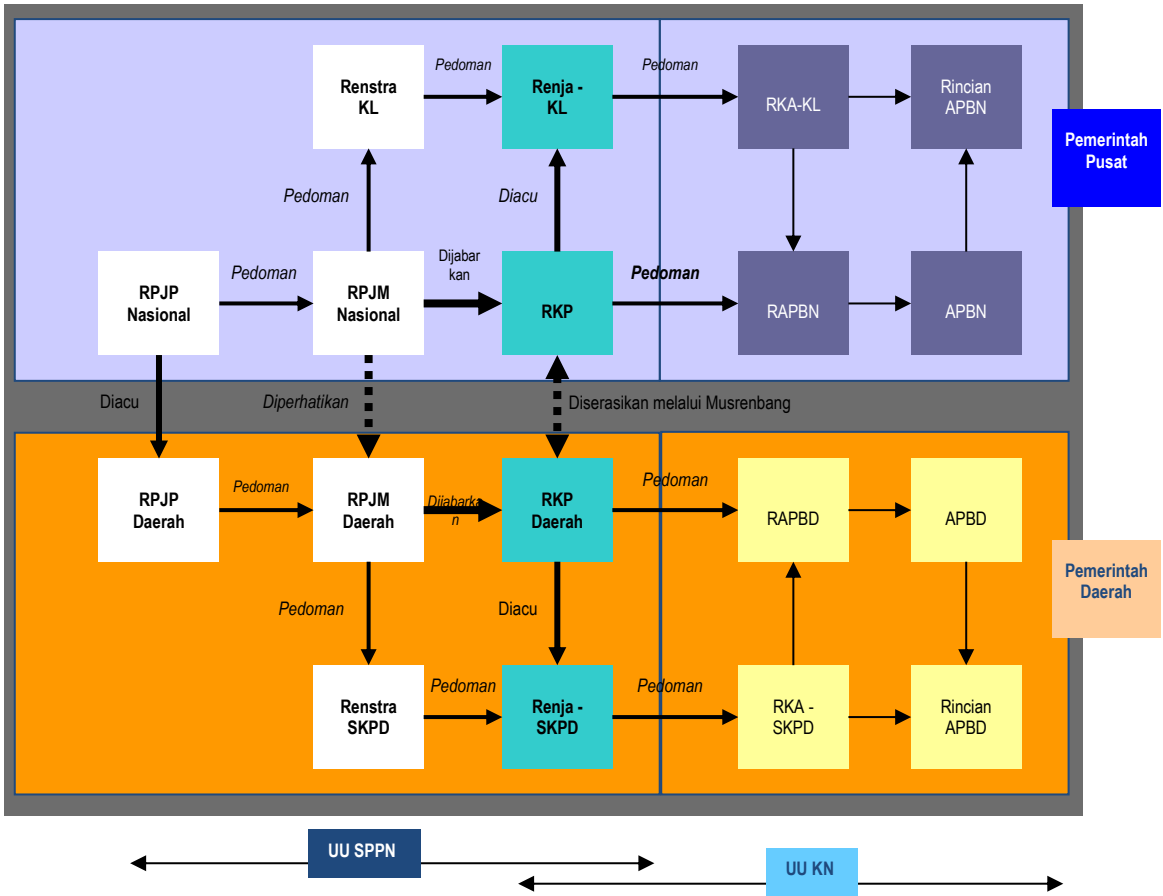
Dalam menyusun Renstra perangkat daerah, perlu mempertimbangkan Renstra K/L untuk memastikan keterkaitan dan keselarasan antara keduanya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah dan nasional.

Beberapa manfaat keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan Renstra K/L adalah:

1. Peningkatan Koordinasi:
Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan Renstra K/L dapat meningkatkan koordinasi antara perangkat daerah dan K/L.
2. Peningkatan Efisiensi:
Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan Renstra K/L dapat meningkatkan efisiensi pembangunan daerah dan nasional.
3. Peningkatan Efektivitas:
Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan Renstra K/L dapat meningkatkan efektivitas pembangunan daerah dan nasional
- e. Keterkaitan Renstra Kecamatan Kepanjenkidul dengan Renstra Provinsi
Renstra kabupaten/kota harus mengacu pada RPJMD provinsi dan juga Renstra provinsi. Hal ini memastikan adanya keselarasan program dan kegiatan pembangunan antara tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
- f. Keterkaitan Renstra dengan Renja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar.
Renja (Rencana Kerja) memiliki keterkaitan yang erat dengan Renstra (Rencana Strategis). Berikut adalah beberapa aspek keterkaitan antara keduanya:
 1. Penjabaran Renstra:
Renja merupakan penjabaran dari Renstra yang dijabarkan dalam program dan kegiatan tahunan.
 2. Keterpaduan Program:
Program-program yang tercantum dalam Renja harus terpadu dengan program-program yang tercantum dalam Renstra.
 3. Konsistensi Sasaran:
Sasaran-sasaran yang tercantum dalam Renja harus konsisten dengan sasaran-sasaran yang tercantum dalam Renstra.
 4. Implementasi Renstra:
Renja merupakan implementasi dari Renstra yang dijabarkan dalam kegiatan tahunan.Dalam menyusun Renja, perlu mempertimbangkan Renstra untuk memastikan keterkaitan dan keselarasan antara keduanya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Beberapa manfaat keterkaitan Renja dengan Renstra adalah:
 1. Peningkatan Efektivitas:
Keterkaitan Renja dengan Renstra dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.
 2. Peningkatan Efisiensi:
Keterkaitan Renja dengan Renstra dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.
 3. Pencapaian Sasaran:
Keterkaitan Renja dengan Renstra dapat membantu mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Kepanjenkidul yang berpedoman pada RPJMD Kota Blitar dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Renja. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kepanjenkidul dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025 – 2029 berdasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 202 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar tahun 2025-2029 (Lembaran daerah kota blitar tahun 2025 nomor 5 tambahan lembaran daerah nomor 5);

31. Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 77).

1.3. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah Tahun 2025-2029 yang menjadi penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2025 – 2029.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Renstra Kecamatan Kepanjenkidul sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
 - 2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
 - 2.1.7. Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1. Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah
 - 2.2.2. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.3. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 2.2.4. Isu Lingkungan Dinamis
 - 2.2.5. Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Kepanjenkidul

Kecamatan Kepanjenkidul merupakan kecamatan yang terletak di bagian tengah dan utara Kota Blitar dengan luas wilayah 10,50 km2 dan jumlah penduduk 45.276 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 3.969 jiwa per km2. Kecamatan Kepanjenkidul terdiri dari 7 Kelurahan. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk sampai dengan Tahun 2020 di masing-masing kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kelurahan
di Kecamatan Kepanjenkidul

No	Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah penduduk (jiwa)		
			L	P	Jumlah
1.	Kelurahan Kepanjenkidul	0,87	3.863	4.120	7.983
2.	Kelurahan Kepanjenlor	0,61	2.844	2.901	5.745
3.	Kelurahan Kauman	0,68	3.351	3.393	6.744
4.	Kelurahan Bendo	1,52	3.239	3.223	6.462
5.	Kelurahan Tanggung	2,23	3.209	3.235	6.444
6.	Kelurahan Sentul	2,68	4.217	4.262	8.479
7.	Kelurahan Ngadirejo	1,91	1.918	1.959	3.877

Sumber : BPS Kota Blitar (2024)

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Kepanjenkidul

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Blitar, maka Kecamatan Kepanjenkidul sebagai *perangkat* daerah dipimpin oleh seorang *Camat* yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah mempunyai *tugas pokok*:

1. Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
2. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan melaksanakan *fungsi* :

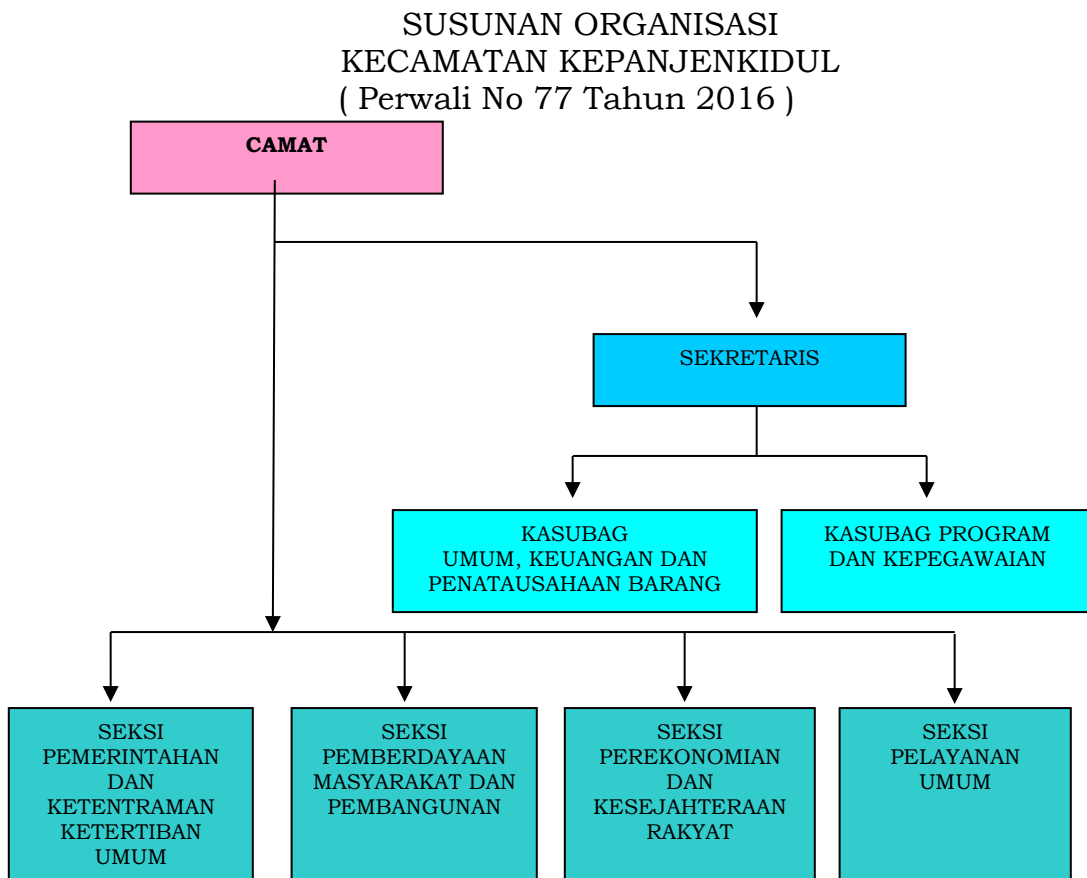
- a. Perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan ;
- b. Pengkoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kerjanya ;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan ;
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum terpadu kecamatan;
- e. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pelayanan kependudukan sesuai peraturan perundangan ;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ;
- g. Penyelenggaraan dan pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial ;
- h. Pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya ;

- i. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Kecamatan ;
- j. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- k. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- l. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- m. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- n. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- o. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- p. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- q. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait Kecamatan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- r. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan; dan
- s. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kecamatan mempunyai *kewenangan* :

- a. Penetapan dan pengembangan visi, misi, tujuan dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di Kecamatan dan kelurahan;
 - b. Pengkoordinasian terhadap jalannya pemerintahan kecamatan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
 - c. Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya ;
 - d. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat ;
 - e. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
 - f. Pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - g. Pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - h. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan;
 - i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
 - j. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - k. Penyelenggaraan fasilitasi penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan kelurahan.
- Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:
- a. Camat
 - b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :

1. Sub Bagian Program dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang
- c. Seksi Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum (Trantibum);
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
- e. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat ;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Yang mempunyai tugas pokok dan fungsi :

Camat

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Walikota .

Sekretariat

Sekretaris

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada seksi, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan;
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Kecamatan menjalankan fungsi :
 - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Camat ;
 - b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing – masing seksi secara terpadu;

- c. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi seksi - seksi di lingkungan Dinas;
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Sekretariat;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- f. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- g. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- i. pengoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi kecamatan;
- j. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha kecamatan;
- k. pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
- l. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- m. pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- n. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- o. fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- p. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya;
- q. pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah;
- r. fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- s. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- t. fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing seksi;
- u. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- v. fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- w. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan informasi dan publikasi;
- x. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan penatausahaan keuangan;
- y. pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja;
- z. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Program dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Program dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian yang dalam

- melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan;
- (2) Sub Bagian Program dan Kepegawaian melaksanakan tugas;
- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan Sub Bagian Program dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi program dan kepegawaian ;
 - c. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi program dan kepegawaian ;
 - d. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan rencana anggaran yang mencakup rencana anggaran operasional dan rencana anggaran kegiatan masing-masing unit di kecamatan dan kelurahan;
 - e. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan administrasi pada Sub Bagian Program dan Kepegawaian;
 - f. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) kecamatan dan kelurahan;
 - g. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
 - h. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja ;
 - i. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - j. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi program dan kepegawaian;
 - l. menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi kepegawaian Kecamatan dan Kelurahan;
 - m. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja di Sub Bagian Program dan Kepegawaian;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang

- (1) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (2) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang melaksanakan tugas:
- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi umum, keuangan dan penatausahaan barang ;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi umum, keuangan dan penatausahaan barang;

- c. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi umum, keuangan dan penatausahaan barang;
- d. melaksanakan dan mengelola surat – menyurat dan tata kearsipan;
- e. melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas;
- f. pengelolaan administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas kehumasan;
- g. melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata laksana;
- h. melaksanakan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- i. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- j. melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- k. melaksanakan pemungutan retribusi jasa usaha sewa sarana prasarana di kecamatan sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- l. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;
- m. melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- n. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- o. melaksanakan pengelolaan urusan gaji pegawai ;
- p. menyiapkan usulan pejabat pengelola keuangan;
- q. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang ;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum

- (1) Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (2) Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum mempunyai tugas ;
 - a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum ;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan pemerintahan dan ketenteraman ketertiban umum;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan pada Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum;
 - d. melaksanakan inventarisasi tanah aset dan menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi optimalisasi pemanfaatan tanah aset;
 - e. Membantu penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Satpol PP, Polri dan atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

- g. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum ;
- h. menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan administrasi pertanahan/keagrariaan ;
- i. menyiapkan bahan pembinaan politik dan idiologi Negara ;
- j. menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar Kelurahan dan penyelesaian perselisihan sengketa yang terjadi di Kelurahan;
- k. menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi optimalisasi pemanfaatan tanah bekas bengkok;
- l. membantu dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
- m. menyiapkan data sebagai bahan pembinaan penyelenggaraan kerukunan hidup baik antar umat beragama maupun antara umat beragama dengan Pemerintah ;
- n. menyiapkan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kesra kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- o. menyiapkan data sebagai bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya ;
- p. menyiapkan data sebagai bahan dan mengkoordinir pelaksanaan pencegahan serta penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi;
- q. menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengamanan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- r. menyiapkan dan menyusun bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- s. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daaerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- t. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan laporan situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban kecamatan;
- u. menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi penanganan perlindungan masyarakat akibat pelanggaran HAM dan masalah sosial di kecamatan;
- v. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat;
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai tugas;
 - a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;

- b. mengumpulkan data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
- c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
- d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
- e. menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang pembangunan;
- f. menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi dan pengawasan penyaluran bantuan pembangunan;
- g. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan tata ruang wilayah kecamatan dan penyusunan profil kecamatan dan/atau kelurahan ;
- h. melaksanakan fasilitasi dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- i. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;
- j. melaksanakan penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana umum di wilayah kecamatan;
- k. Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan di kecamatan;
- l. melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap pembangunan lingkungan hidup di kecamatan;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- n. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ;
- o. melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- p. melakukan pendataan hasil kerja pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ;
- q. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

- (1) Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat;
- (2) Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas;
 - a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat ;
 - b. mengumpulkan data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat ;

- c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan pada Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat ;
- d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
- e. melakukan inventarisasi dan menyiapkan bahan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian masyarakat kelurahan, usaha industri kecil dan menengah;
- f. fasilitasi penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular di kecamatan;
- g. fasilitasi penyiapan dan data serta memantau pelaksanaan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan;
- h. fasilitasi pembinaan dan monitoring terhadap usaha-usaha ketahanan pangan dan pertanian ;
- i. fasilitasi pengawasan terhadap penyaluran bantuan dan pengembalian dana bergulir dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan di wilayah kecamatan;
- j. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pembinaan pendidikan, kepemudaan dan olahraga di kecamatan;
- k. Menyiapkan bahan dan data sebagai dukungan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
- l. pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
- m. mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan pengiriman, penyaluran dan pendistribusian bantuan-bantuan sosial;
- n. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
- o. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pelayanan Umum

- (1) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat;
- (2) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan publik;
 - b. mengumpulkan data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan pelayanan publik;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum;
 - d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan;
 - e. menyiapkan dan mengevaluasi data sebagai bahan pembinaan penyusunan monografi kecamatan;

- f. Melaksanakan penyusunan, pengolahan dan pemeliharaan data dalam rangka peningkatan pelayanan kependudukan;
- g. Menyusun dan melaksanakan sosialisasi tentang mekanisme, prosedur dan persyaratan (standar pelayanan prima) kepada masyarakat;
- h. Melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau melaksanakan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- i. melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik di wilayahnya;
- j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- k. melaksanakan pengumpulan data pengaduan dan menyiapkan bahan koordinasi pengaduan terhadap pelayanan masyarakat;
- l. melaksanakan pengelolaan data/ dokumentasi pelayanan publik;
- m. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi pelayanan umum;
- n. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelurahan

Tugas umum Kelurahan menurut Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Blitar adalah :

1. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
2. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Lurah melaksanakan *fungsi* :

- a. perumusan kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kelurahan ;
- b. penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan administrasi kependudukan di kelurahan ;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial ;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ;
- e. pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah;
- f. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kelurahan;
- g. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- h. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- i. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;

- j. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- k. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- l. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- m. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- n. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait kelurahan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- o. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kelurahan; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

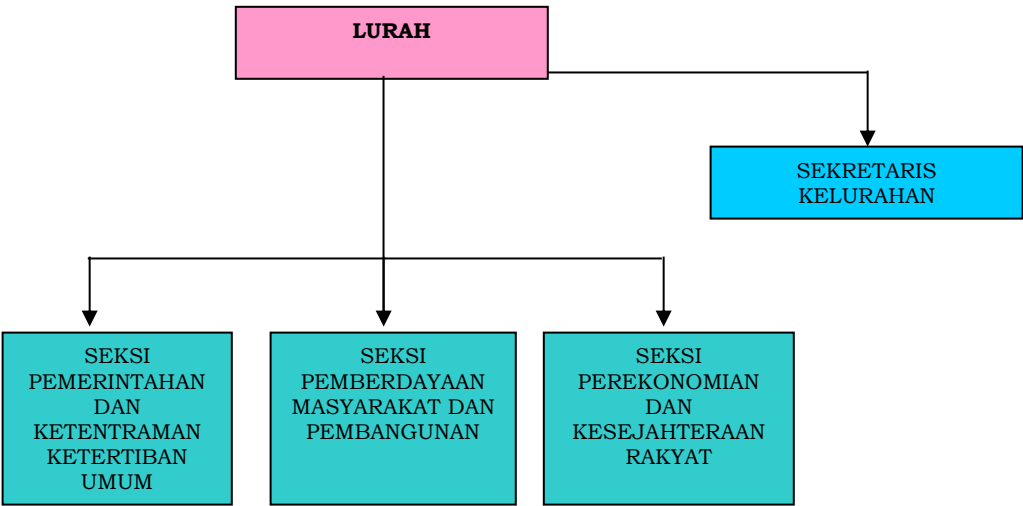
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kelurahan mempunyai *kewenangan* :

- a. pengkoordinasian terhadap jalannya pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- b. pelaksanaan tugas di bidang pembangunan yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- e. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan eks tanah bengkok serta pemungutan Pajak bumi dan Bangunan;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di kelurahan;

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari:

- a. Lurah;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris;
- c. Seksi Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum (Trantibum);
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
- e. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN se-KECAMATAN KEPANJENKIDUL
(Perwali No 77 Tahun 2016)



Lurah

Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kelurahan, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Walikota .

Sekretariat

- (1) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (2) Sekretariat Kelurahan, mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Lurah;
 - b. mengkoordinasikan perencanaan program kerja masing – masing seksi secara terpadu;
 - c. mengkoordinasikan dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unsur di lingkungan Kelurahan;
 - d. merumuskan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Kelurahan;
 - e. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan perubahan Rencana Kerja Anggaran (PRKA);
 - f. menyusun dan melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - g. mengkoordinasikan internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Kelurahan;
 - h. mengelola urusan rumah tangga, tata usaha dan kehumasan serta keprotokolan;
 - i. mengelola administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat Kelurahan;
 - j. melaksanakan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
 - k. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
 - l. menyelenggarakan, membina dan mengendalikan pelayanan administrasi umum, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
 - m. membantu mengelola administrasi kepegawaian di kelurahan;
 - n. melaksanakan pemungutan retribusi jasa usaha sewa sarana prasarana di kelurahan sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
 - o. mengkoordinasikan penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - p. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
 - q. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - r. menyampaikan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Kelurahan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
 - s. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Kelurahan;
 - t. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum

- (1) Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (2) Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum mempunyai tugas;
 - a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dan bahan koordinasi di bidang pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum;
 - d. melakukan pelayanan administrasi kependudukan, pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum;
 - e. melaksanakan penyusunan monografi kelurahan;
 - f. melaksanakan inventarisasi tanah aset dan menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi optimalisasi pemanfaatan tanah aset;
 - g. membantu pelaksanaan tugas – tugas di bidang administrasi pertanahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - h. Fasilitasi kegiatan Pemilihan Umum;
 - i. Membantu dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan Pemungutan PBB;
 - j. Meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
 - k. Melakukan kegiatan teknis dan administrasi pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum ;
 - l. Menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengamanan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - m. menyiapkan bahan koordinasi dengan Satpol PP, Polri dan atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan;
 - n. melakukan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
 - o. menyiapkan bahan pembinaan kerukunan warga ;
 - p. melaksanakan pembinaan dan pengendalian Satuan perlindungan masyarakat (linmas);
 - q. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;
 - r. melakukan pendataan hasil kerja kegiatan pemerintahan dan ketentraman ketertiban umum;
 - s. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
 - t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah;
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai tugas;

- a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dan bahan koordinasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
- c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ;
- d. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ;
- e. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan dalam forum musrenbang di kelurahan ;
- f. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan tata ruang wilayah kecamatan dan penyusunan profil kelurahan;
- g. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kelurahan;
- h. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
- i. menyiapkan bahan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
- j. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan dan mengelola pemanfaatan, pelestarian serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan;
- k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan sumber daya alam agar tidak terjadi pencemaran dan kerusakan Lingkungan hidup;
- l. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian terhadap peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan;
- m. melaksanakan penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana umum di wilayah kelurahan;
- n. Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan di kelurahan;
- o. Fasilitasi dan koordinasi keperansertaan pada even – even daerah dan hari besar nasional serta peningkatan nilai – nilai luhur kebangsaan;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan program pembangunan di wilayah Kelurahan;
- q. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

- (1) Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah;
- (2) Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi;
 - a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dan bahan koordinasi di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
 - b. penyusunan rencana program dan/atau kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- d. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular di kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi, pendataan dan pemantauan penyaluran bantuan sosial;
- f. Menyiapkan bahan dan data sebagai dukungan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
- g. Menyiapkan bahan dan data sebagai dukungan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
- h. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil, mikro dan menengah (UKM), peternakan, pertanian, perkebunan, dan perikanan di kelurahan;
- i. Menyiapkan bahan pemberdayaan perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya di kelurahan ;
- j. Melakukan inventarisasi dan menyiapkan bahan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian masyarakat, usaha industri kecil dan menengah;
- k. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pemberdayaan masyarakat di bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, kepemudaan dan olahraga;
- l. melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dan pengembalian dana bergulir dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan di wilayah kelurahan;
- m. melakukan pengumpulan dan penyaluran bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya ;
- n. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi perekonomian dan kesejahteraan rakyat ;
- o. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan dibentuk oleh Camat dalam rangka mengorganisir pejabat-pejabat fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior di Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia

Salah satu Sumber Daya Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan Kepanjenkidul tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas dengan potensi sebagai berikut:

- 1) Tingkat Pendidikan

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1	Sarjana (S2)	5	1	6
2	Sarjana (S1)	25	23	48
3	Diploma IV	0	0	0
4	Diploma III	6	3	9
5	Diploma II	0	0	0
6	SMA	21	6	27
7	SMP	0	0	0
8	SD	1	0	1
	Jumlah	58	33	91

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2025

2) Tingkat Pangkat / Golongan Ruang

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

No	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1	Golongan IV			
	Pembina (IV/b)	1	0	1
	Jumlah	1	0	1
2	Golongan III			
	Penata Tk. I (III/d)	4	6	10
	Penata (III/c)	13	10	23
	Penata Muda Tk. I (III/b)	3	6	9
	Penata Muda (III/a)	20	9	29
	Penata Muda (IX)	5	1	6
	Jumlah	45	32	77
3	Golongan II			
	Pengatur Tk. I (II/d)	2	2	4
	Pengatur (II/c)	3	0	3
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	0	0	0
	Pengatur Muda (II/a)	1	1	2
	Pengatur Muda (V)	3	1	4
	Jumlah	9	4	13
	Jumlah Keseluruhan	55	36	91

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2025

3) Jabatan

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1	Camat	1	0	1
2	Sekretaris Kecamatan	0	1	1
3	Lurah	6	1	7
4	Sekretaris Kelurahan	6	1	7
5	Kepala Seksi Pelayanan Umum	0	1	1
6	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	0	8	8
7	Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantibum	8	0	8
8	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	0	8	8
9	Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian	0	1	1
10	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	0	1	1
11	Penelaah Teknis Kebijakan	1	6	7

12	Penata Kelola Sistem dan Teknologi	4	2	6
13	Pamong Pemerintahan	2	2	4
14	Pengolah Data dan Informasi	7	2	9
15	Pengadministrasi Perkantoran	12	2	14
16	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	4	1	5
17	Penata Layanan Operasional	1	0	1
18	Operator Layanan Operasional	4	2	6
	Jumlah	56	39	95

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2025

Sarana dan prasarana

Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar telah dilengkapi Sarana dan Prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sampai saat ini, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4.

Jumlah Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah berdasarkan Kondisi

Daftar sarpras Kecamatan

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah Berdasarkan Kondisi	
		Baik	Rusak
1	Tanah	2.130 m ²	
2	Gedung	3 unit	
3	Meja Kerja	25 unit	
4	Kursi Kerja	28 unit	
5	Meja Rapat	5 unit	
6	Kursi Rapat	100 unit	
7	Kursi Pelayanan	3 unit	
8	Lemari arsip	3 unit	
9	Brankas	1 unit	
10	Komputer	25 unit	
11	Printer	15 unit	
12	Scanner	3 unit	
13	LCD presentasi	2 unit	
14	Kendaraan Dinas		
	a. Mobil	4 unit	
	b. Sepeda motor	9 unit	
	c. Kendaraan roda tiga	1 unit	

Daftar sarpras kelurahan

Kelurahan Kepanjenkidul

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah Berdasarkan Kondisi	
		Baik	Rusak
1	Tanah	609 m ²	-
2	Gedung	2 unit	2 unit
3	Meja Kerja	16 unit	2 unit
4	Kursi Kerja	6 unit	3 unit
5	Meja Rapat	-	8 unit
6	Kursi Rapat	10 buah	2 unit
7	Kursi Pelayanan	2 unit	-
8	Lemari arsip	8 unit	5 unit
9	Brankas	1 unit	2 unit
10	Komputer	4 unit	2 unit
11	Printer	15 unit	12 unit
12	Scanner	1 unit	-
13	LCD presentasi	-	1 unit
14	Kendaraan Dinas		
	a. Mobil	-	-

	b. Sepeda motor	6 unit	-
	c. Kendaraan roda tiga	-	1 unit

Kelurahan Kepanjenlor

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah Berdasarkan Kondisi	
		Baik	Rusak
1	Tanah	8.402 m ²	
2	Gedung	4	
3	Meja Kerja	11	
4	Kursi Kerja	10	
5	Meja Rapat	2	
6	Kursi Rapat	60	
7	Kursi Pelayanan	7	
8	Lemari arsip	12	
9	Brankas	2	
10	Komputer	7	
11	Printer	6	1
12	Scanner	2	
13	LCD presentasi	1	1
14	Kendaraan Dinas		
	a. Mobil		
	b. Sepeda motor	6	
	c. Kendaraan roda tiga	1	

Kelurahan Kauman

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah Berdasarkan Kondisi	
		Baik	Rusak
1	Tanah	1.680 m ²	
2	Gedung	1	
3	Meja Kerja	8	
4	Kursi Kerja	8	
5	Meja Rapat	2	
6	Kursi Rapat	150	
7	Kursi Pelayanan	2	
8	Lemari arsip		1
9	Brankas	1	
10	Komputer	8	
11	Printer	7	
12	Scanner	1	
13	LCD presentasi	1	
14	Kendaraan Dinas		
	a. Mobil	-	-
	b. Sepeda motor	5	1
	c. Kendaraan roda tiga	1	

Kelurahan Sentul

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah Berdasarkan Kondisi	
		Baik	Rusak
1	Tanah	1.696 m ²	-
2	Gedung	1	-
3	Meja Kerja	11	-
4	Kursi Kerja	5	1
5	Meja Rapat	1	-
6	Kursi Rapat	20	-
7	Kursi Pelayanan	2	-
8	Lemari arsip	5	2
9	Brankas	2	1
10	Komputer	6	2
11	Printer	7	1
12	Scanner	1	
13	LCD presentasi	1	-
14	Kendaraan Dinas		
	a. Mobil	-	-
	b. Sepeda motor	6	-
	c. Kendaraan roda tiga	-	1

Kelurahan Bendo

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah Berdasarkan Kondisi	
		Baik	Rusak
1	Tanah	6.175 m ²	
2	Gedung	1	
3	Meja Kerja	13	
4	Kursi Kerja	12	4
5	Meja Rapat	5	
6	Kursi Rapat	4	
7	Kursi Pelayanan	3	
8	Lemari arsip	7	
9	Brankas	1	
10	Komputer	3	1
11	Printer	10	
12	Scanner	1	
13	LCD presentasi	1	
14	Kendaraan Dinas		
	a. Mobil	-	-
	b. Sepeda motor	2	3
	c. Kendaraan roda tiga	1	

Kelurahan Tanggung

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah Berdasarkan Kondisi	
		Baik	Rusak
1	Tanah	491 m ²	0
2	Gedung	0	1
3	Meja Kerja	12	3
4	Kursi Kerja	10	4
5	Meja Rapat	3	1
6	Kursi Rapat	65	4
7	Kursi Pelayanan	1	1
8	Lemari arsip	2	0
9	Brankas	0	0
10	Komputer	2	5
11	Printer	7	14
12	Scanner	0	1
13	LCD presentasi	1	0
14	Kendaraan Dinas	5	1
	a. Mobil	0	0
	b. Sepeda motor	4	1
	c. Kendaraan roda tiga	1	0

Kelurahan Nagdirejo

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah Berdasarkan Kondisi	
		Baik	Rusak
1	Tanah	513 m ²	-
2	Gedung	1	-
3	Meja Kerja	12	-
4	Kursi Kerja	1	7
5	Meja Rapat	2	-
6	Kursi Rapat	8	-
7	Kursi Pelayanan	2	-
8	Lemari arsip	5	1
9	Brankas	-	1
10	Komputer	3	6
11	Printer	5	5
12	Scanner	-	-
13	LCD presentasi	-	1
14	Kendaraan Dinas		
	a. Mobil	-	-
	b. Sepeda motor	5	1
	c. Kendaraan roda tiga	-	1

Kondisi sumber daya yang ada di Kecamatan Kepanjenkidul meliputi Kecamatan dan tujuh kelurahan di wilayah Kecamatan Kepanjenkidul. Untuk sumberdaya manusia sesuai jumlah, pendidikan, pangkat golongan dan jabatan di masing-masing kecamatan dan kelurahan, sementara untuk jumlah dan kondisi sarana dan prasarana sesuai yang ada pada masing-masing instansi.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, ketersediaan sarana dan prasarana (sarpras) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai menjadi kebutuhan mendesak. Saat ini, sebagian besar sarpras yang dimiliki Kecamatan Kepanjenkidul sudah mengalami penurunan fungsi, baik karena faktor usia pakai, keterbatasan kapasitas, maupun perkembangan teknologi yang semakin cepat. Kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah jika tidak segera ditangani. Sedangkan SDM terdapat beberapa jabatan yang harus di rangkap (PLT) dikarenakan adanya mutasi maupun telah memasuki usia pensiun sehingga kinerja menjadi kurang maksimal

Dengan adanya tuntutan pelayanan yang lebih cepat dan transparan, serta berkembangnya kebijakan nasional menuju transformasi digital, mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan modernisasi sarpras melalui pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) yang lebih relevan dengan kebutuhan lima tahun ke depan.

Dengan demikian, pengadaan BMD dalam 5 tahun mendatang bukan hanya bersifat mengganti sarana prasarana lama, melainkan juga menjadi instrumen strategis untuk memastikan keberlangsungan dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan daerah, sehingga mampu mendorong tercapainya visi dan misi pembangunan daerah secara lebih efektif.

Selain itu terkait jumlah (SDM), dalam 5 tahun kedepan pemenuhan jumlah SDM dapat sesuai dengan jumlah jabatan yang ada sehingga dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan di OPD Kecamatan Kepanjenkidul.

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Kepanjenkidul

Pemerintah Kota Blitar berkomitmen untuk berupaya secara maksimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan pelayanan di berbagai bidang. Langkah Pemerintah Daerah untuk mewujudkan hal tersebut yang dipandang paling efektif adalah dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya. Dengan demikian maka setiap hasil-hasil pembangunan selain dapat dipertanggungjawabkan juga memenuhi kaidah kemanfaatan bagi segenap komponen pemerintahan yang ada baik pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan maupun masyarakat sebagai sasaran pembangunan.

Dalam rangka keberhasilan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang aspiratif, adil, merata, serasi, selaras dan seimbang antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, maka perlu optimalisasi kinerja pemerintah kecamatan, sebagai perangkat daerah yang secara administrasi mempunyai fungsi pemandu segala aspirasi yang tumbuh dari bawah yang disinergikan dengan kebijaksanaan dari tingkat atas yang harus dilaksanakan oleh masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kota Blitar, Kecamatan Kepanjenkidul telah merumuskan kebijakan dalam Program dan

Kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang .

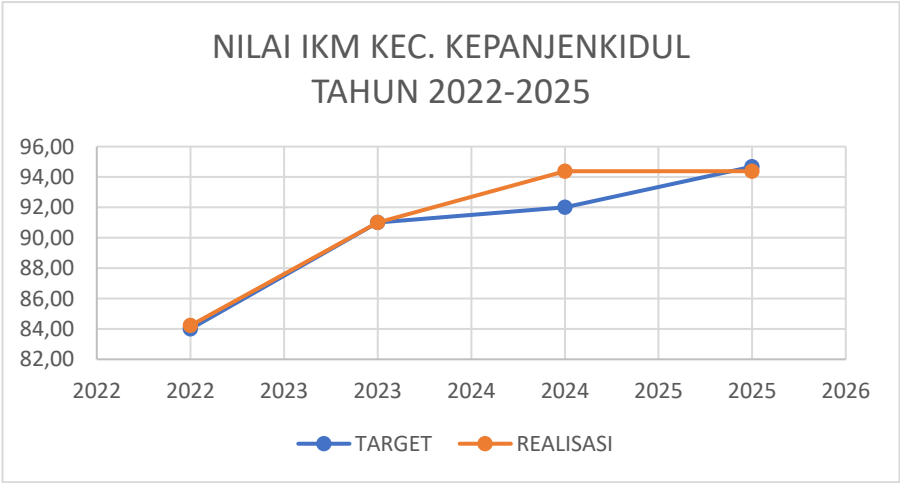
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kepanjenkidul digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	IKU/SPM/IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	IKU	84 (Baik)	91 (Sangat Baik)	92 (Sangat Baik)	94,68 (Sangat Baik)	84,22 (Baik)	91 (Sangat Baik)	94,38 (Sangat Baik)	94,38 (Sangat Baik)	100,26%	100,00%	102,59%	99,68%
2	Status Kinerja Kecamatan	IKU	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
3	Persentase kelurahan dengan tingkat perkembangan "cepat berkembang"	IKU	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		84	85	86	87	84,08	84,11	94,25	94,25	100,10%	98,95%	109,59%	108,33%

Dari tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah di atas dapat dijelaskan bahwa tren realisasi indikator kinerja utama selama tahun 2022-2025 mengalami kenaikan hal tersebut dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2.1 Grafik Realisasi IKM



Realisasi IKM yang cenderung naik tersebut dipengaruhi oleh faktor pendorong diantaranya adanya inovasi pelayanan AGEMAN MAS RAHMAT yang menjadikan pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan efisien sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat.

Sedangkan untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intern realisasi Tahun 2023 tidak mencapai target dikarenakan adanya kendala dalam proses penghitungan yang masih manual sehingga hasilnya kurang maksimal. Namun pada realisasi tahun berikutnya hasilnya dapat melampaui target dikarenakan penggunaan aplikasi E-Sukma Jatim.

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Kepanjenkidul memiliki peran penting sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kelompok sasaran pelayanan meliputi masyarakat umum, keluarga, kelompok rentan, UMKM, lembaga kemasyarakatan, pemuda, tokoh agama, hingga pelaku budaya. Bentuk layanan yang diberikan bersifat administratif, fasilitatif, pembinaan, dan koordinatif, dengan dukungan inovasi digital serta keterlibatan lintas sektor.

Berikut adalah identifikasi kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Kepanjenkidul dan bentuk layanan yang diberikan :

KELOMPOK SASARAN	BENTUK LAYANAN YANG DIBERIKAN KECAMATAN KEPANJENKIDUL
Masyarakat Umum	- Layanan inovatif digital (Aplikasi AGEMAN MAS RAHMAT) - Pelayanan administrasi umum (surat keterangan, domisili, izin rekomendasi) - Pelayanan kependudukan melalui koordinasi dengan Dispendukcapil - Layanan aduan dan pengaduan masyarakat
Keluarga & Rumah Tangga	- Pelayanan terkait administrasi keluarga (KK, surat pengantar KTP, pindah datang) - Fasilitasi kegiatan PKK dan Posyandu - Program pencegahan stunting & kesehatan ibu-anak bersama Puskesmas
Kelompok Rentan (Miskin, Disabilitas, Lansia, Anak Terlantar)	- Fasilitasi bantuan sosial dari Dinas Sosial - Pendampingan penanganan masalah sosial melalui seksi Perekonomian & Kesra

KELOMPOK SASARAN	BENTUK LAYANAN YANG DIBERIKAN KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	- Perlindungan masyarakat melalui koordinasi dengan Linmas & Trantibum
Pelaku Usaha & UMKM	- Fasilitasi dan promosi produk unggulan UMKM melalui kegiatan bazar Kepanjenkidul Fest - Pembinaan dan pelatihan skill kepada masyarakat melalui RT Keren
Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, LPMK, Karang Taruna, PKK, Forum Pemuda, Posyandu)	- Fasilitasi Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) - Pembinaan organisasi masyarakat dan kelembagaan lokal (Posyandu remaja, Forum anak, Posyandu Jiwa) - Pembinaan RT, RW, LPMK (Reorganisasi, Bingkisan lebaran)

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam penyelenggaraan pelayanan, Kecamatan Kepanjenkidul tidak bekerja sendiri. Pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan melalui kemitraan lintas perangkat daerah dan lembaga terkait. Dispendukcapil mendukung bidang kependudukan, Dinas Kesehatan menangani aspek kesehatan, Dinas Sosial membantu penyaluran bansos, Diskominfotik memperkuat layanan digital, sementara Forkopimcam memastikan ketertiban wilayah. Kolaborasi ini memastikan pelayanan publik di kecamatan berjalan terpadu, efektif, dan tepat sasaran.

Berikut adalah identifikasi mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan dan bentuk kemitraan/dukungannya kepada Kecamatan Kepanjenkidul.

MITRA PERANGKAT DAERAH	BIDANG DUKUNGAN	BENTUK KEMITRAAN/DUKUNGAN
Dinas Kependudukan & Catatan Sipil (Dispendukcapil)	Administrasi kependudukan	- Koordinasi penerbitan KTP, KK, akta kelahiran/kematian - Pelayanan jemput bola (perekaman KTP, kartu identitas anak)
Dinas Kesehatan & Puskesmas	Kesehatan masyarakat	- Pelayanan Posyandu, pengendalian stunting (Libas), Mini lokakarya Kesehatan - FKKS dan kelurahan sehat - Fasilitasi sosialisasi pencegahan penyakit
Dinas Sosial	Kesejahteraan sosial	- Penyaluran bantuan sosial (PKH, BPNT, Rastrada) - Fasilitasi rehabilitasi sosial untuk lansia, disabilitas, anak terlantar
Diskominfotik Kota Blitar	Teknologi & informasi publik	- Fasilitasi aplikasi pelayanan digital (AGEMAN MAS RAHMAT) - Dukungan jaringan internet di kecamatan - Publikasi layanan dan informasi kecamatan melalui website
Dinas Perdagangan dan Perindustrian & Dinas Koprasi dan Usaha Mikro	Pemberdayaan ekonomi & UMKM	- Pembinaan usaha mikro - Promosi produk unggulan melalui bazar UMKM Kepanjenkidul Fest

MITRA PERANGKAT DAERAH	BIDANG DUKUNGAN	BENTUK KEMITRAAN/DUKUNGAN
Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan & kebersihan	- Program bank sampah, penghijauan, dan lomba kelurahan berseri - Kebersihan melalui Gertak Berlian (Gerakan Serentak Bersih Lingkungan)
Dinas Pariwisata & Kebudayaan	Budaya & pariwisata lokal	- Pembinaan terhadap kampung tematik - Pembinaan sanggar seni dan komunitas budaya
Inspektorat Daerah	Akuntabilitas & pengawasan	- Pendampingan pembangunan Zona Integritas (WBK & WBBM) - Edukasi antikorupsi & tata kelola pemerintahan bersih
Bakesbangpol, BPBD dan Satpol PP	Ketertiban & kesiagaan	- Siaga bencana alam dan kebakaran - Ketertiban umum dan kerawanan sosial
Polsek & Koramil (Forkopimcam)	Keamanan & ketertiban	- Dukungan pengamanan acara kecamatan - Penertiban ketertiban umum & koordinasi Trantibum - Sinergi penanganan konflik sosial
Tokoh Agama, Adat, dan Budaya	Sosial & Budaya	- Fasilitasi kegiatan keagamaan dan kerukunan antarumat beragama (FKUB : Forum Kerukunan Umat Beragama) - Dukungan acara tradisi dan budaya seperti Bersih Desa, kirab budaya, dan doa bersama Pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat (FKDM : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)

2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Kecamatan Kepanjenkidul sebagai perangkat daerah terdepan dalam pelayanan publik mendapatkan dukungan dari BUMD untuk memperkuat kualitas layanan kepada masyarakat. PDAM selaku BUMD memastikan akses air bersih serta mengadakan program sambungan baru untuk rumah tangga berpenghasilan rendah (subsidi). Bank Kota Blitar memperkuat sektor permodalan dan layanan keuangan ikut berkontribusi pada kegiatan perekonomian lokal serta mendukung digitalisasi pembayaran PBB/P2. Dukungan BUMD ini memperlihatkan sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, dan perusahaan daerah dalam membangun pelayanan publik yang lebih merata, responsif, dan berkeadilan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah permasalahan utama atau tantangan mendasar yang dihadapi oleh suatu organisasi/perangkat daerah yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan.

Isu strategis biasanya bersifat:

- Penting & mendesak → jika tidak ditangani, akan berdampak besar pada pelayanan publik dan masyarakat.

- Mendasar → terkait langsung dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan organisasi/perangkat daerah.
- Bersifat jangka menengah/panjang → tidak cukup diselesaikan dengan solusi sementara, tetapi memerlukan arah kebijakan strategis.

2.2.1. Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah

Kecamatan Kepanjenkidul memiliki sejumlah potensi daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan Kepanjenkidul dan dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Potensi Inovasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik : Kecamatan Kepanjenkidul memiliki keunggulan dalam bidang pelayanan berbasis digital yaitu dengan adanya aplikasi AGEMAN MAS RAHMAT yang memudahkan pelayanan administrasi kepada masyarakat, selain itu pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Kepanjenkidul telah memiliki sertifikat ISO 9001:2015 tentang manajemen mutu pelayanan. Dengan adanya keunggulan di bidang pelayanan tersebut Kecamatan Kepanjenkidul telah berada pada Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam pelayanan kepada masyarakat.
- b. Potensi Ekonomi Kendang Jimbe: Keberadaan produksi kendang jimbe di wilayah Kelurahan Tanggung dan Sentul mampu menopang perekonomian masyarakat karena produk unggulan ini telah mampu menembus pasar nasional dan menyerap lapangan pekerjaan bagi warga sekitar.
- c. Potensi Wisata Religi : Dengan adanya potensi wisata religi yaitu Goa Maria dan Masjid Ar-Rahman, Kecamatan Kepanjenkidul menjadi salah satu wilayah yang memiliki destinasi wisata yang cukup menarik para wisatawan baik dalam maupun luar wilayah Kota Blitar.
- d. Lokasi Strategis berada di pusat Pemerintahan Kota Blitar, Kecamatan Kepanjenkidul memiliki aksesibilitas yang tinggi dan potensi untuk menjadi pusat layanan bagi wilayah di sekitarnya.

2.2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kepanjenkidul dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan dan penanganan pengaduan secara terintegrasi
2. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum
3. Rendahnya swadaya masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibum
4. Kurangnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pencapaian layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat

2.2.3 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perumusan terhadap isu strategis pembangunan berkelanjutan Kota Blitar merupakan salah satu tahapan penting dalam kajian KLHS. Perumusan isu strategis PB dilakukan dengan cara menggali dan mengkaji data – data sekunder yang ada seperti dokumen KLHS RTRW, Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Blitar 2025 – 2029 dan berdasarkan identifikasi capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), serta dokumen kajian lainnya. Selain itu dengan menggali informasi data primer yang dilakukan melalui kegiatan wawancara, diskusi, lokakarya, dan FGD dengan

(stakeholders) pihak- pihak yang memiliki kompetensi terhadap kondisi Kota Blitar, baik atas nama individu maupun lembaga. Penyusunan isu strategis menggunakan pertimbangan hasil rumusan scenario dan masukan saran yang disepakati dari kegiatan uji public yang menghasilkan isu pembangunan berkelanjutan paling strategis jangka menengah Kota Blitar. Isu Pembangunan Berkelanjutan paling strategis tersebut meliputi :

1. Daya saing sumber daya manusia;
2. Pengentasan kemiskinan;
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance);
4. Penguatan ekonomi lokal berbasis wisata kebangsaan;
5. Peningkatan keamanan dan kenyamanan kota;
6. Minimalisasi degradasi lingkungan;
7. Peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
8. Peningkatan mitigasi bencana perkotaan;
9. Indikator yang telah ada dalam RPJMD tetapi belum mencapai target adalah mendorong pencapaian indikator tersebut agar dapat mencapai target nasional;
10. Indikator yang memiliki data tetapi belum ada dalam target RPJMD dan belum mencapai target nasional;
11. Indikator yang belum memiliki data dan ada target yang ditetapkan secara nasional.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk memastikan agar kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah senantiasa berorientasi pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui KLHS, pemerintah kecamatan dapat mengidentifikasi isu-isu lingkungan hidup yang bersifat strategis, menilai dampaknya terhadap aspek sosial, ekonomi, dan tata ruang, serta merumuskan alternatif solusi yang ramah lingkungan.

Dari isu pembangunan berkelanjutan paling strategis jangka menengah Kota Blitar, Kecamatan Kepanjenkidul memiliki isu strategis lingkungan hidup yang perlu menjadi perhatian antara lain adalah :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance) : Penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien, cepat, dan bebas pungli
2. Peningkatan keamanan dan kenyamanan kota : meningkatkan keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat

Isu KLHS di Kecamatan Kepanjenkidul yang sejalan dengan peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance) adalah bagaimana kecamatan mampu menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Upaya ini mencakup digitalisasi pelayanan publik, peningkatan kapasitas aparatur, dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan. Sedangkan untuk meingkatkan keamanan dan kenyamanan kota Kecamatan Kepanjenkidul meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan trantibum bersama Forkopimcam dan keaktifan masyarakat kelurahan dalam menjaga lingkungan.

2.2.4 Isu Lingkungan Dinamis

Isu lingkungan dinamis adalah isu lingkungan hidup yang muncul sebagai akibat dari perubahan kondisi sosial, ekonomi,

teknologi, maupun tata ruang yang berlangsung secara cepat dan tidak selalu dapat diprediksi.

A. Isu Global

Beberapa isu global yang dapat mempengaruhi dunia dalam jangka panjang sebagaimana disampaikan Bappenas dalam hasil kajian RPJMN 2025-2029 antara lain :

1. Decarbonization;
2. *Green Development*;
3. *Automation, Internet of Things and Digitization*;
4. Diversifikasi Rantai Suplai;
5. Ekonomi Sirkular;
6. *Physical Internet*;
7. Aglomerasi;
8. Segala Sesuatu adalah Layanan;
9. *Remote Work is Everywhere*: Tren Kerja Jarak Jauh yang Meningkat;
10. *Sharing Economy*.

B. Isu Nasional

Kecamatan mendukung ASTA CITA 6 yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, isu nasional kecamatan mengacu pada Perpres nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, antara lain :

1. Sasaran 1 : mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan

Isu :

- Rendahnya akurasi sasaran program perlindungan sosial dan program pemberdayaan masyarakat
- Program perlindungan sosial yang belum komprehensif dan belum menjawab sepenuhnya kebutuhan seluruh masyarakat miskin dan rentan
- Program pemberdayaan yang belum terintegrasi dan terstandar untuk peningkatan kemandirian masyarakat
- Jaminan sosial ketenagakerjaan yang belum mencakup seluruh pekerja, terutama pekerja informal
- Akses penduduk miskin dan rentan terhadap layanan infrastruktur dasar masih perlu ditingkatkan

2. Sasaran 2 : meningkatnya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan

Isu :

- Intervensi perumahan eksisting belum menjangkau seluruh segmentasi masyarakat termasuk pekerja informal, terutama dari aspek pembiayaan perumahan
- Keterbatasan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyediaan perumahan MBR berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Belum optimalnya keterhunian dan pengelolaan rumah sehingga berpotensi pada menurunnya kualitas bangunan beserta lingkungan
- Belum optimalnya integrasi antara intervensi penyediaan perumahan dengan infrastruktur dasar permukiman dan akses transportasi publik yang berpotensi pada tumbuhnya permukiman kumuh baru

3. Sasaran 3 : mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Isu :

- Angka kemiskinan perdesaan masih tinggi
- Kualitas layanan dasar perdesaan masih timpang dibandingkan layanan perkotaan
- Nilai ekonomi dan daya saing lemah
- Produktivitas dan pendapatan asli desa PADes terhadap APBDesa masih sangat rendah
- Tata kelola pemerintahan desa masih belum baik
- Belum optimalnya konsolidasi berbagai pendanaan K/L/D dalam pembangunan desa
- Desa berketahanan iklim masih rendah

4. Sasaran 4 : Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Isu :

- Kontribusi ekonomi yang tergolong rendah
- Pemanfaat lahan perkotaan yang belum efisien dan pengendalian ruang yang kurang efektif
- Ketersediaan dan akses layanan perkotaan masih terbatas belum inklusi dan memadai
- Pembangunan dan penyediaan infrastruktur khusus di wilayah metropolitan belum merata, memiliki kualitas yang terbatas serta tidak terintegrasi secara kewilayahan
- Rendahnya kesempatan kerja, penangan sektor ekonomi informal yang belum optimal serta tingginya kemiskinan, ketimpangan sosial dan kriminalitas masih menjadi tantangan utama perkotaan pada bidang sosial ekonomi
- Tingkat pencemaran dan degradasi lingkungan yang semakin tinggi
- Belum ada regulasi yang mengatur perkotaan secara terpadu, kurang dinamisnya kelembagaan serta belum inovatifnya pembiayaan pengelolaan perkotaan
- Tingginya konsentrasi penduduk Indonesia di Pulau Jawa utamanya di wilayah metropolitan Jakarta

C. Isu Regional

Isu strategis Jawa Timur memperhatikan tahapan pertama dari RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045, meliputi:

1. Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah
2. Penanggulangan Kemiskinan dengan Perluasan Kesempatan Kerja; Perluasan Akses Layanan Dasar Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup; Perluasan Akses Pasar Kerja Untuk Pekerjaan Yang Layak dan Meningkatkan Pendapatan; Perluasan Akses Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin; Pengembangan Program-Program Ekonomi Dan Kewirausahaan serta Program-Program Yang Efektif Untuk Mengatasi Kemiskinan.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas Melalui Peningkatan Akses Pendidikan, Kesehatan dan Standar Hidup yang Layak dan Berkualitas.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan yang Baik

5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana Alam dengan Mengutamakan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
6. Kedaulatan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani

Kecamatan Kepanjenkidul sebagai organisasi yang memberikan pelayanan publik secara langsung berada pada isu global ke-8, yaitu segala sesuatu adalah layanan. Hal ini menegaskan bahwa seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kerangka nasional, Kecamatan Kepanjenkidul mendukung ASTA CITA 6 yakni Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Dukungan ini selaras dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, khususnya pada:

1. Sasaran 1: mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan, dengan isu Program pemberdayaan yang belum terintegrasi dan terstandar untuk peningkatan kemandirian masyarakat
2. Sasaran 3: mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dengan isu Tata kelola pemerintahan desa masih belum baik.

Sementara itu, pada tingkat regional, Kecamatan Kepanjenkidul turut mendukung isu strategis ke-4 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan yang Baik, sebagai upaya memperkuat kapasitas organisasi pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

2.2.5 Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Kecamatan Kepanjenkidul memiliki sejumlah potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Potensi tersebut meliputi tersedianya inovasi dan digitalisasi pelayanan publik, adanya potensi UMKM dan wisata untuk mendukung perekonomian masyarakat, serta lokasi strategis yang berada di pusat pemerintahan dengan aksesibilitas tinggi.

Namun, di balik potensi tersebut masih terdapat beberapa permasalahan. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik belum optimal sehingga beberapa proses masih berjalan secara manual. Koordinasi antarinstansi dalam menjaga ketertiban juga menghadapi kendala terutama pada kejelasan peran dan respon cepat di lapangan. Selain itu, tingkat keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan masih belum merata, yang berdampak pada rendahnya swadaya serta kurangnya keberdayaan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan umum maupun pencapaian layanan dasar.

Isu yang relevan dalam kerangka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) antara lain adalah peningkatan tata kelola pemerintahan (good governance) serta peningkatan keamanan dan kenyamanan kota. Isu lingkungan dinamis yang berhubungan dengan perangkat daerah mengacu pada prinsip bahwa segala sesuatu adalah layanan. Hal ini sejalan dengan isu global yang menekankan pentingnya transformasi pelayanan publik, isu

nasional berupa penguatan tata kelola pemerintahan desa dan kepemimpinan yang baik, serta isu regional terkait belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum.

Dari kondisi tersebut, muncul isu strategis utama yang perlu menjadi perhatian, yaitu belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan penanganan pengaduan secara terintegrasi, belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum, rendahnya swadaya masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum (*trantibum*), serta masih kurangnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung peningkatan layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.6
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
1. Tersedianya Inovasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik 2. Adanya potensi UMKM dan wisata untuk mendukung perekonomian masyarakat 3. Potensi lokasi strategis berada di pusat Pemerintahan yang memiliki aksesibilitas yang tinggi	1. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik belum optimal, sehingga beberapa proses masih manual 2. Koordinasi antar instansi dalam menjaga ketertiban masih menghadapi kendala kejelasan peran dan respon cepat di lapangan 3. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan belum merata	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance) 2. Peningkatan keamanan dan kenyamanan kota	Segala sesuatu adalah layanan	1. Tata kelola pemerintahan desa masih belum baik. 2. Program pemberdayaan yang belum terintegrasi dan terstandar untuk peningkatan kemandirian masyarakat	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan yang Baik	1. Belum optimalnya kualitas pelayanan dan penanganan pengaduan secara terintegrasi 2. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum 3. Rendahnya swadaya masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibum 4. Kurangnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pencapaian layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan memiliki tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah di tingkat kecamatan. Renstra ini menjadi pedoman bagi kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta menjadi acuan bagi penyusunan rencana kerja tahunan (RENJA).

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan utama Renstra (Rencana Strategis) adalah sebagai pedoman dan acuan bagi suatu organisasi dalam mencapai tujuan jangka panjangnya. Renstra membantu organisasi menetapkan arah, tujuan, dan sasaran yang realistis sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Selain itu, Renstra juga berfungsi sebagai kerangka dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) dan pengalokasian sumber daya yang optimal.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Adapun tujuan Kecamatan Kepanjenkidul adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan.

b. Sasaran

Sasaran Renstra adalah target-target spesifik yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, biasanya lima tahun, oleh suatu organisasi atau instansi, dan merupakan bagian dari rencana strategis (Renstra). Sasaran ini dirumuskan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan tersebut.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kepanjenkidul dalam mengemban visi dan misi organisasi adalah:

1. Meningkatnya kinerja pelayanan dan kualitas pembangunan wilayah di kecamatan;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah.

Tabel 3.1.
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASELINE 2024	SATUAN	TARGET TAHUN							KETERANGAN
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
1	Unsur Kewilayahan, Kecamatan Sasaran RPJMD: Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 9 variabel yaitu Persyaratan, Sistem, mekanisme dan prosedur, Waktu penyelesaian, Biaya/ tarif, Produk spesifikasi jenis pelayanan, Kompetensi pelaksana, Perilaku pelaksana, Penanganan pengaduan, saran dan masukan, Sarana dan prasarana sesuai PermenPAN RB no 14 tahun 2017 yang dihitung sesuai aplikasi e-sukma Provinsi Jawa Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun berjalan hasil e-sukma	94.38	Indeks	94.68	95.00	95.38	95.50	95.88	96.00	96.00	IKU
			Meningkatnya kinerja pelayanan dan kualitas pembangunan wilayah di kecamatan	Status Kinerja Kecamatan	Status kinerja kecamatan adalah hasil evaluasi atas instrumen penilaian sinergitas kinerja kecamatan dalam meningkatkan pelayanan publik di kecamatan, Instrumen penilaian tersebut mencakup 10 indikator kinerja pelayanan publik tingkat kecamatan dan 7 indikator kinerja koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan berdasarkan PP no. 17 tahun 2018 Status kinerja kecamatan diperoleh dari evaluasi Provinsi Jawa timur	Status kinerja kecamatan pada tahun berjalan berdasarkan evaluasi provinsi	Baik		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU
				Persentase kelurahan dengan tingkat perkembangan "cepat berkembang"	evaluasi perkembangan desa dan kelurahan adalah penilaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang secara internal dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan melalui isian formulir evaluasi diri yang ada didalam aplikasi epdeskel berdasarkan Permendagri no. 81 tahun 2015 evaluasi epdeskel terdiri dari 3 kategori yaitu kelurahan dengan tingkat perkembangan "kurang berkembang", "berkembang" dan "cepat berkembang" dengan kategori tertinggi adalah "cepat berkembang"	(Jumlah kelurahan dengan tingkat perkembangan "cepat berkembang" dibagi jumlah seluruh kelurahan) x 100%	100	%	100	100	100	100	100	100	100	IKU

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASELINE 2024	SATUAN	TARGET TAHUN							KETERANGAN
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
			Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan sekretariat sesuai PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 atau aturan lain yang berlaku pada aplikasi e-Sukma	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat pada tahun berjalan pada aplikasi e-sukma	86	Indeks	87	94.50	94.75	95.00	95.25	95.50	95.50	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra (Rencana Strategis) adalah kerangka tindakan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Ini mencakup bagaimana organisasi akan mencapai tujuan tersebut melalui berbagai inisiatif dan program, serta kebijakan yang akan diambil untuk mendukung pencapaian tersebut. Strategi yang akan dilakukan oleh Kecamatan Kepanjenkidul adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik melalui pengembangan sistem layanan digital dan integrasi data pelayanan masyarakat
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat
4. Meningkatkan Koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan trantibum
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan
6. Meningkatkan kualitas pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
7. Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Arah kebijakan Kecamatan Kepanjenkidul adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi aplikasi pelayanan
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana pelayanan yang sesuai standar
3. Optimalisasi fasilitasi administrasi pertanahan, pemanfaatan tanah asset, pemilu dan pembayaran PBB
4. Pembinaan Pengurus RT dan RW
5. Sosialisasi tentang wawasan kebangsaan kepada masyarakat
6. Peningkatan Koordinasi FKDM dan FKUB
7. Optimalisasi Forkopimcam
8. Penyusunan SOP Bersama dalam rangka optimalisasi sistem respon cepat penanganan trantibum
9. Peningkatan ekonomi Masyarakat melalui kegiatan promosi
10. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan
11. Fasilitasi penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat
12. Pelaksanaan musrenbang, Pelatihan skill/kemampuan kepada masyarakat untuk meningkatkan ketrampilan dan keahlian, Pembangunan Sarpras umum, Pembinaan kelembagaan Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan
13. Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku, Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasaran pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan

Tabel 3.2.
Teknik Merumuskan Strategi Renstra Perangkat Daerah

Strategi RPJMD	Isu Strategis	Strategi Renstra
Tata kelola pemerintahan yang tepat fungsi dan penyederhaaan regulasi dengan fokus Penataan kelembagaan yang tepat fungsi, manajemen ASN sesuai kompetensinya	Belum optimalnya kualitas pelayanan dan penanganan pengaduan secara terintegrasi	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik melalui pengembangan sistem layanan digital dan integrasi data pelayanan masyarakat
	belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Rendahnya swadaya masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibum	Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat
		Meningkatkan Koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan trantibum
	Kurangnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pencapaian layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan
		Meningkatkan kualitas pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
	Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan

Penyelarasan tahapan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD adalah proses memastikan bahwa rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) terhubung dan mendukung rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) secara keseluruhan. Ini melibatkan penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, dan program yang ditetapkan dalam Renstra PD dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang ada dalam RPJMD. Berikut adalah penahapan Renstra Tahun 2025-2029 Kecamatan Kepanjenkidul :

Tabel 3.3.
Penahapan Renstra Kecamatan Kepanjenkidul
Tahun 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan Layanan Dasar dan Infrastruktur Kecamatan untuk Mendukung SDM Unggul dan Pembangunan Berkelanjutan	Mewujudkan Kecamatan Cerdas melalui Tata Kelola Digital dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Inovasi dan Kolaborasi Kecamatan dalam Mewujudkan Kesejahteraan yang Merata	Optimalisasi Potensi Ekonomi Lokal dalam Mendukung Stabilitas ekonomi menuju kota yang maju	Akselerasi Pembangunan Kecamatan Berbasis Kesejahteraan, Inovasi Ekonomi, dan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Tabel 3.4.
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Kepanjenkidul

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
1	Tata kelola pemerintahan yang tepat fungsi dan penyederhaaan regulasi dengan fokus Penataan kelembagaan yang tepat fungsi, manajemen ASN sesuai kompetensinya	Peningkatan pelayanan publik terintegrasi berbasis teknologi informasi Penguatan kelembagaan dan integrasi lintas sektor di posyandu untuk mendukung 6 (enam) layanan dasar	Optimalisasi aplikasi pelayanan	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana pelayanan yang sesuai standar	
			Optimalisasi fasilitasi administrasi pertanahan, pemanfaatan tanah asset, pemilu dan pembayaran PBB	
			Pembinaan Pengurus RT dan RW	
			Sosialisasi tentang wawasan kebangsaan kepada masyarakat	
			Peningkatan Koordinasi FKDM dan FKUB	
			Optimalisasi Forkopimcam	
			Penyusunan SOP Bersama dalam rangka optimalisasi sistem respon cepat penanganan trantibum	
			Peningkatan ekonomi Masyarakat melalui kegiatan promosi	
			Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan	
			Fasilitasi penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat	
			- Pelaksanaan musrenbang - Pelatihan skill/kemampuan kepada masyarakat untuk meningkatkan ketrampilan dan keahlian - Pembangunan Sarpras umum - Pembinaan kelembagaan Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan	
			- Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah - Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku - Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasaran pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan	

Tabel 3.5.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN			
Misi : Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatnya kinerja pelayanan dan kualitas pembangunan wilayah di kecamatan	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik melalui pengembangan sistem layanan digital dan integrasi data pelayanan masyarkat	Optimalisasi aplikasi pelayanan
			Peningkatan Sarana dan Prasarana pelayanan yang sesuai standar
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Optimalisasi fasilitasi administrasi pertanahan, pemanfaatan tanah asset, pemilu dan pembayaran PBB
			Pembinaan Pengurus RT dan RW
		Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat	Sosialisasi tentang wawasan kebangsaan kepada masyarakat
			Peningkatan Koordinasi FKDM dan FKUB
		Meningkatkan Koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan trantibum	Optimalisasi Forkopimcam
			Penyusunan SOP Bersama dalam rangka optimalisasi sistem respon cepat penanganan trantibum
		Meningkatkan kualitas pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan ekonomi Masyarakat melalui kegiatan promosi
			Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan	Fasilitasi penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat
			- Pelaksanaan musrenbang - Pelatihan skill/kemampuan kepada masyarakat untuk meningkatkan ketrampilan dan keahlian - Pembangunan Sarpras umum - Pembinaan kelembagaan Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan
	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan	- Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah - Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku - Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasaran pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Kepanjenkidul selama 5 (lima) tahun ke depan (2025-2029) diarahkan untuk mencapai tujuan. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah adalah hasil cascading tujuan, sasaran, outcome dan output sesuai hasil penerjemahan pohon kinerja. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dari kegiatan akan di turunkan menjadi sub kegiatan, sub kegiatan adalah tindakan yang lebih rinci dari suatu kegiatan, yang berkontribusi pada pencapaian keluaran atau hasil yang diinginkan dari kegiatan tersebut. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Program-program yang direncanakan dalam Renstra ini menjadi dasar pijakan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk tahun 2030, memastikan kesinambungan perencanaan dan pencapaian tujuan jangka panjang perangkat daerah. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Kepanjenkidul							
Unsur Kewilayahan, Kecamatan Sasaran RPJMD: Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)		
		Meningkatnya kinerja pelayanan dan kualitas pembangunan wilayah di kecamatan			Status Kinerja Kecamatan (*)		
					Persentase kelurahan dengan tingkat perkembangan "cepat berkembang" (%)		
			Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan		Persentase kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan (%)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan (%)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti (%)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik yang sesuai standard di tingkat kecamatan	Persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti (%)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Persentase sarana dan prasarana yang tersedia/terpelihara (%)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
			Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif (Kelompok)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir (%)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
				Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan (%)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Persentase kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan (%)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)		
			Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar (%)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	7.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
						Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	7.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	7.01.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar (%)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar (%)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi Pendapatan Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah (%)	7.01.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar (%)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar (%)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terpenuhi Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan (%)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhi pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan (%)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
7.01.0.00.0.00.01.0001 - Kelurahan Kepanjenkidul							
- Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatnya kinerja pelayanan dan kualitas pembangunan wilayah di kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan		Persentase kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksakan (%)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti (%)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan (%)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya Sarana dan Prasarana pelayanan yang sesuai standar	Persentase sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara (%)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif (Kelompok)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir (%)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
				Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan (%)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Persentase kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan (%)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar (%)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar (%)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar (%)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar (%)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan (%)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar (%)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan (%)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
7.01.0.00.0.00.01.0002 - Kelurahan Ngadirejo							
- Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatnya kinerja pelayanan dan kualitas pembangunan wilayah di kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan		Persentase kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
						PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksakan (%)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti (%)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan (%)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti (%)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Persentase sarana dan prasarana yang tersedia/terpelihara (%)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif (Kelompok)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir (%)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
				Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
				Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat		Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan (%)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Persentase kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan (%)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
				Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah		Persentase fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar (%)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar (%)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar (%)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Meningkatnya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar (%)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Meningkatnya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan (%)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan (%)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
7.01.0.00.0.00.01.0003 - Kelurahan Sentul							
- Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatnya kinerja pelayanan dan kualitas pembangunan wilayah di kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan		Persentase kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan (%)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti (%)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan (%)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik di tingkat kecamatan		Persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti (%)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Persentase sarana dan prasarana yang tersedia/terpelihara (%)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif (Kelompok)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir (%)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
				Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
				Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan (%)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Persentase kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan (%)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
				Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah		Persentase fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar (%)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar (%)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar (%)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Meningkatnya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar (%)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Meningkatnya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan (%)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan (%)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan (%)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
7.01.0.00.0.00.01.0004 - Kelurahan Kauman							
- Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatnya kinerja pelayanan dan kualitas pembangunan wilayah di kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan		Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksakan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan		Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksakan (%)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti (%)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan (%)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik yang sesuai standard di tingkat kecamatan		Persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti (%)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Persentase sarana dan prasarana yang tersedia/terpelihara (%)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
				Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif (Kelompok)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir (%)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
				Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
				Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan (%)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Persentase kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan (%)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
				Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah		Persentase fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar (%)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar (%)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar (%)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Meningkatnya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar (%)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Meningkatnya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan (%)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan (%)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
7.01.0.00.0.00.01.0005 - Kelurahan Tanggung							
- Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatnya kinerja pelayanan dan kualitas pembangunan wilayah di kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan		Persentase kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan (%)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti (%)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan (%)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Terlaksananya peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik yang sesuai standard di tingkat kecamatan	Persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti (%)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Persentase sarana dan prasarana yang tersedia/terpelihara (%)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif (Kelompok)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir (%)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
				Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat		Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan (%)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Persentase kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan (%)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Terlaksananya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
				Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah		Persentase fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar (%)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar (%)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar (%)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Meningkatnya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar (%)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan (%)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
						Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
7.01.0.00.0.00.01.0006 - Kelurahan Bendo							
- Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatnya kinerja pelayanan dan kualitas pembangunan wilayah di kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan		Persentase kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan (%)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti (%)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan (%)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti (%)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Persentase sarana dan prasarana yang tersedia/terpelihara (%)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
				Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif (Kelompok)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir (%)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
				Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
				Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan (%)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Persentase kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan (%)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Terlaksananya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
				Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah		Persentase fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar (%)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar (%)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar (%)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar (%)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Meningkatnya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan (%)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar (%)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan (%)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
7.01.0.00.0.00.01.0007 - Kelurahan Kepanjenlor							
- Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatnya kinerja pelayanan dan kualitas pembangunan wilayah di kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan		Persentase kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan (%)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti (%)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan (%)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti (%)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Persentase sarana dan prasarana yang tersedia/terpelihara (%)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif (Kelompok)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir (%)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
				Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan (%)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Persentase kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan (%)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Terlaksananya peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
				Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah		Persentase fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar (%)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar (%)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar (%)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Meningkatnya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar (%)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan (%)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2.
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
7.01 - KECAMATAN							30.670.19 7.120,00		31.090.857.028 ,00		31.596.16 9.705,00		31.145.35 6.443,00		32.088.45 8.765,00		32.088.45 8.765,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							13.879.43 0.769,00		17.741.892.925 ,00		18.104.79 3.992,00		17.770.24 7.540,00		18.658.75 9.917,00		18.658.75 9.917,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Kepanjenkidul
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	Pemenuhan fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	Jumlah fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku dibagi jumlah fasilitasi layanan kedinasan yang ada dikali 100 %	%	100	100	13.879.43 0.769,00	100	17.741.892.925 ,00	100	18.104.79 3.992,00	100	17.770.24 7.540,00	100	18.658.75 9.917,00	100	18.658.75 9.917,00	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							4.750.000, 00		4.783.2 07,48		4.814.358 ,96		4.790.969 ,00		4.858.638 ,00		4.858.638 ,00	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	%	100	100	4.750.000, 00	100	4.783.2 07,48	100	4.814.358 ,96	100	4.790.969 ,00	100	4.858.638 ,00	100	4.858.638 ,00	
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							1.000.000, 00		1.006.9 91,00		1.013.549 ,00		1.008.625 ,00		1.022.871 ,00		1.022.871 ,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	doku men	2	2	1.000.000, 00	4	1.006.9 91,00	2	1.013.549 ,00	2	1.008.625 ,00	3	1.022.871 ,00	3	1.022.871 ,00	
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							1.000.000, 00		1.006.9 91,00		1.013.549 ,96		1.008.625 ,00		1.022.871 ,00		1.022.871 ,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah memuat dokumen evaluasi kinerja triwulanan/semesteran/tahunan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berjalan	Lapor an	6	6	1.000.000, 00	6	1.006.9 91,00	6	1.013.549 ,96	6	1.008.625 ,00	6	1.022.871 ,00	6	1.022.871 ,00	
7.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan							1.000.000, 00		1.006.9 91,00		1.013.549 ,00		1.008.625 ,00		1.022.871 ,00		1.022.871 ,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBOUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah merupakan kegiatan pembahasan rancangan Renstra dan rancangan Renja Perangkat Daerah bersama dengan pemangku kepentingan terkait	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	BA	-	1	1.000.000, 00	1	1.006.9 91,00	1	1.013.549 ,00	1	1.008.625 ,00	1	1.022.871 ,00	1	1.022.871 ,00	
7.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD							1.000.000, 00		1.006.9 91,00		1.013.549 ,00		1.008.625 ,00		1.022.871 ,00		1.022.871 ,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah selain Renstra dan Renja yaitu meliputi perjanjian kinerja, rencana aksi, rencana kinerja tahunan, standar pelayanan, rencana dan dokumen anggaran, dokumen pengarusutamaan gender, profil perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun tahun berjalan	doku men	10	10	1.000.000, 00	10	1.006.9 91,00	10	1.013.549 ,00	10	1.008.625 ,00	10	1.022.871 ,00	10	1.022.871 ,00	
7.01.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan							750.000,0 0		755.243 ,48		760.162,0 0		756.469,0 0		767.154,0 0		767.154,0 0	
Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan merupakan kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan nasional yang tertuang dalam RKP tahun berjalan dan kebijakan daerah yang tertuang dalam Renja Perangkat Daerah tahun berjalan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan tahun berjalan	BA	-	1	750.000,0 0	1	755.243 ,48	1	760.162,0 0	1	756.469,0 0	1	767.154,0 0	1	767.154,0 0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							11.167.40 3.116,00		11.356. 990.073 ,13		11.435.41 7.141,38		11.374.16 4.912,75		12.202.15 2.975,49		12.202.15 2.975,49	
Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar adalah pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan serta penyusunan laporan keuangan sesuai standar pelayanan	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar x 100 %	%	100	100	11.167.40 3.116,00	100	11.356. 990.073 ,13	100	11.435.41 7.141,38	100	11.374.16 4.912,75	100	12.202.15 2.975,49	100	12.202.15 2.975,49	
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							11.166.65 3.116,00		11.356. 234.830 ,13		11.434.65 6.979,38		11.373.40 8.443,75		12.201.38 5.821,49		12.201.38 5.821,49	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Gaji dan Tunjangan ASN memuat gaji, TPP, honorarium pejabat pengadaan, honor pengelola keuangan, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan keluarga, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan tunjangan lain untuk ASN, P3K	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun berjalan	Oran g/bul an	96	96	11.166.65 3.116,00	96	11.356. 234.830 ,13	96	11.434.65 6.979,38	96	11.373.40 8.443,75	96	12.201.38 5.821,49	96	12.201.38 5.821,49	
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							750.000,0 0		755.243 ,00		760.162,0 0		756.469,0 0		767.154,0 0		767.154,0 0	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD (Laporan)	Laporan keuangan memuat laporan keuangan perangkat daerah bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/Tahunan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	Lapor an	6	6	750.000,0 0	6	755.243 ,00	6	760.162,0 0	6	756.469,0 0	6	767.154,0 0	6	767.154,0 0	
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							245.000,0 0		246.722 ,00		248.328,0 0		247.121,0 0		250.611,0 0		250.611,0 0	
Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi barang milik daerah memuat pelayanan penatausahaan barang	Jumlah jenis administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis administrasi Barang Milik Daerah yang harus disediakan	%	100	100	245.000,0 0	100	246.722 ,00	100	248.328,0 0	100	247.121,0 0	100	250.611,0 0	100	250.611,0 0	
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							245.000,0 0		246.722 ,00		248.328,0 0		247.121,0 0		250.611,0 0		250.611,0 0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN													KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Penatausahaan barang milik daerah memuat Penyusunan RKPBMĐ, Pengamanan, Penilaian, Pemanfaatan, Rekonsiliasi, Pengawasan dan Pengendalian BMD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pada tahun berjalan	Lapor an	-	4	245.000,0 0	4	246.722 ,00	4	248.328,0 0	4	247.121,0 0	4	250.611,0 0	4	250.611,0 0		
7.01.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							1.000.000, 00		1.006.9 91,00		1.013.549 ,00		1.008.625 ,00		1.022.871 ,00		1.022.871 ,00		
Terpenuhinya pelayanan administrasi Pendapatan Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi Pendapatan Daerah kewenangn perangkat daerah memuat laporan pengelolaan retribusi daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah jenis administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah ----- x 100% Jumlah jenis administrasi Pendapatan Daerah kewenangan perangkat daerah yang harus disediakan	%	-	100	1.000.000, 00	100	1.006.9 91,00	100	1.013.549 ,00	100	1.008.625 ,00	100	1.022.871 ,00	100	1.022.871 ,00		
7.01.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah							1.000.000, 00		1.006.9 91,00		1.013.549 ,00		1.008.625 ,00		1.022.871 ,00		1.022.871 ,00		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	Pengelolaan retribusi daerah memuat penyusunan pendataan, pemungutan, dan penyusunan laporan realisasi retribusi daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah pada tahun n	Lapor an	-	12	1.000.000, 00	12	1.006.9 91,00	12	1.013.549 ,00	12	1.008.625 ,00	12	1.022.871 ,00	12	1.022.871 ,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							106.936.9 00,00		107.684 .522,00		108.385.9 00,00		107.859.3 90,00		109.382.8 86,00		109.382.8 86,00		
Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah memuat pelayanan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan serta sosialisasi peraturan perundangan-undangan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- x 100% jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani	%	100	100	106.936.9 00,00	100	107.684 .522,00	100	108.385.9 00,00	100	107.859.3 90,00	100	109.382.8 86,00	100	109.382.8 86,00		
7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan							106.936.9 00,00		107.684 .522,00		108.385.9 00,00		107.859.3 90,00		109.382.8 86,00		109.382.8 86,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah ASN (PNS dan P3K) yang mengikuti pembinaan kepegawaian dan event daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	Oran g	100	100	106.936.9 00,00	100	107.684 .522,00	100	108.385.9 00,00	100	107.859.3 90,00	100	109.382.8 86,00	100	109.382.8 86,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah							279.988.7 37,00		398.276 .663,00		401.255.8 03,00		399.234.4 41,00		386.392.6 53,00		386.392.6 53,00		
Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	%	100	100	279.988.7 37,00	100	398.276 .663,00	100	401.255.8 03,00	100	399.234.4 41,00	100	386.392.6 53,00	100	386.392.6 53,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
		rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan pelaksanaan SPBE yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP																
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							10.993.40 0,00		11.070.257,00		11.142.36 0,00		11.088.23 3,00		11.244.85 2,00		11.244.85 2,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan mencakup komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	2	1	10.993.40 0,00	1	11.070.257,00	1	11.142.36 0,00	1	11.088.23 3,00	1	11.244.85 2,00	1	11.244.85 2,00	
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							24.060.30 0,00		124.228.511,00		124.386.3 17,00		124.267.8 54,00		124.610.6 33,00		124.610.6 33,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan mencakup peralatan dan perlengkapan kantor kategori barang pakai habis/non modal yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	3	3	24.060.30 0,00	3	124.228.511,00	3	124.386.3 17,00	3	124.267.8 54,00	3	124.610.6 33,00	3	124.610.6 33,00	
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							20.117.10 0,00		20.257.743,00		20.389.68 7,00		20.290.63 9,00		20.577.24 1,00		20.577.24 1,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan mencakup peralatan rumah tangga yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	5	5	20.117.10 0,00	5	20.257.743,00	5	20.389.68 7,00	5	20.290.63 9,00	5	20.577.24 1,00	5	20.577.24 1,00	
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor							79.213.60 0,00		79.767.402,00		80.286.94 8,00		79.896.93 5,00		81.025.46 6,00		81.025.46 6,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Bahan logistik yang disediakan mencakup makanan dan minuman yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	12	12	79.213.60 0,00	12	79.767.402,00	12	80.286.94 8,00	12	79.896.93 5,00	12	81.025.46 6,00	12	81.025.46 6,00	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							41.990.03 7,00		42.283.599,00		42.559.00 3,00		44.930.32 9,00		42.950.48 1,00		42.950.48 1,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan mencakup barang cetakan dan penggandaan yang disediakan untuk	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	41.990.03 7,00	1	42.283.599,00	1	42.559.00 3,00	1	44.930.32 9,00	1	42.950.48 1,00	1	42.950.48 1,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
		menunjang kegiatan perkantoran																
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							18.600.30 0,00		18.730.037,00		18.852.03 0,00		18.760.45 1,00		19.025.43 9,00		19.025.43 9,00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan mencakup bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang-undangan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	doku men	36	36	18.600.30 0,00	36	18.730.037,00	36	18.852.03 0,00	36	18.760.45 1,00	36	19.025.43 9,00	36	19.025.43 9,00	
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							85.014.00 0,00		101.939 .114,00		103.639.4 58,00		100.000.0 00,00		86.958.54 1,00		86.958.54 1,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mencakup perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berjalan	Lapor an	9	12	85.014.00 0,00	12	101.939 .114,00	12	103.639.4 58,00	12	100.000.0 00,00	12	86.958.54 1,00	12	86.958.54 1,00	
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							154.524.2 00,00		355.604 .517,00		357.311.6 82,00		356.547.5 04,00		358.758.7 12,00		358.758.7 12,00	
Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan adalah kegiatan penyediaan kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud, pembangunan gedung kantor dan penyediaan sarana dan prasaran gedung kantor yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ----- x 100 % Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan	%	100	100	154.524.2 00,00	100	355.604 .517,00	100	357.311.6 82,00	100	356.547.5 04,00	100	358.758.7 12,00	100	358.758.7 12,00	
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							154.524.2 00,00		355.604 .517,00		357.311.6 82,00		356.547.5 04,00		358.758.7 12,00		358.758.7 12,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan mencakup peralatan dan mesin lainnya yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	unit	1	13	154.524.2 00,00	4	355.604 .517,00	4	357.311.6 82,00	4	356.547.5 04,00	4	358.758.7 12,00	4	358.758.7 12,00	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.126.664. 016,00		1.134.5 40.807, 00		1.141.930 .376,00		1.136.383 .194,00		1.152.434 .427,00		1.152.434 .427,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN													KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar memuat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan, serta penyediaan jasa pelayanan umum yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jml jenis penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100 % Jml jenis penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan	%	100	100	1.126.664. 016,00	100	1.134.5 40.807, 00	100	1.141.930 .376,00	100	1.136.383 .194,00	100	1.152.434 .427,00	100	1.152.434 .427,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							44.998.00 0,00		45.312. 592,00		45.607.72 5,00		45.386.17 5,00		46.027.24 7,00		46.027.24 7,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan memuat pembayaran listrik, air dan telepon yang menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	Lapor an	36	36	44.998.00 0,00	36	45.312. 592,00	36	45.607.72 5,00	36	45.386.17 5,00	36	46.027.24 7,00	36	46.027.24 7,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							1.081.666. 016,00		1.089.2 28.215, 00		1.096.322 .651,00		1.090.997 .019,00		1.106.407 .180,00		1.106.407 .180,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memuat kegiatan penyediaan dan pembayaran gaji, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian bagi tenaga pelayanan umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Lapor an	13	13	1.081.666. 016,00	13	1.089.2 28.215, 00	13	1.096.322 .651,00	13	1.090.997 .019,00	13	1.106.407 .180,00	13	1.106.407 .180,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							356.072.3 20,00		415.499 .800,25		443.586.7 51,63		416.701.1 04,50		404.965.3 87,75		404.965.3 87,75		
Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar adalah barang milik daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah memuat kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMD	Jumlah jenis BMD yang terpelihara sesuai kebutuhan ----- x 100% jumlah jenis BMD yang harus dipelihara	%	100	100	356.072.3 20,00	100	415.499 .800,25	100	443.586.7 51,63	100	416.701.1 04,50	100	404.965.3 87,75	100	404.965.3 87,75		
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							22.116.30 0,00		22.270. 920,00		22.415.97 6,00		22.307.08 5,00		22.622.16 9,00		22.622.16 9,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya adalah kendaraan jabatan yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMĐ	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya pada tahun berjalan	unit	1	1	22.116.30 0,00	1	22.270. 920,00	1	22.415.97 6,00	1	22.307.08 5,00	1	22.622.16 9,00	1	22.622.16 9,00	
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							69.601.32 0,00		127.026 .010,25		153.234.0 55,63		127.758.8 53,50		108.648.9 87,75		108.648.9 87,75	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya adalah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMĐ	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	unit	14	14	69.601.32 0,00	14	127.026 .010,25	14	153.234.0 55,63	14	127.758.8 53,50	14	108.648.9 87,75	14	108.648.9 87,75	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							29.354.70 0,00		29.559. 926,00		29.752.45 7,00		29.607.93 8,00		33.319.03 1,00		33.319.03 1,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	unit	5	5	29.354.70 0,00	5	29.559. 926,00	5	29.752.45 7,00	5	29.607.93 8,00	5	33.319.03 1,00	5	33.319.03 1,00	
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							235.000.0 00,00		236.642 .944,00		238.184.2 63,00		237.027.2 28,00		240.375.2 00,00		240.375.2 00,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi adalah ruangan dalam gedung kantor, taman, kolam, tempat parkir, pos satpam, pagar, dll yang dipelihara/direhabilitasi sesuai RKPBMĐ	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun berjalan	unit	5	1	235.000.0 00,00	1	236.642 .944,00	1	238.184.2 63,00	1	237.027.2 28,00	1	240.375.2 00,00	1	240.375.2 00,00	
Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah							13.879.43 0.769,00		17.741. 892.925 ,00		18.104.79 3.992,00		17.770.24 7.540,00		18.658.75 9.917,00		18.658.75 9.917,00	7.01.0.00.0.00. 01.0001 - Kelurahan Kepanjenkidul
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0,00		850.000 ,00		908.960,0 0		893.700,0 0		921.877,0 0		921.877,0 0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	%	100	100	0,00	100	850.000,00	100	908.960,00	100	893.700,00	100	921.877,00	100	921.877,00	
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							0,00		500.000,00		508.960,00		500.466,00		516.193,00		516.193,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	doku men	10	0	0,00	0	500.000,00	0	508.960,00	0	500.466,00	0	516.193,00	0	516.193,00	
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0,00		350.000,00		400.000,00		393.234,00		405.684,00		405.684,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah memuat dokumen evaluasi kinerja triwulanan/semesteran/tahunan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berjalan	Laporan	4	0	0,00	0	350.000,00	0	400.000,00	0	393.234,00	0	405.684,00	0	405.684,00	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0,00		787.987,00		1.000.000,00		983.310,00		1.014.210,00		1.014.210,00	
Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar adalah pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan serta penyusunan laporan keuangan sesuai standar pelayanan	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar x 100 %	%	100	100	0,00	100	787.987,00	100	1.000.000,00	100	983.310,00	100	1.014.210,00	100	1.014.210,00	
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							0,00		787.987,00		1.000.000,00		983.310,00		1.014.210,00		1.014.210,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	Laporan keuangan memuat laporan keuangan perangkat daerah bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Tahunan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	Laporan	4	0	0,00	0	787.987,00	0	1.000.000,00	0	983.310,00	0	1.014.210,00	0	1.014.210,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							25.372.80 0,00		125.953 .962,00		126.419.0 87,00		125.978.1 89,00		126.794.5 65,00		126.794.5 65,00	
Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah memuat pelayanan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan serta sosialisasi peraturan perundangan-undangan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- x 100% jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani	%	100	100	25.372.80 0,00	100	125.953 .962,00	100	126.419.0 87,00	100	125.978.1 89,00	100	126.794.5 65,00	100	126.794.5 65,00	
7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							25.372.80 0,00		125.953 .962,00		126.419.0 87,00		125.978.1 89,00		126.794.5 65,00		126.794.5 65,00	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah ASN (PNS dan P3K) yang mengikuti pembinaan kepegawaian dan event daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	Oran g	18	18	25.372.80 0,00	18	125.953 .962,00	18	126.419.0 87,00	18	125.978.1 89,00	18	126.794.5 65,00	18	126.794.5 65,00	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah							30.450.60 0,00		31.148. 068,00		31.998.23 6,00		31.464.22 8,00		32.453.00 4,00		32.453.00 4,00	
Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan pelaksanaan SPBE yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	%	100	100	30.450.60 0,00	100	31.148. 068,00	100	31.998.23 6,00	100	31.464.22 8,00	100	32.453.00 4,00	100	32.453.00 4,00	
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							2.073.500, 00		2.120.9 93,00		2.159.003 ,00		2.122.972 ,00		2.189.687 ,00		2.189.687 ,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan mencakup komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	2.073.500, 00	1	2.120.9 93,00	1	2.159.003 ,00	1	2.122.972 ,00	1	2.189.687 ,00	1	2.189.687 ,00	
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							15.750.80 0,00		16.111. 571,00		16.400.30 9,00		16.126.61 0,00		16.633.39 6,00		16.633.39 6,00	

[illegible]

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							21.704.80 0,00		33.714. 718,13		39.294.91 1,38		32.648.79 2,75		34.809.82 6,88		34.809.82 6,88	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan mencakup peralatan dan mesin lainnya yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	unit	2	2	21.704.80 0,00	2	33.714. 718,13	2	39.294.91 1,38	2	32.648.79 2,75	2	34.809.82 6,88	2	34.809.82 6,88	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							17.196.27 7,00		17.590. 156,00		17.905.39 2,00		17.606.57 6,00		18.159.87 0,00		18.159.87 0,00	
Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar memuat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan, serta penyediaan jasa pelayanan umum yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jml jenis penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100 % Jml jenis penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan	%	100	100	17.196.27 7,00	100	17.590. 156,00	100	17.905.39 2,00	100	17.606.57 6,00	100	18.159.87 0,00	100	18.159.87 0,00	
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							17.196.27 7,00		17.590. 156,00		17.905.39 2,00		17.606.57 6,00		18.159.87 0,00		18.159.87 0,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan memuat pembayaran listrik, air dan telepon yang menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	Lapor an	36	36	17.196.27 7,00	36	17.590. 156,00	36	17.905.39 2,00	36	17.606.57 6,00	36	18.159.87 0,00	36	18.159.87 0,00	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							10.404.60 0,00		367.581 .014,25		393.523.2 91,63		368.209.9 87,50		449.270.8 32,75		449.270.8 32,75	
Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar adalah barang milik daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah memuat kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMd	Jumlah jenis BMD yang terpelihara sesuai kebutuhan ----- x 100% jumlah jenis BMD yang harus dipelihara	%	100	100	10.404.60 0,00	100	367.581 .014,25	100	393.523.2 91,63	100	368.209.9 87,50	100	449.270.8 32,75	100	449.270.8 32,75	
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,							3.066.800, 00		3.137.0 44,00		3.193.263 ,00		3.139.983 ,00		3.238.658 ,00		3.238.658 ,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya adalah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMĐ	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	unit	6	6	3.066.800, 00	6	3.137.0 44,00	6	3.193.263 ,00	6	3.139.983 ,00	6	3.238.658 ,00	6	3.238.658 ,00	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							7.337.800, 00		7.505.8 80,00		7.640.394 ,00		7.512.886 ,00		8.576.510 ,00		8.576.510 ,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	unit	11	11	7.337.800, 00	11	7.505.8 80,00	11	7.640.394 ,00	11	7.512.886 ,00	11	8.576.510 ,00	11	8.576.510 ,00	
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							0,00		356.938 .090,25		382.689.6 34,63		357.557.1 18,50		437.455.6 64,75		437.455.6 64,75	
Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi (Unit)	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi adalah ruangan dalam gedung kantor, taman, kolam, tempat parkir, pos satpam, pagar, dll yang dipelihara/direhabilitasi sesuai RKPBMĐ	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun berjalan	unit	1	1	0,00	1	356.938 .090,25	1	382.689.6 34,63	1	357.557.1 18,50	1	437.455.6 64,75	1	437.455.6 64,75	
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah							13.879.43 0.769,00		17.741. 892.925 ,00		18.104.79 3.992,00		17.770.24 7.540,00		18.658.75 9.917,00		18.658.75 9.917,00	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							1.050.000, 00		1.105.1 32,00		1.349.504 ,00		1.299.044 ,00		1.298.838 ,00		1.298.838 ,00	7.01.0.00.0.00. 01.0002 - Kelurahan Ngadirejo
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	%	100	100	1.050.000, 00	100	1.105.1 32,00	100	1.349.504 ,00	100	1.299.044 ,00	100	1.298.838 ,00	100	1.298.838 ,00	
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							525.000,0 0		552.566 ,00		674.752,0 0		649.522,0 0		604.419,0 0		604.419,0 0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	doku men	1	1	525.000,0 0	1	552.566 ,00	1	674.752,0 0	1	649.522,0 0	1	604.419,0 0	1	604.419,0 0	
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							525.000,0 0		552.566 ,00		674.752,0 0		649.522,0 0		694.419,0 0		694.419,0 0	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah memuat dokumen evaluasi kinerja triwulanan/semesteran/tahu nan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berjalan	Lapor an	2	2	525.000,0 0	2	552.566 ,00	2	674.752,0 0	2	649.522,0 0	2	694.419,0 0	2	694.419,0 0	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							525.000,0 0		552.566 ,00		674.752,0 0		649.522,0 0		694.419,0 0		694.419,0 0	
Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar adalah pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan serta penyusunan laporan keuangan sesuai standar pelayanan	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar x 100 %	%	100	100	525.000,0 0	100	552.566 ,00	100	674.752,0 0	100	649.522,0 0	100	694.419,0 0	100	694.419,0 0	
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							525.000,0 0		552.566 ,00		674.752,0 0		649.522,0 0		694.419,0 0		694.419,0 0	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD (Laporan)	Laporan keuangan memuat laporan keungan perangkat daerah bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/Tahunan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	Lapor an	1	1	525.000,0 0	1	552.566 ,00	1	674.752,0 0	1	649.522,0 0	1	694.419,0 0	1	694.419,0 0	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							19.602.40 0,00		120.631 .660,00		121.760.0 67,00		120.946.4 44,00		122.394.3 32,00		122.394.3 32,00	
Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah memuat pelayanan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan serta sosialisasi peraturan perundangan-undangan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- x 100% jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani	%	100	100	19.602.40 0,00	100	120.631 .660,00	100	121.760.0 67,00	100	120.946.4 44,00	100	122.394.3 32,00	100	122.394.3 32,00	
7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi							19.602.40 0,00		120.631 .660,00		121.760.0 67,00		120.946.4 44,00		122.394.3 32,00		122.394.3 32,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Peraturan Perundang-Undangan																		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah ASN (PNS dan P3K) yang mengikuti pembinaan kepegawaian dan event daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	Orang	30	30	19.602.400,00	30	120.631.660,00	30	121.760.067,00	30	120.946.444,00	30	122.394.332,00	30	122.394.332,00	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah							13.937.800,00		16.669.628,00		17.739.308,00		17.075.675,00		18.256.001,00		18.256.001,00	
Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan pelaksanaan SPBE yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	%	100	100	13.937.800,00	100	16.669.628,00	100	17.739.308,00	100	17.075.675,00	100	18.256.001,00	100	18.256.001,00	
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							1.063.600,00		1.619.446,00		1.684.470,00		1.621.486,00		1.733.568,00		1.733.568,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan mencakup komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	1.063.600,00	1	1.619.446,00	1	1.684.470,00	1	1.621.486,00	1	1.733.568,00	1	1.733.568,00	
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							4.777.000,00		6.527.825,00		6.789.931,00		6.536.051,00		6.987.844,00		6.987.844,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan mencakup peralatan dan perlengkapan kantor kategori barang pakai habis/non modal yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	4.777.000,00	1	6.527.825,00	1	6.789.931,00	1	6.536.051,00	1	6.987.844,00	1	6.987.844,00	
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor							5.917.200,00		6.227.893,00		6.677.956,00		6.428.262,00		6.872.605,00		6.872.605,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Bahan logistik yang disediakan mencakup makanan dan minuman yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	5.917.200,00	1	6.227.893,00	1	6.677.956,00	1	6.428.262,00	1	6.872.605,00	1	6.872.605,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							2.180.000,00		2.294.464,00		2.586.951,00		2.489.876,00		2.661.984,00		2.661.984,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan mencakup barang cetakan dan penggandaan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	2.180.000,00	1	2.294.464,00	1	2.586.951,00	1	2.489.876,00	1	2.661.984,00	1	2.661.984,00	
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							10.000.000,00		23.037.902,00		28.682.904,00		21.965.712,00		24.226.046,13		24.226.046,13	
Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan adalah kegiatan penyediaan kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud, pembangunan gedung kantor dan penyediaan sarana dan prasaran gedung kantor yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ----- x 100 % Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan	%	100	100	10.000.000,00	100	23.037.902,00	100	28.682.904,00	100	21.965.712,00	100	24.226.046,13	100	24.226.046,13	
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							10.000.000,00		23.037.902,00		28.682.904,00		21.965.712,00		24.226.046,13		24.226.046,13	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan mencakup peralatan dan mesin lainnya yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	unit	1	1	10.000.000,00	1	23.037.902,00	1	28.682.904,00	1	21.965.712,00	1	24.226.046,13	1	24.226.046,13	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							15.516.000,00		7.865.637,00		8.769.083,00		8.441.212,00		9.024.696,00		9.024.696,00	
Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar memuat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan, serta penyediaan jasa pelayanan umum yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jml jenis penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100 % Jml jenis penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan	%	100	100	15.516.000,00	100	7.865.637,00	100	8.769.083,00	100	8.441.212,00	100	9.024.696,00	100	9.024.696,00	
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							15.516.000,00		7.865.637,00		8.769.083,00		8.441.212,00		9.024.696,00		9.024.696,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Laporan	36	36	15.516.000,00	36	7.865.637,00	36	8.769.083,00	36	8.441.212,00	36	9.024.696,00	36	9.024.696,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Sumber Daya Air dan Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Disediakan memuat pembayaran listrik, air dan telepon yang menunjang kegiatan perkantoran	Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan															
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							6.756.000,00		356.938.090,00		382.689.634,00		357.557.118,00		437.455.666,12		437.455.666,12	
Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar adalah barang milik daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah memuat kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	Jumlah jenis BMD yang terpelihara sesuai kebutuhan ----- x 100% jumlah jenis BMD yang harus dipelihara	%	100	100	6.756.000,00	100	356.938.090,00	100	382.689.634,00	100	357.557.118,00	100	437.455.666,12	100	437.455.666,12	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							6.756.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	unit	18	18	6.756.000,00	18	0,00	18	0,00	18	0,00	18	0,00	18	0,00	
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							0,00		356.938.090,00		382.689.634,00		357.557.118,00		437.455.666,12		437.455.666,12	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi adalah ruangan dalam gedung kantor, taman, kolam, tempat parkir, pos satpam, pagar, dll yang dipelihara/direhabilitasi sesuai RKPBMĐ	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun berjalan	unit	-	-	0,00	1	356.938.090,00	1	382.689.634,00	1	357.557.118,00	1	437.455.666,12	1	437.455.666,12	
Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah							13.879.430.769,00		17.741.892.925,00		18.104.793.992,00		17.770.247.540,00		18.658.759.917,00		18.658.759.917,00	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							3.000.000,00		3.022.966,00		3.103.054,00		3.026.496,00		3.166.098,00		3.166.098,00	7.01.0.00.0.00.01.0003 - Kelurahan Sentul
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan,	Persentase penyusunan dokumen	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	%	100	100	3.000.000,00	100	3.022.966,00	100	3.103.054,00	100	3.026.496,00	100	3.166.098,00	100	3.166.098,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Daerah yang tersusun pada tahun berjalan															
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							1.500.000,00		1.511.483,00		1.551.527,00		1.513.248,00		1.583.049,00		1.583.049,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	dokumen	10	10	1.500.000,00	10	1.511.483,00	10	1.551.527,00	10	1.513.248,00	10	1.583.049,00	10	1.583.049,00	
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							1.500.000,00		1.511.483,00		1.551.527,00		1.513.248,00		1.583.049,00		1.583.049,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah memuat dokumen evaluasi kinerja triwulanan/semesteran/tahunan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berjalan	Laporan	1	1	1.500.000,00	1	1.511.483,00	1	1.551.527,00	1	1.513.248,00	1	1.583.049,00	1	1.583.049,00	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1.500.000,00		1.511.483,00		1.551.527,00		1.513.248,00		1.583.049,00		1.583.049,00	
Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar adalah pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan serta penyusunan laporan keuangan sesuai standar pelayanan	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar x 100 %	%	100	100	1.500.000,00	100	1.511.483,00	100	1.551.527,00	100	1.513.248,00	100	1.583.049,00	100	1.583.049,00	
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							1.500.000,00		1.511.483,00		1.551.527,00		1.513.248,00		1.583.049,00		1.583.049,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	Laporan keuangan memuat laporan keuangan perangkat daerah bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Tahunan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	Laporan	4	4	1.500.000,00	4	1.511.483,00	4	1.551.527,00	4	1.513.248,00	4	1.583.049,00	4	1.583.049,00	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							17.583.000,00		117.717.604,00		118.187.007,00		117.738.307,00		118.556.520,00		118.556.520,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah memuat pelayanan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan serta sosialisasi peraturan perundangan-undangan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- x 100% jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani	%	100	100	17.583.00 0,00	100	117.717 .604,00	100	118.187.0 07,00	100	117.738.3 07,00	100	118.556.5 20,00	100	118.556.5 20,00		
7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							17.583.00 0,00		117.717 .604,00		118.187.0 07,00		117.738.3 07,00		118.556.5 20,00		118.556.5 20,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah ASN (PNS dan P3K) yang mengikuti pembinaan kepegawaian dan event daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	Oran g	12	12	17.583.00 0,00	12	117.717 .604,00	12	118.187.0 07,00	12	117.738.3 07,00	12	118.556.5 20,00	12	118.556.5 20,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah							29.555.30 3,00		29.781. 557,00		31.570.57 6,00		30.791.68 2,00		32.412.00 4,00		32.412.00 4,00		
Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan pelaksanaan SPBE yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	%	100	100	29.555.30 3,00	100	29.781. 557,00	100	31.570.57 6,00	100	30.791.68 2,00	100	32.412.00 4,00	100	32.412.00 4,00		
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							5.000.000, 00		5.038.2 76,00		5.171.758 ,00		5.044.163 ,00		5.276.834 ,00		5.276.834 ,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan mencakup komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	5.000.000, 00	1	5.038.2 76,00	1	5.171.758 ,00	1	5.044.163 ,00	1	5.276.834 ,00	1	5.276.834 ,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							10.000.00 0,00		10.076. 553,00		10.343.51 7,00		10.088.32 7,00		10.753.67 0,00		10.753.67 0,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan mencakup peralatan dan perlengkapan kantor kategori barang pakai habis/non modal yang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	10.000.00 0,00	1	10.076. 553,00	1	10.343.51 7,00	1	10.088.32 7,00	1	10.753.67 0,00	1	10.753.67 0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
		disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran																
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							4.000.000,00		4.030.621,00		4.637.406,00		4.522.994,00		4.731.625,00		4.731.625,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan mencakup peralatan rumah tangga yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	2	2	4.000.000,00	2	4.030.621,00	2	4.637.406,00	2	4.522.994,00	2	4.731.625,00	2	4.731.625,00	
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor							7.000.000,00		7.053.587,00		7.740.462,00		7.549.493,00		7.897.727,00		7.897.727,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Bahan logistik yang disediakan mencakup makanan dan minuman yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	7.000.000,00	1	7.053.587,00	1	7.740.462,00	1	7.549.493,00	1	7.897.727,00	1	7.897.727,00	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							3.555.303,00		3.582.520,00		3.677.433,00		3.586.705,00		3.752.148,00		3.752.148,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan mencakup barang cetakan dan penggandaan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	3.555.303,00	1	3.582.520,00	1	3.677.433,00	1	3.586.705,00	1	3.752.148,00	1	3.752.148,00	
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							10.000.000,00		21.589.387,00		27.548.041,00		21.011.323,00		23.739.525,00		23.739.525,00	
Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan adalah kegiatan penyediaan kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud, pembangunan gedung kantor dan penyediaan sarana dan prasaran gedung kantor yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ----- x 100 % Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan	%	100	100	10.000.000,00	100	21.589.387,00	100	27.548.041,00	100	21.011.323,00	100	23.739.525,00	100	23.739.525,00	
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							10.000.000,00		21.589.387,00		27.548.041,00		21.011.323,00		23.739.525,00		23.739.525,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan mencakup peralatan dan mesin lainnya yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	unit	1	1	10.000.000,00	1	21.589.387,00	1	27.548.041,00	1	21.011.323,00	1	23.739.525,00	1	23.739.525,00	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan							19.776.000,00		19.927.392,00		20.455.341,00		19.950.677,00		20.870.940,00		20.870.940,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Pemerintahan Daerah																		
Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar memuat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan, serta penyediaan jasa pelayanan umum yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jml jenis penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100 % Jml jenis penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan	%	100	100	19.776.00 0,00	100	19.927. 392,00	100	20.455.34 1,00	100	19.950.67 7,00	100	20.870.94 0,00	100	20.870.94 0,00	
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							19.776.00 0,00		19.927. 392,00		20.455.34 1,00		19.950.67 7,00		20.870.94 0,00		20.870.94 0,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan memuat pembayaran listrik, air dan telepon yang menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	Lapor an	36	36	19.776.00 0,00	36	19.927. 392,00	36	20.455.34 1,00	36	19.950.67 7,00	36	20.870.94 0,00	36	20.870.94 0,00	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							11.000.00 0,00		368.145 .000,00		394.193.4 55,00		368.777.1 35,00		450.171.6 67,00		450.171.6 67,00	
Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar adalah barang milik daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah memuat kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	Jumlah jenis BMD yang terpelihara sesuai kebutuhan ----- x 100% jumlah jenis BMD yang harus dipelihara	%	100	100	11.000.00 0,00	100	368.145 .000,00	100	394.193.4 55,00	100	368.777.1 35,00	100	450.171.6 67,00	100	450.171.6 67,00	
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							4.000.000, 00		4.030.6 21,00		4.137.406 ,00		4.035.342 ,00		4.521.479 ,00		4.521.479 ,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya adalah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMĐ	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya adalah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMĐ	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	unit	6	6	4.000.000, 00	6	4.030.6 21,00	6	4.137.406 ,00	6	4.035.342 ,00	6	4.521.479 ,00	6	4.521.479 ,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							7.000.000,00		7.176.289,00		7.366.415,00		7.184.674,00		8.194.523,00		8.194.523,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	unit	12	12	7.000.000,00	12	7.176.289,00	12	7.366.415,00	12	7.184.674,00	12	8.194.523,00	12	8.194.523,00	
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							0,00		356.938.090,00		382.689.634,00		357.557.119,00		437.455.665,00		437.455.665,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi adalah ruangan dalam gedung kantor, taman, kolam, tempat parkir, pos satpam, pagar, dll yang dipelihara/direhabilitasi sesuai RKPBMĐ	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun berjalan	unit	1	1	0,00	1	356.938.090,00	1	382.689.634,00	1	357.557.119,00	1	437.455.665,00	1	437.455.665,00	
Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah							13.879.430.769,00		17.741.892.925,00		18.104.793.992,00		17.770.247.540,00		18.658.759.917,00		18.658.759.917,00	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							4.070.000,00		4.101.816,00		4.212.723,00		4.106.649,00		4.399.886,00		4.399.886,00	7.01.0.00.0.00.01.0004 - Kelurahan Kauman
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	%	100	100	4.070.000,00	100	4.101.816,00	100	4.212.723,00	100	4.106.649,00	100	4.399.886,00	100	4.399.886,00	
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							2.325.000,00		2.343.175,00		2.406.531,00		2.345.936,00		2.556.323,00		2.556.323,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	dokumen	2	2	2.325.000,00	2	2.343.175,00	2	2.406.531,00	2	2.345.936,00	2	2.556.323,00	2	2.556.323,00	
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							1.745.000,00		1.758.641,00		1.806.192,00		1.760.713,00		1.843.563,00		1.843.563,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah memuat dokumen evaluasi kinerja triwulanan/semesteran/tahu nan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berjalan	Lapor an	4	4	1.745.000,00	4	1.758.641,00	4	1.806.192,00	4	1.760.713,00	4	1.843.563,00	4	1.843.563,00	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							835.000,00		841.527,00		864.280,00		842.518,00		882.162,00		882.162,00	
Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar adalah pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan serta penyusunan laporan keuangan sesuai standar pelayanan	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar x 100 %	%	100	100	835.000,00	100	841.527,00	100	864.280,00	100	842.518,00	100	882.162,00	100	882.162,00	
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							835.000,00		841.527,00		864.280,00		842.518,00		882.162,00		882.162,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD (Laporan)	Laporan keuangan memuat laporan keuangan perangkat daerah bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/Tahunan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	Lapor an	4	4	835.000,00	4	841.527,00	4	864.280,00	4	842.518,00	4	882.162,00	4	882.162,00	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							15.075.000,00		115.192.846,00		115.603.644,00		115.210.756,00		115.926.497,00		115.926.497,00	
Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah memuat pelayanan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan serta sosialisasi peraturan perundangan-undangan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- x 100% jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani	%	100	100	15.075.000,00	100	115.192.846,00	100	115.603.644,00	100	115.210.756,00	100	115.926.497,00	100	115.926.497,00	
7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan							15.075.000,00		115.192.846,00		115.603.644,00		115.210.756,00		115.926.497,00		115.926.497,00	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah ASN (PNS dan P3K) yang mengikuti pembinaan kepegawaian dan event daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	Oran g	65	65	15.075.000,00	65	115.192.846,00	65	115.603.644,00	65	115.210.756,00	65	115.926.497,00	65	115.926.497,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah							29.105.70 0,00		29.333.228,00		30.926.36 5,00		30.147.66 0,00		31.666.25 5,00		31.666.25 5,00	
Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan pelaksanaan SPBE yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	%	100	100	29.105.70 0,00	100	29.333.228,00	100	30.926.36 5,00	100	30.147.66 0,00	100	31.666.25 5,00	100	31.666.25 5,00	
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							4.609.400,00		4.645.433,00		4.871.040,00		4.748.390,00		4.971.825,00		4.971.825,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan mencakup komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	4.609.400,00	1	4.645.433,00	1	4.871.040,00	1	4.748.390,00	1	4.971.825,00	1	4.971.825,00	
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							7.036.700,00		7.091.708,00		7.283.460,00		7.100.068,00		7.534.161,00		7.534.161,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan mencakup peralatan dan perlengkapan kantor kategori barang pakai habis/non modal yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	7.036.700,00	1	7.091.708,00	1	7.283.460,00	1	7.100.068,00	1	7.534.161,00	1	7.534.161,00	
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							4.877.900,00		4.916.032,00		5.548.956,00		5.409.237,00		5.663.768,00		5.663.768,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan mencakup peralatan rumah tangga yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	4.877.900,00	1	4.916.032,00	1	5.548.956,00	1	5.409.237,00	1	5.663.768,00	1	5.663.768,00	
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor							9.009.500,00		9.079.930,00		9.525.441,00		9.285.597,00		9.722.530,00		9.722.530,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Bahan logistik yang disediakan mencakup makanan dan minuman yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	9.009.500,00	1	9.079.930,00	1	9.525.441,00	1	9.285.597,00	1	9.722.530,00	1	9.722.530,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							3.572.200,00		3.600.125,00		3.697.468,00		3.604.368,00		3.773.971,00		3.773.971,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan mencakup barang cetakan dan penggandaan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	3.572.200,00	1	3.600.125,00	1	3.697.468,00	1	3.604.368,00	1	3.773.971,00	1	3.773.971,00	
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							10.000.000,00		21.591.007,13		27.245.754,38		20.711.137,75		23.657.775,88		23.657.775,88	
Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan adalah kegiatan penyediaan kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud, pembangunan gedung kantor dan penyediaan sarana dan prasaran gedung kantor yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ----- x 100 % Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan	%	100	100	10.000.000,00	100	21.591.007,13	100	27.245.754,38	100	20.711.137,75	100	23.657.775,88	100	23.657.775,88	
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							10.000.000,00		21.591.007,13		27.245.754,38		20.711.137,75		23.657.775,88		23.657.775,88	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan mencakup peralatan dan mesin lainnya yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	unit	0	1	10.000.000,00	1	21.591.007,13	1	27.245.754,38	1	20.711.137,75	1	23.657.775,88	1	23.657.775,88	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							45.000.000,00		45.351.779,00		46.578.041,00		45.405.241,00		47.541.782,00		47.541.782,00	
Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar memuat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan, serta penyediaan jasa pelayanan umum yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jml jenis penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100 % Jml jenis penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan	%	100	100	45.000.000,00	100	45.351.779,00	100	46.578.041,00	100	45.405.241,00	100	47.541.782,00	100	47.541.782,00	
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							45.000.000,00		45.351.779,00		46.578.041,00		45.405.241,00		47.541.782,00		47.541.782,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Laporan	36	36	45.000.000,00	36	45.351.779,00	36	46.578.041,00	36	45.405.241,00	36	47.541.782,00	36	47.541.782,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Sumber Daya Air dan Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Disediakan memuat pembayaran listrik, air dan telepon yang menunjang kegiatan perkantoran	Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan															
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							9.535.400, 00		366.673 .322,25		393.228.6 07,63		367.830.7 39,50		448.312.7 09,75		448.312.7 09,75	
Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar adalah barang milik daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah memuat kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMMD	Jumlah jenis BMD yang terpelihara sesuai kebutuhan ----- x 100% jumlah jenis BMD yang harus dipelihara	%	100	100	9.535.400, 00	100	366.673 .322,25	100	393.228.6 07,63	100	367.830.7 39,50	100	448.312.7 09,75	100	448.312.7 09,75	
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							3.745.400, 00		3.774.6 79,00		3.876.742 ,00		3.779.128 ,00		3.956.954 ,00		3.956.954 ,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya adalah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMMD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	unit	6	6	3.745.400, 00	6	3.774.6 79,00	6	3.876.742 ,00	6	3.779.128 ,00	6	3.956.954 ,00	6	3.956.954 ,00	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							5.790.000, 00		5.960.5 53,00		6.662.231 ,00		6.494.493 ,00		6.900.091 ,00		6.900.091 ,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMMD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	unit	4	4	5.790.000, 00	4	5.960.5 53,00	4	6.662.231 ,00	4	6.494.493 ,00	4	6.900.091 ,00	4	6.900.091 ,00	
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							0,00		356.938 .090,25		382.689.6 34,63		357.557.1 18,50		437.455.6 64,75		437.455.6 64,75	
Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun berjalan	unit	1	1	0,00	1	356.938 .090,25	1	382.689.6 34,63	1	357.557.1 18,50	1	437.455.6 64,75	1	437.455.6 64,75	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Kantor atau Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	adalah ruangan dalam gedung kantor, taman, kolam, tempat parkir, pos satpam, pagar, dll yang dipelihara/direhabilitasi sesuai RKPBMĐ																
Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah							13.879.430.769,00		17.741.892.925,00		18.104.793.992,00		17.770.247.540,00		18.658.759.917,00		18.658.759.917,00	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							2.668.800,00		3.052.648,00		3.127.191,00		3.056.077,00		3.186.232,00		3.186.232,00	7.01.0.00.0.00.01.0005 - Kelurahan Tanggung
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	%	100	100	2.668.800,00	100	3.052.648,00	100	3.127.191,00	100	3.056.077,00	100	3.186.232,00	100	3.186.232,00	
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							1.214.400,00		1.552.554,00		1.590.466,00		1.554.298,00		1.620.494,00		1.620.494,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	dokumen	4	4	1.214.400,00	4	1.552.554,00	4	1.590.466,00	4	1.554.298,00	4	1.620.494,00	4	1.620.494,00	
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							1.454.400,00		1.500.094,00		1.536.725,00		1.501.779,00		1.565.738,00		1.565.738,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah memuat dokumen evaluasi kinerja triwulanan/semesteran/tahunan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berjalan	Laporan	4	4	1.454.400,00	4	1.500.094,00	4	1.536.725,00	4	1.501.779,00	4	1.565.738,00	4	1.565.738,00	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							800.000,00		850.000,00		870.756,00		850.955,00		887.196,00		887.196,00	
Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar adalah pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan serta penyusunan laporan keuangan sesuai standar pelayanan	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar x 100 %	%	100	100	800.000,00	100	850.000,00	100	870.756,00	100	850.955,00	100	887.196,00	100	887.196,00	
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/							800.000,00		850.000,00		870.756,00		850.955,00		887.196,00		887.196,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD (Laporan)	Laporan keuangan memuat laporan keungan perangkat daerah bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/Tahunan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	Lapor an	4	4	800.000,0 0	4	850.000 ,00	4	870.756,0 0	4	850.955,0 0	4	887.196,0 0	4	887.196,0 0	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							20.655.80 0,00		121.504 .770,00		122.029.9 05,00		121.528.9 45,00		22.545.84 2,00		22.545.84 2,00	
Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Pelayanan administrasi daerah memuat pelayanan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan serta sosialisasi peraturan perundangan-undangan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- x 100% jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani	%	100	100	20.655.80 0,00	100	121.504 .770,00	100	122.029.9 05,00	100	121.528.9 45,00	100	22.545.84 2,00	100	22.545.84 2,00	
7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan							20.655.80 0,00		121.504 .770,00		122.029.9 05,00		121.528.9 45,00		22.545.84 2,00		22.545.84 2,00	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah ASN (PNS dan P3K) yang mengikuti pembinaan kepegawaian dan event daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	Oran g	80	80	20.655.80 0,00	80	121.504 .770,00	80	122.029.9 05,00	80	121.528.9 45,00	80	22.545.84 2,00	80	22.545.84 2,00	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah							26.246.40 0,00		27.571. 015,00		28.744.28 2,00		28.090.64 6,00		29.286.99 8,00		29.286.99 8,00	
Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan pelaksanaan SPBE yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	%	100	100	26.246.40 0,00	100	27.571. 015,00	100	28.744.28 2,00	100	28.090.64 6,00	100	29.286.99 8,00	100	29.286.99 8,00	
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							4.395.600, 00		4.533.7 02,00		4.644.412 ,00		4.538.798 ,00		4.732.101 ,00		4.732.101 ,00	
Tersedianya Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	1	1	4.395.600, 00	1	4.533.7 02,00	1	4.644.412 ,00	1	4.538.798 ,00	1	4.732.101 ,00	1	4.732.101 ,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Bangunan Kantor yang Disediakan mencakup komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan															
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							6.562.000,00		6.768.166,00		6.933.441,00		6.775.774,00		7.064.347,00		7.064.347,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan mencakup peralatan dan perlengkapan kantor kategori barang pakai habis/non modal yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	3	3	6.562.000,00	3	6.768.166,00	3	6.933.441,00	3	6.775.774,00	3	7.064.347,00	3	7.064.347,00	
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							5.066.000,00		5.725.165,00		5.864.970,00		5.731.600,00		5.975.703,00		5.975.703,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan mencakup peralatan rumah tangga yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	3	3	5.066.000,00	3	5.725.165,00	3	5.864.970,00	3	5.731.600,00	3	5.975.703,00	3	5.975.703,00	
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor							4.792.800,00		4.943.381,00		5.564.095,00		5.437.578,00		5.669.159,00		5.669.159,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Bahan logistik yang disediakan mencakup makanan dan minuman yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	2	2	4.792.800,00	2	4.943.381,00	2	5.564.095,00	2	5.437.578,00	2	5.669.159,00	2	5.669.159,00	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							5.430.000,00		5.600.601,00		5.737.364,00		5.606.896,00		5.845.688,00		5.845.688,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan mencakup barang cetakan dan penggandaan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	5.430.000,00	1	5.600.601,00	1	5.737.364,00	1	5.606.896,00	1	5.845.688,00	1	5.845.688,00	
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							5.642.900,00		17.333.024,13		23.439.947,38		17.017.609,75		6.872.214,00		6.872.214,00	
Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan adalah kegiatan penyediaan kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud, pembangunan gedung kantor	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ----- x 100 % Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan	%	100	100	5.642.900,00	100	17.333.024,13	100	23.439.947,38	100	17.017.609,75	100	6.872.214,00	100	6.872.214,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
		dan penyediaan sarana dan prasaran gedung kantor yang disediakan sesuai RKBMD																
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							5.642.900, 00		17.333. 024,13		23.439.94 7,38		17.017.60 9,75		6.872.214 ,00		6.872.214 ,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan mencakup peralatan dan mesin lainnya yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	unit	1	1	5.642.900, 00	1	17.333. 024,13	1	23.439.94 7,38	1	17.017.60 9,75	1	6.872.214 ,00	1	6.872.214 ,00	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							31.276.10 0,00		32.505. 549,00		33.599.31 8,00		32.835.27 0,00		34.233.69 4,00		34.233.69 4,00	
Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar memuat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan, serta penyediaan jasa pelayanan umum yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jml jenis penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100 % Jml jenis penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan	%	100	100	31.276.10 0,00	100	32.505. 549,00	100	33.599.31 8,00	100	32.835.27 0,00	100	34.233.69 4,00	100	34.233.69 4,00	
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							31.276.10 0,00		32.505. 549,00		33.599.31 8,00		32.835.27 0,00		34.233.69 4,00		34.233.69 4,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan memuat pembayaran listrik, air dan telepon yang menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	Lapor an	36	36	31.276.10 0,00	36	32.505. 549,00	36	33.599.31 8,00	36	32.835.27 0,00	36	34.233.69 4,00	36	34.233.69 4,00	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							13.861.30 0,00		371.410 .022,25		397.323.6 86,63		371.858.3 91,50		15.929.96 4,00		15.929.96 4,00	
Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar adalah barang milik daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah memuat kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMd	Jumlah jenis BMD yang terpelihara sesuai kebutuhan ----- x 100% jumlah jenis BMD yang harus dipelihara	%	100	100	13.861.30 0,00	100	371.410 .022,25	100	397.323.6 86,63	100	371.858.3 91,50	100	15.929.96 4,00	100	15.929.96 4,00	
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa							2.795.000, 00		3.057.9 48,00		3.132.621 ,00		3.061.385 ,00		3.511.379 ,00		3.511.379 ,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya adalah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMĐ	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	unit	6	6	2.795.000,00	6	3.057.948,00	6	3.132.621,00	6	3.061.385,00	6	3.511.379,00	6	3.511.379,00	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							11.066.300,00		11.413.984,00		11.501.431,00		11.239.888,00		12.418.585,00		12.418.585,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	unit	18	18	11.066.300,00	18	11.413.984,00	18	11.501.431,00	18	11.239.888,00	18	12.418.585,00	18	12.418.585,00	
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							0,00		356.938.090,25		382.689.634,63		357.557.118,50		0,00		0,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi adalah ruangan dalam gedung kantor, taman, kolam, tempat parkir, pos satpam, pagar, dll yang dipelihara/direhabilitasi sesuai RKPBMĐ	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun berjalan	unit	1	1	0,00	1	356.938.090,25	1	382.689.634,63	1	357.557.118,50	1	0,00	1	0,00	
Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah							13.879.430.769,00		17.741.892.925,00		18.104.793.992,00		17.770.247.540,00		18.658.759.917,00		18.658.759.917,00	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							2.783.400,00		2.805.893,00		2.884.252,00		2.809.243,00		3.045.672,00		3.045.672,00	7.01.0.00.0.00.01.0006 - Kelurahan Bendo
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	%	100	100	2.783.400,00	100	2.805.893,00	100	2.884.252,00	100	2.809.243,00	100	3.045.672,00	100	3.045.672,00	
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen							1.351.800,00		1.362.724,00		1.400.780,00		1.364.351,00		1.530.610,00		1.530.610,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBPROGRAM / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Perencanaan Perangkat Daerah																		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	doku men	10	10	1.351.800, 00	10	1.362.7 24,00	10	1.400.780 ,00	10	1.364.351 ,00	10	1.530.610 ,00	10	1.530.610 ,00	
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							1.431.600, 00		1.443.1 69,00		1.483.472 ,00		1.444.892 ,00		1.515.062 ,00		1.515.062 ,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah memuat dokumen evaluasi kinerja triwulanan/semesteran/tahu nan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berjalan	Lapor an	4	4	1.431.600, 00	4	1.443.1 69,00	4	1.483.472 ,00	4	1.444.892 ,00	4	1.515.062 ,00	4	1.515.062 ,00	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							908.000,0 0		915.337 ,00		940.899,0 0		916.429,0 0		960.935,0 0		960.935,0 0	
Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar adalah pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan serta penyusunan laporan keuangan sesuai standar pelayanan	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar x 100 %	%	100	100	908.000,0 0	100	915.337 ,00	100	940.899,0 0	100	916.429,0 0	100	960.935,0 0	100	960.935,0 0	
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							908.000,0 0		915.337 ,00		940.899,0 0		916.429,0 0		960.935,0 0		960.935,0 0	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD (Laporan)	Laporan keuangan memuat laporan keungan perangkat daerah bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/Tahunan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	Lapor an	4	4	908.000,0 0	4	915.337 ,00	4	940.899,0 0	4	916.429,0 0	4	960.935,0 0	4	960.935,0 0	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							20.558.60 0,00		120.724 .743,00		121.503.5 22,00		120.944.2 97,00		121.961.4 48,00		121.961.4 48,00	
Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah memuat pelayanan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan serta sosialisasi peraturan perundangan-undangan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- x 100% jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani	%	100	100	20.558.60 0,00	100	120.724 .743,00	100	121.503.5 22,00	100	120.944.2 97,00	100	121.961.4 48,00	100	121.961.4 48,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan							20.558.60 0,00		120.724 .743,00		121.503.5 22,00		120.944.2 97,00		121.961.4 48,00		121.961.4 48,00	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah ASN (PNS dan P3K) yang mengikuti pembinaan kepegawaian dan event daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	Oran g	100	100	20.558.60 0,00	100	120.724 .743,00	100	121.503.5 22,00	100	120.944.2 97,00	100	121.961.4 48,00	100	121.961.4 48,00	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah							36.601.70 0,00		36.897. 492,00		38.327.92 5,00		37.331.15 9,00		40.944.13 0,00		40.944.13 0,00	
Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan pelaksanaan SPBE yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	%	100	100	36.601.70 0,00	100	36.897. 492,00	100	38.327.92 5,00	100	37.331.15 9,00	100	40.944.13 0,00	100	40.944.13 0,00	
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							4.893.900, 00		4.933.4 49,00		5.471.225 ,00		5.328.939 ,00		5.787.736 ,00		5.787.736 ,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan mencakup komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	4.893.900, 00	1	4.933.4 49,00	1	5.471.225 ,00	1	5.328.939 ,00	1	5.787.736 ,00	1	5.787.736 ,00	
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							8.184.500, 00		8.250.6 42,00		8.481.057 ,00		8.260.496 ,00		8.661.663 ,00		8.661.663 ,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan mencakup peralatan dan perlengkapan kantor kategori barang pakai habis/non modal yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	4	4	8.184.500, 00	4	8.250.6 42,00	4	8.481.057 ,00	4	8.260.496 ,00	4	8.661.663 ,00	4	8.661.663 ,00	
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							3.941.200, 00		3.973.0 50,00		4.084.005 ,00		3.977.795 ,00		4.570.975 ,00		4.570.975 ,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan mencakup peralatan rumah tangga yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	3.941.200,00	1	3.973.050,00	1	4.084.005,00	1	3.977.795,00	1	4.570.975,00	1	4.570.975,00	
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor							14.201.600,00		14.316.369,00		14.716.181,00		14.333.469,00		16.029.568,00		16.029.568,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Bahan logistik yang disediakan mencakup makanan dan minuman yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	14.201.600,00	1	14.316.369,00	1	14.716.181,00	1	14.333.469,00	1	16.029.568,00	1	16.029.568,00	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							5.380.500,00		5.423.982,00		5.575.457,00		5.430.460,00		5.894.188,00		5.894.188,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan mencakup barang cetakan dan penggandaan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	5.380.500,00	1	5.423.982,00	1	5.575.457,00	1	5.430.460,00	1	5.894.188,00	1	5.894.188,00	
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							10.000.000,00		21.593.648,00		27.057.419,00		20.518.975,00		23.471.806,00		23.471.806,00	
Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan adalah kegiatan penyediaan kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud, pembangunan gedung kantor dan penyediaan sarana dan prasaran gedung kantor yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ----- x 100 % Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan	%	100	100	10.000.000,00	100	21.593.648,00	100	27.057.419,00	100	20.518.975,00	100	23.471.806,00	100	23.471.806,00	
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							10.000.000,00		21.593.648,00		27.057.419,00		20.518.975,00		23.471.806,00		23.471.806,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan mencakup peralatan dan mesin lainnya yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	unit	2	2	10.000.000,00	2	21.593.648,00	2	27.057.419,00	2	20.518.975,00	2	23.471.806,00	2	23.471.806,00	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							29.620.000,00		29.859.372,00		30.693.253,00		29.895.038,00		31.546.878,00		31.546.878,00	
Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar memuat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa	Jml jenis penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100 % Jml jenis penunjang	%	100	100	29.620.000,00	100	29.859.372,00	100	30.693.253,00	100	29.895.038,00	100	31.546.878,00	100	31.546.878,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
		peralatan dan perlengkapan, serta penyediaan jasa pelayanan umum yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	urusan pemerintahan yang harus disediakan															
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							29.620.00 0,00		29.859. 372,00		30.693.25 3,00		29.895.03 8,00		31.546.87 8,00		31.546.87 8,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan memuat pembayaran listrik, air dan telepon yang menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	Lapor an	36	36	29.620.00 0,00	36	29.859. 372,00	36	30.693.25 3,00	36	29.895.03 8,00	36	31.546.87 8,00	36	31.546.87 8,00	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							13.467.20 0,00		370.643 .954,00		396.778.2 60,00		371.279.3 62,00		452.770.0 07,00		452.770.0 07,00	
Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar adalah barang milik daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah memuat kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMDB	Jumlah jenis BMD yang terpelihara sesuai kebutuhan ----- x 100% jumlah jenis BMD yang harus dipelihara	%	100	100	13.467.20 0,00	100	370.643 .954,00	100	396.778.2 60,00	100	371.279.3 62,00	100	452.770.0 07,00	100	452.770.0 07,00	
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							4.558.200, 00		4.595.0 36,00		4.723.361 ,00		4.600.524 ,00		4.823.946 ,00		4.823.946 ,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya adalah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMDB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	unit	6	6	4.558.200, 00	6	4.595.0 36,00	6	4.723.361 ,00	6	4.600.524 ,00	6	4.823.946 ,00	6	4.823.946 ,00	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							8.909.000, 00		9.110.8 28,00		9.365.265 ,00		9.121.719 ,00		10.490.39 6,00		10.490.39 6,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	unit	12	12	8.909.000, 00	12	9.110.8 28,00	12	9.365.265 ,00	12	9.121.719 ,00	12	10.490.39 6,00	12	10.490.39 6,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
		aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMĐ																
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							0,00		356.938.090,00		382.689.634,00		357.557.119,00		437.455.665,00		437.455.665,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi adalah ruangan dalam gedung kantor, taman, kolam, tempat parkir, pos satpam, pagar, dll yang dipelihara/direhabilitasi sesuai RKPBMĐ	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun berjalan	unit	1	1	0,00	1	356.938.090,00	1	382.689.634,00	1	357.557.119,00	1	437.455.665,00	1	437.455.665,00	
Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah							13.879.430.769,00		17.741.892.925,00		18.104.793.992,00		17.770.247.540,00		18.658.759.917,00		18.658.759.917,00	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							4.049.500,00		4.197.294,00		4.315.889,00		4.202.328,00		4.408.755,00		4.408.755,00	7.01.0.00.0.00.01.0007 - Kelurahan Kepanjenlor
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	%	100	100	4.049.500,00	100	4.197.294,00	100	4.315.889,00	100	4.202.328,00	100	4.408.755,00	100	4.408.755,00	
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							1.866.000,00		1.934.103,00		1.988.751,00		1.936.422,00		2.031.543,00		2.031.543,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	dokumen	10	10	1.866.000,00	10	1.934.103,00	10	1.988.751,00	10	1.936.422,00	10	2.031.543,00	10	2.031.543,00	
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							2.183.500,00		2.263.191,00		2.327.138,00		2.265.906,00		2.377.212,00		2.377.212,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah memuat dokumen evaluasi kinerja triwulanan/semesteran/tahunan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berjalan	Laporan	1	1	2.183.500,00	1	2.263.191,00	1	2.327.138,00	1	2.265.906,00	1	2.377.212,00	1	2.377.212,00	
7.01.01.2.02 - Administrasi							1.216.800,00		1.261.209,00		1.296.844,00		1.262.721,00		1.324.748,00		1.324.748,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Kuangan Perangkat Daerah																		
Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar adalah pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan serta penyusunan laporan keuangan sesuai standar pelayanan	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar x 100 %	%	100	100	1.216.800,00	100	1.261.209,00	100	1.296.844,00	100	1.262.721,00	100	1.324.748,00	100	1.324.748,00	
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							1.216.800,00		1.261.209,00		1.296.844,00		1.262.721,00		1.324.748,00		1.324.748,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	Laporan keuangan memuat laporan keuangan perangkat daerah bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Tahunan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	Laporan	4	4	1.216.800,00	4	1.261.209,00	4	1.296.844,00	4	1.262.721,00	4	1.324.748,00	4	1.324.748,00	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							15.000.000,00		115.047.455,00		115.472.626,00		115.065.510,00		115.805.562,00		115.805.562,00	
Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah memuat pelayanan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan serta sosialisasi peraturan perundangan-undangan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/ SOP	Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- x 100% jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani	%	100	100	15.000.000,00	100	115.047.455,00	100	115.472.626,00	100	115.065.510,00	100	115.805.562,00	100	115.805.562,00	
7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							15.000.000,00		115.047.455,00		115.472.626,00		115.065.510,00		115.805.562,00		115.805.562,00	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah ASN (PNS dan P3K) yang mengikuti pembinaan kepegawaian dan event daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	Orang	14	14	15.000.000,00	14	115.047.455,00	14	115.472.626,00	14	115.065.510,00	14	115.805.562,00	14	115.805.562,00	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah							14.152.300,00		14.668.815,00		15.383.285,00		14.978.518,00		17.214.295,00		17.214.295,00	
Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	%	100	100	14.152.300,00	100	14.668.815,00	100	15.383.285,00	100	14.978.518,00	100	17.214.295,00	100	17.214.295,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
		logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan pelaksanaan SPBE yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP																
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							340.500,00		352.927,00		362.899,00		353.350,00		770.707,00		770.707,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan mencakup komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	340.500,00	1	352.927,00	1	362.899,00	1	353.350,00	1	770.707,00	1	770.707,00	
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							4.000.000,00		4.145.988,00		4.263.134,00		4.150.962,00		4.554.866,00		4.554.866,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan mencakup peralatan dan perlengkapan kantor kategori barang pakai habis/non modal yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	2	2	4.000.000,00	2	4.145.988,00	2	4.263.134,00	2	4.150.962,00	2	4.554.866,00	2	4.554.866,00	
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							1.500.000,00		1.554.745,00		1.898.674,00		1.848.716,00		1.939.529,00		1.939.529,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan mencakup peralatan rumah tangga yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	1.500.000,00	1	1.554.745,00	1	1.898.674,00	1	1.848.716,00	1	1.939.529,00	1	1.939.529,00	
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor							6.540.000,00		6.778.690,00		6.970.224,00		6.786.823,00		8.020.207,00		8.020.207,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Bahan logistik yang disediakan mencakup makanan dan minuman yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	4	4	6.540.000,00	4	6.778.690,00	4	6.970.224,00	4	6.786.823,00	4	8.020.207,00	4	8.020.207,00	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							1.771.800,00		1.836.465,00		1.888.354,00		1.838.667,00		1.928.986,00		1.928.986,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan mencakup barang cetakan dan penggandaan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	1	1.771.800,00	1	1.836.465,00	1	1.888.354,00	1	1.838.667,00	1	1.928.986,00	1	1.928.986,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							10.000.00 0,00		22.277.804,00		28.264.21 6,00		21.690.84 9,00		24.706.87 7,13		24.706.87 7,13	
Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan adalah kegiatan penyediaan kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud, pembangunan gedung kantor dan penyediaan sarana dan prasaran gedung kantor yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ----- x 100 % Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan	%	100	100	10.000.00 0,00	100	22.277.804,00	100	28.264.21 6,00	100	21.690.84 9,00	100	24.706.87 7,13	100	24.706.87 7,13	
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							10.000.00 0,00		22.277.804,00		28.264.21 6,00		21.690.84 9,00		24.706.87 7,13		24.706.87 7,13	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan mencakup peralatan dan mesin lainnya yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	unit	1	1	10.000.00 0,00	1	22.277.804,00	1	28.264.21 6,00	1	21.690.84 9,00	1	24.706.87 7,13	1	24.706.87 7,13	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							36.000.00 0,00		37.313.892,00		38.568.20 8,00		37.553.40 1,00		39.598.10 9,00		39.598.10 9,00	
Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar memuat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan, serta penyediaan jasa pelayanan umum yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jml jenis penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100 % Jml jenis penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan	%	100	100	36.000.00 0,00	100	37.313.892,00	100	38.568.20 8,00	100	37.553.40 1,00	100	39.598.10 9,00	100	39.598.10 9,00	
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							36.000.00 0,00		37.313.892,00		38.568.20 8,00		37.553.40 1,00		39.598.10 9,00		39.598.10 9,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan memuat pembayaran listrik, air dan telepon yang menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	Lapor an	36	36	36.000.00 0,00	36	37.313.892,00	36	38.568.20 8,00	36	37.553.40 1,00	36	39.598.10 9,00	36	39.598.10 9,00	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							7.786.000, 00		365.618 .251,00		392.224.8 72,00		366.841.4 75,00		448.178.3 39,12		448.178.3 39,12	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar adalah barang milik daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah memuat kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	Jumlah jenis BMD yang terpelihara sesuai kebutuhan ----- x 100% jumlah jenis BMD yang harus dipelihara	%	100	100	7.786.000.00	100	365.618.251,00	100	392.224.872,00	100	366.841.475,00	100	448.178.339,12	100	448.178.339,12	
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							1.616.000.00		1.674.979,00		1.722.306,00		1.676.988,00		1.759.365,00		1.759.365,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya adalah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMĐ	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	unit	6	6	1.616.000.00	6	1.674.979,00	6	1.722.306,00	6	1.676.988,00	6	1.759.365,00	6	1.759.365,00	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							6.170.000.00		7.005.182,00		7.812.932,00		7.607.369,00		8.963.308,00		8.963.308,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	unit	3	3	6.170.000.00	3	7.005.182,00	3	7.812.932,00	3	7.607.369,00	3	8.963.308,00	3	8.963.308,00	
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							0,00		356.938.090,00		382.689.634,00		357.557.118,00		437.455.666,12		437.455.666,12	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi adalah ruangan dalam gedung kantor, taman, kolam, tempat parkir, pos satpam, pagar, dll yang dipelihara/direhabilitasi sesuai RKPBMĐ	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun berjalan	unit	-	-	0,00	1	356.938.090,00	1	382.689.634,00	1	357.557.118,00	1	437.455.666,12	1	437.455.666,12	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN							2.885.950.783,00		2.213.525.836,00		2.234.731.648,00		2.226.598.238,00		2.337.928.150,00		2.337.928.150,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Kepanjenkidul

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
DAN PELAYANAN PUBLIK																		
Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan (%)	Pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan adalah pelayanan kecamatan/kelurahan sesuai SP dan SOP Pelayanan yang diselesaikan adalah pelayanan kependudukan dan fasilitasi pelayanan umum, yang diselesaikan sesuai kewenangan kecamatan/kelurahan berdasarkan SP dan SOP. Pengaduan yang diselesaikan adalah pengaduan yang dilaporkan melalui front-office pelayanan kecamatan/kelurahan yang diselesaikan ditingkat kecamatan/kelurahan atau yang ditindaklanjuti dengan koordinasi pada Perangkat Daerah terkait dengan sesuai SOP Pengaduan	Rata-rata Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan Persentase pelayanan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan = Jumlah pengajuan pelayanan yang diselesaikan dibagi Jumlah pengajuan pelayanan dikali 100% Persentase pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan = Jumlah pengaduan	%	100	100	2.885.950.783,00	100	2.213.525.836,00	100	2.234.731.648,00	100	2.226.598.238,00	100	2.337.928.150,00	100	2.337.928.150,00	
	Persentase keluhan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya (%)	Kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya adalah keluhan yang memiliki poskampling yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat	(Jumlah Kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya / jumlah seluruh kelurahan) x 100%	%	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum (%)	Kelurahan yang masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum adalah masyarakat yang tertib membayar PBB-P2 dan Sewa Tanah aset berupa lahan pertanian	(Jumlah Kelurahan yang masyarakatnya tertib membayar PBB-P2 dan Sewa Tanah aset berupa lahan pertanian / jumlah seluruh kelurahan) x 100%	%	100	100		100		100		100		100		100		
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							299.359.200,00		353.839.631,36		351.037.023,11		355.519.638,25		359.225.888,98		359.225.888,98	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Kepanjenkidul
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	Penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan adalah seluruh kegiatan pemerintahan umum (Administrasi Pertanahan, Persewaan tanah aset, Fasilitasi Pemilu, Pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan, Fasilitasi pembayaran PBB, dan Fasilitasi Koordinasi Forkopimcam) yang dilakukan oleh Kecamatan dalam periode tertentu.	(Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan / Jumlah total rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan) x 100%	%	100	100	299.359.200,00	100	353.839.631,36	100	351.037.023,11	100	355.519.638,25	100	359.225.888,98	100	359.225.888,98	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Gangguan trantibum yang ditindaklanjuti adalah setiap kejadian yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat, baik yang bersifat sosial, lingkungan, maupun administratif, yang telah direspons atau ditangani oleh Kecamatan melalui tindakan preventif, persuasif, atau represif sesuai prosedur yang berlaku.	(Jumlah gangguan trantibum yang ditindaklanjuti / Jumlah seluruh gangguan trantibum) x 100%	%	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan	Cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan adalah luasan wilayah Kecamatan yang telah mendapatkan kegiatan pengamanan secara aktif oleh Kecamatan dalam periode waktu tertentu, baik secara mandiri maupun terpadu, guna menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum).	(Jumlah luasan wilayah kecamatan yang telah mendapatkan kegiatan pengamanan secara aktif oleh Kecamatan dalam periode waktu tertentu, baik secara mandiri maupun terpadu, guna menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) / Jumlah luasan wilayah di Kecamatan) x 100%	%	100	100		100		100		100		100		100		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							267.229.200,00		314.626.623,88		311.568.611,63		316.242.954,25		319.394.428,98		319.394.428,98	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait adalah kegiatan yang dilakukan oleh kecamatan dalam rangka menjalin kerja sama, menyatukan persepsi, dan menyinergikan pelaksanaan tugas pemerintahan dengan perangkat daerah serta instansi vertikal, guna menjaga stabilitas, keamanan, dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan patroli rutin, patroli gabungan dan koordinasi antar instansi (kecamatan, Satpol PP, kepolisian, dan lainnya) dalam menyelesaikan laporan atau aduan terkait ketenteraman dan ketertiban umum (misal: keributan, bangunan liar, pelanggaran jam malam, dll.)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait pada tahun berjalan	Laporan	12	12	267.229.200,00	12	314.626.623,88	12	311.568.611,63	12	316.242.954,25	12	319.394.428,98	12	319.394.428,98	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							32.130.000,00		39.213.007,48		39.468.411,48		39.276.684,00		39.831.460,00		39.831.460,00	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan adalah serangkaian aktivitas fasilitasi, pembinaan, dan koordinasi yang dilakukan oleh kecamatan dalam rangka mendukung kelancaran administrasi pemerintahan, pengelolaan aset, pelaksanaan demokrasi, dan penguatan ketahanan ideologi, yang dibuktikan melalui penyusunan dokumen/laporan resmi atas kegiatan yang difasilitasi selama tahun berjalan. yang termasuk dokumen peningkatan efektivitas adalah dokumen waris, APHB, AJB tanah yang terbit, hibah, sewa tanah aset	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada tahun berjalan	dokumen	12	12	32.130.000,00	12	39.213.007,48	12	39.468.411,48	12	39.276.684,00	12	39.831.460,00	12	39.831.460,00	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							498.891.402,00		508.871.227,00		512.836.968,00		509.859.972,00		518.474.147,00		518.474.147,00	
Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik yang sesuai standard di tingkat kecamatan	persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	Pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pelayanan kepada masyarakat dan penanganan pengaduan yang diproses dalam internal kecamatan/kelurahan dan yang disampaikan kepada perangkat daerah terkait sesuai SOP dan SP.	(Jumlah kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti/jumlah kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan) x 100%	%	100	100	498.891.402,00	100	508.871.227,00	100	512.836.968,00	100	509.859.972,00	100	518.474.147,00	100	518.474.147,00	
Meningkatnya Sarana dan Prasarana pelayanan yang sesuai standar	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia/terpelihara	sarana dan prasarana yang tersedia/terpelihara adalah fasilitas pelayanan yang disediakan dan pemeliharaan fasilitas yang sudah ada untuk kelancaran dan kenyamanan kegiatan pelayanan kepada masyarakat	(Jumlah sarpras yang disediakan atau dipelihara/jumlah sarpras standar pelayanan) x 100%	%	100	100		100		100		100		100		100		
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan							4.000.000,00		4.881.795,00		4.913.591,00		4.889.722,00		4.958.788,00		4.958.788,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan	Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan memuat dokumen yang dibutuhkan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada	dokumen	2	2	4.000.000,00	2	4.881.795,00	2	4.913.591,00	2	4.889.722,00	2	4.958.788,00	2	4.958.788,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							37.680.00 0,00		27.030.222,88		22.538.71 4,63		28.152.91 6,25		27.902.60 2,13		27.902.60 2,13	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait adalah kegiatan yang dilakukan oleh kecamatan dalam rangka menjalin kerja sama, menyatukan persepsi, dan menyinergikan pelaksanaan tugas pemerintahan dengan perangkat daerah serta instansi vertikal, guna menjaga stabilitas, keamanan, dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan patroli rutin, patroli gabungan dan koordinasi antar instansi (kecamatan, Satpol PP, kepolisian, dan lainnya) dalam menyelesaikan laporan atau aduan terkait ketenteraman dan ketertiban umum (misal: keributan, bangunan liar, pelanggaran jam malam, dll.)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait pada tahun berjalan	Laporan	7	7	37.680.00 0,00	7	27.030.222,88	7	22.538.71 4,63	7	28.152.91 6,25	7	27.902.60 2,13	7	27.902.60 2,13	
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							378.783.8 00,00		287.459 .817,00		294.403.5 53,00		287.821.5 11,00		300.008.9 80,00		300.008.9 80,00	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan adalah serangkaian aktivitas fasilitasi, pembinaan, dan koordinasi yang dilakukan oleh kecamatan dalam rangka mendukung kelancaran administrasi pemerintahan, pengelolaan aset, pelaksanaan demokrasi, dan penguatan ketahanan ideologi, yang dibuktikan melalui penyusunan dokumen/laporan resmi atas kegiatan yang difasilitasi selama tahun berjalan. yang termasuk dokumen peningkatan efektivitas adalah dokumen waris,	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada tahun berjalan	dokumen	3	3	378.783.8 00,00	3	287.459 .817,00	3	294.403.5 53,00	3	287.821.5 11,00	3	300.008.9 80,00	3	300.008.9 80,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
		APHB, AJB tanah yang terbit, hibah, sewa tanah aset																
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							32.360.00 0,00		33.101.202,00		33.694.41 3,00		33.132.10 0,00		24.638.69 0,00		24.638.69 0,00	
Meningkatnya pemenuhan fasilitas pelayanan publik yang sesuai standard di tingkat kecamatan	persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	Pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pelayanan kepada masyarakat dan penanganan pengaduan yang diproses dalam internal kecamatan/kelurahan dan yang disampaikan kepada perangkat daerah terkait sesuai SOP dan SP.	(Jumlah kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti/jumlah kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan) x 100%	%	100	100	32.360.00 0,00	100	33.101.202,00	100	33.694.41 3,00	100	33.132.10 0,00	100	24.638.69 0,00	100	24.638.69 0,00	
Meningkatnya Sarana dan Prasarana pelayanan yang sesuai standar	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia/terpelihara	sarana dan prasarana yang tersedia/terpelihara adalah fasilitas pelayanan yang disediakan dan pemeliharaan fasilitas yang sudah ada untuk kelancaran dan kenyamanan kegiatan pelayanan kepada masyarakat	(Jumlah sarpras yang disediakan atau dipelihara/jumlah sarpras standar pelayanan) x 100%	%	100	100		100		100		100		100		100		
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan							1.085.000,00		1.109.851,00		1.129.740,00		1.110.886,00		1.500.000,00		1.500.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan memuat dokumen yang dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat memuat SOP, SP, IKM, ISO	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan pada tahun berjalan	doku men	2	2	1.085.000,00	2	1.109.851,00	2	1.129.740,00	2	1.110.886,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							31.275.00 0,00		31.991.351,00		32.564.67 3,00		32.021.21 4,00		23.138.69 0,00		23.138.69 0,00	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	SDM pelayanan adalah personil yang terlibat dalam proses pelayanan publik kepada masyarakat	Jumlah SDM pelayanan yang ada	lapor an	2	2	31.275.00 0,00	2	31.991.351,00	2	32.564.67 3,00	2	32.021.21 4,00	2	23.138.69 0,00	2	23.138.69 0,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan							2.885.950.783,00		2.213.525.836,00		2.234.731.648,00		2.226.598.238,00		2.337.928.150,00		2.337.928.150,00	
7.01.02.2.01 - Koordinasi							193.718.400,00		103.889.945,00		112.076.579,00		104.146.900,00		118.258.217,00		118.258.217,00	7.01.0.00.0.00.

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		01.0002 - Kelurahan Ngadirejo	
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	Penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan adalah seluruh kegiatan pemerintahan umum (Administrasi Pertanahan, Persewaan tanah aset, Fasilitas Pemilu, Pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan, Fasilitas pembayaran PBB, dan Fasilitas Koordinasi Forkopimcam) yang dilakukan oleh Kecamatan dalam periode tertentu.	(Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan / Jumlah total rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan) x 100%	%	100	100	193.718.400,00	100	103.889.945,00	100	112.076.579,00	100	104.146.900,00	100	118.258.217,00	100	118.258.217,00		
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Gangguan trantibum yang ditindaklanjuti adalah setiap kejadian yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat, baik yang bersifat sosial, lingkungan, maupun administratif, yang telah direspons atau ditangani oleh Kecamatan melalui tindakan preventif, persuasif, atau represif sesuai prosedur yang berlaku.	(Jumlah gangguan trantibum yang ditindaklanjuti / Jumlah seluruh gangguan trantibum) x 100%	%	100	100		100		100		100		100		100			
	Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan	Cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan adalah luasan wilayah Kecamatan yang telah mendapatkan kegiatan pengamanan secara aktif oleh Kecamatan dalam periode waktu tertentu, baik secara mandiri maupun terpadu, guna menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum).	(Jumlah luasan wilayah kecamatan yang telah mendapatkan kegiatan pengamanan secara aktif oleh Kecamatan dalam periode waktu tertentu, baik secara mandiri maupun terpadu, guna menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) / Jumlah luasan wilayah di Kecamatan) x 100%	%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							21.780.000,00		22.923.599,00		23.844.032,00		22.952.488,00		25.539.040,00		25.539.040,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait adalah kegiatan yang dilakukan oleh kecamatan dalam rangka menjalin kerja sama, menyatukan persepsi, dan menyinergikan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait pada tahun berjalan	laporan	12	12	21.780.000,00	12	22.923.599,00	12	23.844.032,00	12	22.952.488,00	12	25.539.040,00	12	25.539.040,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
		pelaksanaan tugas pemerintahan dengan perangkat daerah serta instansi vertikal, guna menjaga stabilitas, keamanan, dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan patroli rutin, patroli gabungan dan koordinasi antar instansi (kecamatan, Satpol PP, kepolisian, dan lainnya) dalam menyelesaikan laporan atau aduan terkait ketenteraman dan ketertiban umum (misal: keributan, bangunan liar, pelanggaran jam malam, dll.)																
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							171.938.400,00		80.966.346,00		88.232.547,00		81.194.412,00		92.719.177,00		92.719.177,00	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan adalah serangkaian aktivitas fasilitasi, pembinaan, dan koordinasi yang dilakukan oleh kecamatan dalam rangka mendukung kelancaran administrasi pemerintahan, pengelolaan aset, pelaksanaan demokrasi, dan penguatan ketahanan ideologi, yang dibuktikan melalui penyusunan dokumen/laporan resmi atas kegiatan yang difasilitasi selama tahun berjalan. yang termasuk dokumen peningkatan efektivitas adalah dokumen waris, APHB, AJB tanah yang terbit, hibah, sewa tanah aset	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada tahun berjalan	dokumen	4	4	171.938.400,00	4	80.966.346,00	4	88.232.547,00	4	81.194.412,00	4	92.719.177,00	4	92.719.177,00	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							18.200.000,00		7.642.789,00		3.229.684,00		8.753.643,00		9.216.735,88		9.216.735,88	
Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik yang sesuai standard di tingkat kecamatan	persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	Pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pelayanan kepada masyarakat dan penanganan pengaduan yang diproses dalam internal kecamatan/kelurahan dan yang disampaikan kepada	(Jumlah kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti/jumlah kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan) x 100%	%	100	100	18.200.000,00	100	7.642.789,00	100	3.229.684,00	100	8.753.643,00	100	9.216.735,88	100	9.216.735,88	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
		perangkat daerah terkait sesuai SOP dan SP.																
Meningkatnya Sarana dan Prasarana pelayanan yang sesuai standar	Persentase sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara	sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara adalah fasilitas pelayanan yang disediakan dan pemeliharaan fasilitas yang sudah ada untuk kelancaran dan kenyamanan kegiatan pelayanan kepada masyarakat	(Jumlah sarpras yang disediakan atau dipelihara/jumlah sarpras standar pelayanan) x 100%	%	100	100		100		100		100		100		100		
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan							2.200.000,00		2.315.515,00		2.408.488,00		2.318.433,00		2.578.690,00		2.578.690,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan memuat dokumen yang dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat memuat SOP, SP, IKM, ISO	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan pada tahun berjalan	dokumen	1	1	2.200.000,00	1	2.315.515,00	1	2.408.488,00	1	2.318.433,00	1	2.578.690,00	1	2.578.690,00	
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							16.000.000,00		5.327.274,00		821.196,00		6.435.210,00		6.638.045,88		6.638.045,88	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	SDM pelayanan adalah personil yang terlibat dalam proses pelayanan publik kepada masyarakat	Jumlah SDM pelayanan yang ada	laporan	4	4	16.000.000,00	4	5.327.274,00	4	821.196,00	4	6.435.210,00	4	6.638.045,88	4	6.638.045,88	
Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan							2.885.950.783,00		2.213.525.836,00		2.234.731.648,00		2.226.598.238,00		2.337.928.150,00		2.337.928.150,00	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							262.892.000,00		164.904.539,00		171.922.824,00		165.214.090,00		177.447.596,00		177.447.596,00	7.01.0.00.0.00.01.0003 - Kelurahan Sentul
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	Penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan adalah seluruh kegiatan pemerintahan umum (Administrasi Pertanahan, Persewaan tanah aset, Fasilitas Pemilu, Pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan, Fasilitas pembayaran PBB, dan Fasilitas Koordinasi Forkopimcam) yang dilakukan oleh Kecamatan dalam periode tertentu.	(Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan / Jumlah total rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan) x 100%	%	100	100	262.892.000,00	100	164.904.539,00	100	171.922.824,00	100	165.214.090,00	100	177.447.596,00	100	177.447.596,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Gangguan trantibum yang ditindaklanjuti adalah setiap kejadian yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat, baik yang bersifat sosial, lingkungan, maupun administratif, yang telah direspons atau ditangani oleh Kecamatan melalui tindakan preventif, persuasif, atau represif sesuai prosedur yang berlaku.	(Jumlah gangguan trantibum yang ditindaklanjuti / Jumlah seluruh gangguan trantibum) x 100%	%	100	100		100		100		100		100		100			
	Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan	Cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan adalah luasan wilayah Kecamatan yang telah mendapatkan kegiatan pengamanan secara aktif oleh Kecamatan dalam periode waktu tertentu, baik secara mandiri maupun terpadu, guna menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum).	(Jumlah luasan wilayah kecamatan yang telah mendapatkan kegiatan pengamanan secara aktif oleh Kecamatan dalam periode waktu tertentu, baik secara mandiri maupun terpadu, guna menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) / Jumlah luasan wilayah di Kecamatan) x 100%	%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.02.2.01.0001 – Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							6.100.000,00		6.146.697,00		6.309.545,00		6.153.879,00		6.437.738,00		6.437.738,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait adalah kegiatan yang dilakukan oleh kecamatan dalam rangka menjalin kerja sama, menyatukan persepsi, dan menyinergikan pelaksanaan tugas pemerintahan dengan perangkat daerah serta instansi vertikal, guna menjaga stabilitas, keamanan, dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan patroli rutin, patroli gabungan dan koordinasi antar instansi (kecamatan, Satpol PP, kepolisian, dan lainnya) dalam menyelesaikan laporan atau aduan terkait ketenteraman dan ketertiban umum (misal: keributan, bangunan liar, pelanggaran jam malam, dll.)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait pada tahun berjalan	laporan	2	2	6.100.000,00	2	6.146.697,00	2	6.309.545,00	2	6.153.879,00	2	6.437.738,00	2	6.437.738,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							256.792.000,00		158.757.842,00		165.613.279,00		159.060.211,00		171.009.858,00		171.009.858,00	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan adalah serangkaian aktivitas fasilitasi, pembinaan, dan koordinasi yang dilakukan oleh kecamatan dalam rangka mendukung kelancaran administrasi pemerintahan, pengelolaan aset, pelaksanaan demokrasi, dan penguatan ketahanan ideologi, yang dibuktikan melalui penyusunan dokumen/laporan resmi atas kegiatan yang difasilitasi selama tahun berjalan. yang termasuk dokumen peningkatan efektivitas adalah dokumen waris, APHB, AJB tanah yang terbit, hibah, sewa tanah aset	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada tahun berjalan	dokumen	12	12	256.792.000,00	12	158.757.842,00	12	165.613.279,00	12	159.060.211,00	12	171.009.858,00	12	171.009.858,00	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							29.120.000,00		17.830.090,00		13.425.244,00		18.951.089,00		21.066.229,00		21.066.229,00	
Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik yang sesuai standard di tingkat kecamatan	persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	Pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pelayanan kepada masyarakat dan penanganan pengaduan yang diproses dalam internal kecamatan/kelurahan dan yang disampaikan kepada perangkat daerah terkait sesuai SOP dan SP.	(Jumlah kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti/jumlah kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan) x 100%	%	100	100	29.120.000,00	100	17.830.090,00	100	13.425.244,00	100	18.951.089,00	100	21.066.229,00	100	21.066.229,00	
Meningkatnya Sarana dan Prasarana pelayanan yang sesuai standar	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia/terpelihara	sarana dan prasarana yang tersedia/terpelihara adalah fasilitas pelayanan yang disediakan dan pemeliharaan fasilitas yang sudah ada untuk kelancaran dan kenyamanan kegiatan pelayanan kepada masyarakat	(Jumlah sarpras yang disediakan atau dipelihara/jumlah sarpras standar pelayanan) x 100%	%	100	100		100		100		100		100		100		
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan							2.800.000,00		2.821.435,00		2.896.185,00		2.824.731,00		2.955.027,00		2.955.027,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan	Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan memuat dokumen yang dibutuhkan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada	dokumen	2	2	2.800.000,00	2	2.821.435,00	2	2.896.185,00	2	2.824.731,00	2	2.955.027,00	2	2.955.027,00	

INDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	dalam pelayanan kepada masyarakat memuat SOP, SP, IKM, ISO	Masyarakat di Kecamatan pada tahun berjalan															
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							26.320.00 0,00		15.008.655,00		10.529.05 9,00		16.126.35 8,00		18.111.20 2,00		18.111.20 2,00	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	SDM pelayanan adalah personil yang terlibat dalam proses pelayanan publik kepada masyarakat	Jumlah SDM pelayanan yang ada	laporan	2	2	26.320.00 0,00	2	15.008.655,00	2	10.529.05 9,00	2	16.126.35 8,00	2	18.111.20 2,00	2	18.111.20 2,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan							2.885.950.783,00		2.213.525.836,00		2.234.731.648,00		2.226.598.238,00		2.337.928.150,00		2.337.928.150,00	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							246.968.000,00		148.898.628,00		155.628.576,00		149.192.044,00		163.690.333,00		163.690.333,00	
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	Penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan adalah seluruh kegiatan pemerintahan umum (Administrasi Pertanahan, Persewaan tanah aset, Fasilitas Pemilu, Pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan, Fasilitas pembayaran PBB, dan Fasilitas Koordinasi Forkopimcam) yang dilakukan oleh Kecamatan dalam periode tertentu.	(Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan / Jumlah total rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan) x 100%	%	100	100	246.968.000,00	100	148.898.628,00	100	155.628.576,00	100	149.192.044,00	100	163.690.333,00	100	163.690.333,00	
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Gangguan trantibum yang ditindaklanjuti adalah setiap kejadian yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat, baik yang bersifat sosial, lingkungan, maupun administratif, yang telah direspons atau ditangani oleh Kecamatan melalui tindakan preventif, persuasif, atau represif sesuai prosedur yang berlaku.	(Jumlah gangguan trantibum yang ditindaklanjuti / Jumlah seluruh gangguan trantibum) x 100%	%	100	100		100		100		100		100				
	Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan	Cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan adalah luasan wilayah Kecamatan yang telah mendapatkan kegiatan pengamanan secara aktif oleh Kecamatan dalam periode waktu tertentu. baik secara mandiri maupun terpadu, guna meniaga ketenteraman dan	(Jumlah luasan wilayah kecamatan yang telah mendapatkan kegiatan pengamanan secara aktif oleh Kecamatan dalam periode waktu tertentu, baik secara mandiri maupun terpadu, guna meniaga ketenteraman dan	%	100	100		100		100		100		100				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
		mandiri maupun terpadu, guna menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum).	ketertiban umum (trantibum) / Jumlah luasan wilayah di Kecamatan) x 100%															
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							6.650.000,00		6.701.985,00		6.883.199,00		6.709.885,00		7.798.186,00		7.798.186,00	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait adalah kegiatan yang dilakukan oleh kecamatan dalam rangka menjalin kerja sama, menyatukan persepsi, dan menyinergikan pelaksanaan tugas pemerintahan dengan perangkat daerah serta instansi vertikal, guna menjaga stabilitas, keamanan, dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan patroli rutin, patroli gabungan dan koordinasi antar instansi (kecamatan, Satpol PP, kepolisian, dan lainnya) dalam menyelesaikan laporan atau aduan terkait ketenteraman dan ketertiban umum (misal: keributan, bangunan liar, pelanggaran jam malam, dll.)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait pada tahun berjalan	laporan	2	2	6.650.000,00	2	6.701.985,00	2	6.883.199,00	2	6.709.885,00	2	7.798.186,00	2	7.798.186,00	
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							240.318.000,00		142.196.643,00		148.745.377,00		142.482.159,00		155.892.147,00		155.892.147,00	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan adalah serangkaian aktivitas fasilitasi, pembinaan, dan koordinasi yang dilakukan oleh kecamatan dalam rangka mendukung kelancaran administrasi pemerintahan, pengelolaan aset, pelaksanaan demokrasi, dan penguatan ketahanan ideologi, yang dibuktikan melalui penyusunan dokumen/laporan resmi atas kegiatan yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada tahun berjalan	dokumen	12	12	240.318.000,00	12	142.196.643,00	12	148.745.377,00	12	142.482.159,00	12	155.892.147,00	12	155.892.147,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
		selama tahun berjalan. yang termasuk dokumen peningkatan efektivitas adalah dokumen waris, APHB, AJB tanah yang terbit, hibah, sewa tanah aset																
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							33.497.50 0,00		22.246. 525,88		17.977.09 6,63		23.373.03 5,25		23.900.77 5,13		23.900.77 5,13	
Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik yang sesuai standard di tingkat kecamatan	persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	Pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pelayanan kepada masyarakat dan penanganan pengaduan yang diproses dalam internal kecamatan/kelurahan dan yang disampaikan kepada perangkat daerah terkait sesuai SOP dan SP.	(Jumlah kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti/jumlah kegiatan pelayanan dan pangananan pengaduan) x 100%	%	100	100	33.497.50 0,00	100	22.246. 525,88	100	17.977.09 6,63	100	23.373.03 5,25	100	23.900.77 5,13	100	23.900.77 5,13	
Meningkatnya Sarana dan Prasarana pelayanan yang sesuai standar	Persentase sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara	sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara adalah fasilitas pelayanan yang disediakan dan pemeliharaan fasilitas yang sudah ada untuk kelancaran dan kenyamanan kegiatan pelayanan kepada masyarakat	(Jumlah sarpras yang disediakan atau dipelihara/jumlah sarpras standar pelayanan) x 100%	%	100	100		100		100		100		100		100		
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan							1.097.500, 00		1.106.0 79,00		1.135.986 ,00		1.107.382 ,00		1.259.489 ,00		1.259.489 ,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan memuat dokumen yang dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat memuat SOP, SP, IKM, ISO	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan pada tahun berjalan	doku men	1	1	1.097.500, 00	1	1.106.0 79,00	1	1.135.986 ,00	1	1.107.382 ,00	1	1.259.489 ,00	1	1.259.489 ,00	
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							32.400.00 0,00		21.140. 446,88		16.841.11 0,63		22.265.65 3,25		22.641.28 6,13		22.641.28 6,13	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	SDM pelayanan adalah personil yang terlibat dalam proses pelayanan publik kepada masyarakat	Jumlah SDM pelayanan yang ada	lapor an	1	1	32.400.00 0,00	1	21.140. 446,88	1	16.841.11 0,63	1	22.265.65 3,25	1	22.641.28 6,13	1	22.641.28 6,13	
Meningkatnya kualitas pelayanan dan							2.885.950. 783,00		2.213.5 25.836, 00		2.234.731 .648,00		2.226.598 .238,00		2.337.928 .150,00		2.337.928 .150,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
penyelenggaraan pemerintahan																		
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							285.490.000,00		194.459.608,00		201.650.166,00		194.790.646,00		209.345.507,00		209.345.507,00	7.01.0.00.0.00.01.0005 - Kelurahan Tanggung
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	Penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan adalah seluruh kegiatan pemerintahan umum (Administrasi Pertanahan, Persewaan tanah aset, Fasilitas Pemilu, Pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan, Fasilitas pembayaran PBB, dan Fasilitas Koordinasi Forkopimcam) yang dilakukan oleh Kecamatan dalam periode tertentu.	(Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan / Jumlah total rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan) x 100%	%	100	100	285.490.000,00	100	194.459.608,00	100	201.650.166,00	100	194.790.646,00	100	209.345.507,00	100	209.345.507,00	
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Gangguan trantibum yang ditindaklanjuti adalah setiap kejadian yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat, baik yang bersifat sosial, lingkungan, maupun administratif, yang telah direspons atau ditangani oleh Kecamatan melalui tindakan preventif, persuasif, atau represif sesuai prosedur yang berlaku.	(Jumlah gangguan trantibum yang ditindaklanjuti / Jumlah seluruh gangguan trantibum) x 100%	%	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan	Cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan adalah luasan wilayah Kecamatan yang telah mendapatkan kegiatan pengamanan secara aktif oleh Kecamatan dalam periode waktu tertentu, baik secara mandiri maupun terpadu, guna menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum).	(Jumlah luasan wilayah kecamatan yang telah mendapatkan kegiatan pengamanan secara aktif oleh Kecamatan dalam periode waktu tertentu, baik secara mandiri maupun terpadu, guna menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) / Jumlah luasan wilayah di Kecamatan) x 100%	%	100	100		100		100		100		100		100		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							10.090.000,00		10.407.010,00		10.661.144,00		10.418.709,00		11.862.432,00		11.862.432,00	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait adalah kegiatan yang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait pada tahun berjalan	laporan	3	3	10.090.000,00	3	10.407.010,00	3	10.661.144,00	3	10.418.709,00	3	11.862.432,00	3	11.862.432,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	dilakukan oleh kecamatan dalam rangka menjalin kerja sama, menyatukan persepsi, dan menyinergikan pelaksanaan tugas pemerintahan dengan perangkat daerah serta instansi vertikal, guna menjaga stabilitas, keamanan, dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan patroli rutin, patroli gabungan dan koordinasi antar instansi (kecamatan, Satpol PP, kepolisian, dan lainnya) dalam menyelesaikan laporan atau aduan terkait ketenteraman dan ketertiban umum (misal: keributan, bangunan liar, pelanggaran jam malam, dll.)																
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							275.400.000,00		184.052.598,00		190.989.022,00		184.371.937,00		197.483.075,00		197.483.075,00	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan adalah serangkaian aktivitas fasilitasi, pembinaan, dan koordinasi yang dilakukan oleh kecamatan dalam rangka mendukung kelancaran administrasi pemerintahan, pengelolaan aset, pelaksanaan demokrasi, dan penguatan ketahanan ideologi, yang dibuktikan melalui penyusunan dokumen/laporan resmi atas kegiatan yang difasilitasi selama tahun berjalan. yang termasuk dokumen peningkatan efektivitas adalah dokumen waris, APHB, AJB tanah yang terbit, hibah, sewa tanah aset	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada tahun berjalan	dokumen	3	3	275.400.000,00	3	184.052.598,00	3	190.989.022,00	3	184.371.937,00	3	197.483.075,00	3	197.483.075,00	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							33.289.600,00		22.822.667,88		18.478.877,63		23.947.980,25		36.838.062,00		36.838.062,00	
Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik yang sesuai standard di tingkat kecamatan	persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	Pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pelayanan kepada masyarakat dan penanganan pengaduan yang diproses	(Jumlah kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti/jumlah kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan) x 100%	%	100	100	33.289.600,00	100	22.822.667,88	100	18.478.877,63	100	23.947.980,25	100	36.838.062,00	100	36.838.062,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
		dalam internal kecamatan/kelurahan dan yang disampaikan kepada perangkat daerah terkait sesuai SOP dan SP.																
Meningkatnya Sarana dan Prasarana pelayanan yang sesuai standar	Persentase sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara	sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara adalah fasilitas pelayanan yang disediakan dan pemeliharaan fasilitas yang sudah ada untuk kelancaran dan kenyamanan kegiatan pelayanan kepada masyarakat	(Jumlah sarpras yang disediakan atau dipelihara/jumlah sarpras standar pelayanan) x 100%	%	100	100		100		100		100		100		100		
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan							1.289.600,00		1.330.117,00		1.362.597,00		1.331.611,00		1.388.323,00		1.388.323,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan memuat dokumen yang dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat memuat SOP, SP, IKM, ISO	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan pada tahun berjalan	doku men	2	2	1.289.600,00	2	1.330.117,00	2	1.362.597,00	2	1.331.611,00	2	1.388.323,00	2	1.388.323,00	
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							32.000.000,00		21.492.550,88		17.116.280,63		22.616.369,25		35.449.739,00		35.449.739,00	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	SDM pelayanan adalah personil yang terlibat dalam proses pelayanan publik kepada masyarakat	Jumlah SDM pelayanan yang ada	lapor an	4	4	32.000.000,00	4	21.492.550,88	4	17.116.280,63	4	22.616.369,25	4	35.449.739,00	4	35.449.739,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan							2.885.950.783,00		2.213.525.836,00		2.234.731.648,00		2.226.598.238,00		2.337.928.150,00		2.337.928.150,00	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							248.452.400,00		150.460.255,00		157.654.848,00		150.954.224,00		163.141.717,00		163.141.717,00	7.01.0.00.0.00.01.0006 - Kelurahan Bendo
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksakan	Penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan adalah seluruh kegiatan pemerintahan umum (Administrasi Pertanahan, Persewaan tanah aset, Fasilitas Pemilu, Pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan, Fasilitas pembayaran PBB, dan Fasilitas Koordinasi Forkopimcam) yang	(Jumlah kegiatan penyelenggar aan pemerintahan yang telah di laksanakan / Jumlah total rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan) x 100%	%	100	100	248.452.400,00	100	150.460.255,00	100	157.654.848,00	100	150.954.224,00	100	163.141.717,00	100	163.141.717,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
		dilakukan oleh Kecamatan dalam periode tertentu.																
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Gangguan trantibum yang ditindaklanjuti adalah setiap kejadian yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat, baik yang bersifat sosial, lingkungan, maupun administratif, yang telah direspons atau ditangani oleh Kecamatan melalui tindakan preventif, persuasif, atau represif sesuai prosedur yang berlaku.	(Jumlah gangguan trantibum yang ditindaklanjuti / Jumlah seluruh gangguan trantibum) x 100%	%	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan	Cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan adalah luasan wilayah Kecamatan yang telah mendapatkan kegiatan pengamanan secara aktif oleh Kecamatan dalam periode waktu tertentu, baik secara mandiri maupun terpadu, guna menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum).	(Jumlah luasan wilayah kecamatan yang telah mendapatkan kegiatan pengamanan secara aktif oleh Kecamatan dalam periode waktu tertentu, baik secara mandiri maupun terpadu, guna menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) / Jumlah luasan wilayah di Kecamatan) x 100%	%	100	100		100		100		100		100		100		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							9.000.000,00		9.072.733,00		9.526.106,00		9.278.368,00		9.728.968,00		9.728.968,00	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait adalah kegiatan yang dilakukan oleh kecamatan dalam rangka menjalin kerja sama, menyatukan persepsi, dan menyinergikan pelaksanaan tugas pemerintahan dengan perangkat daerah serta instansi vertikal, guna menjaga stabilitas, keamanan, dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan patroli rutin, patroli gabungan dan koordinasi antar instansi (kecamatan, Satpol PP, kepolisian, dan lainnya) dalam menyelesaikan laporan atau aduan terkait ketenteraman dan ketertiban umum (misal:	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait pada tahun berjalan	laporan	3	3	9.000.000,00	3	9.072.733,00	3	9.526.106,00	3	9.278.368,00	3	9.728.968,00	3	9.728.968,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
		keributan, bangunan liar, pelanggaran jam malam, dll.)																
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							239.452.400,00		141.387.522,00		148.128.742,00		141.675.856,00		153.412.749,00		153.412.749,00	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan adalah serangkaian aktivitas fasilitasi, pembinaan, dan koordinasi yang dilakukan oleh kecamatan dalam rangka mendukung kelancaran administrasi pemerintahan, pengelolaan aset, pelaksanaan demokrasi, dan penguatan ketahanan ideologi, yang dibuktikan melalui penyusunan dokumen/laporan resmi atas kegiatan yang difasilitasi selama tahun berjalan. yang termasuk dokumen peningkatan efektivitas adalah dokumen waris, APHB, AJB tanah yang terbit, hibah, sewa tanah aset	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada tahun berjalan	dokumen	12	12	239.452.400,00	12	141.387.522,00	12	148.128.742,00	12	141.675.856,00	12	153.412.749,00	12	153.412.749,00	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							25.965.700,00		14.662.704,00		10.411.462,00		15.975.481,00		15.794.986,00		15.794.986,00	
Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik yang sesuai standard di tingkat kecamatan	persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	Pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pelayanan kepada masyarakat dan penanganan pengaduan yang diproses dalam internal kecamatan/kelurahan dan yang disampaikan kepada perangkat daerah terkait sesuai SOP dan SP.	(Jumlah kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti/jumlah kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan) x 100%	%	100	100	25.965.700,00	100	14.662.704,00	100	10.411.462,00	100	15.975.481,00	100	15.794.986,00	100	15.794.986,00	
Meningkatnya Sarana dan Prasarana pelayanan yang sesuai standar	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia/terpelihara	sarana dan prasarana yang tersedia/terpelihara adalah fasilitas pelayanan yang disediakan dan pemeliharaan fasilitas yang sudah ada untuk kelancaran dan kenyamanan kegiatan pelayanan kepada masyarakat	(Jumlah sarpras yang disediakan atau dipelihara/jumlah sarpras standar pelayanan) x 100%	%	100	100		100		100		100		100		100		
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan							2.454.600,00		2.474.436,00		2.543.539,00		2.477.391,00		2.597.704,00		2.597.704,00	

[illegible]

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
		mendapatkan kegiatan pengamanan secara aktif oleh Kecamatan dalam periode waktu tertentu, baik secara mandiri maupun terpadu, guna menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum).	Kecamatan dalam periode waktu tertentu, baik secara mandiri maupun terpadu, guna menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) / Jumlah luasan wilayah di Kecamatan) x 100%															
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							15.383.28 1,00		15.944. 724,00		16.395.24 7,00		15.963.85 5,00		16.748.03 5,00		16.748.03 5,00	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait adalah kegiatan yang dilakukan oleh kecamatan dalam rangka menjalin kerja sama, menyatukan persepsi, dan menyinergikan pelaksanaan tugas pemerintahan dengan perangkat daerah serta instansi vertikal, guna menjaga stabilitas, keamanan, dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan patroli rutin, patroli gabungan dan koordinasi antar instansi (kecamatan, Satpol PP, kepolisian, dan lainnya) dalam menyelesaikan laporan atau aduan terkait ketenteraman dan ketertiban umum (misal: keributan, bangunan liar, pelanggaran jam malam, dll.)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait pada tahun berjalan	laporan	1	1	15.383.28 1,00	1	15.944. 724,00	1	16.395.24 7,00	1	15.963.85 5,00	1	16.748.03 5,00	1	16.748.03 5,00	
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							212.079.4 00,00		115.519 .663,00		121.609.2 44,00		115.778.2 62,00		126.577.7 82,00		126.577.7 82,00	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan adalah serangkaian aktivitas fasilitasi, pembinaan, dan koordinasi yang dilakukan oleh kecamatan dalam rangka mendukung kelancaran administrasi pemerintahan, pengelolaan aset, pelaksanaan demokrasi, dan penguatan ketahanan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada tahun berjalan	dokumen	1	1	212.079.4 00,00	1	115.519 .663,00	1	121.609.2 44,00	1	115.778.2 62,00	1	126.577.7 82,00	1	126.577.7 82,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
		ideologi, yang dibuktikan melalui penyusunan dokumen/laporan resmi atas kegiatan yang difasilitasi selama tahun berjalan. yang termasuk dokumen peningkatan efektivitas adalah dokumen waris, APHB, AJB tanah yang terbit, hibah, sewa tanah aset																
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							33.820.10 0,00		23.941.597,00		19.761.12 8,00		25.070.85 1,00		25.651.86 6,88		25.651.86 6,88	
Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik yang sesuai standard di tingkat kecamatan	persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	Pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pelayanan kepada masyarakat dan penanganan pengaduan yang diproses dalam internal kecamatan/kelurahan dan yang disampaikan kepada perangkat daerah terkait sesuai SOP dan SP.	(Jumlah kegiatan pelayanan dan pengananan pengaduan yang ditindaklanjuti/jumlah kegiatan pelayanan dan pengananan pengaduan) x 100%	%	100	100	33.820.10 0,00	100	23.941.597,00	100	19.761.12 8,00	100	25.070.85 1,00	100	25.651.86 6,88	100	25.651.86 6,88	
Meningkatnya Sarana dan Prasarana pelayanan yang sesuai standar	Persentase sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara	sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara adalah fasilitas pelayanan yang disediakan dan pemeliharaan fasilitas yang sudah ada untuk kelancaran dan kenyamanan kegiatan pelayanan kepada masyarakat	(Jumlah sarpras yang disediakan atau dipelihara/jumlah sarpras standar pelayanan) x 100%	%	100	100		100		100		100		100		100		
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan							1.820.100, 00		1.886.5 28,00		1.939.832 ,00		1.888.791 ,00		1.981.572 ,00		1.981.572 ,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan memuat dokumen yang dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat memuat SOP, SP, IKM, ISO	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan pada tahun berjalan		1	1	1.820.100, 00	1	1.886.5 28,00	1	1.939.832 ,00	1	1.888.791 ,00	1	1.981.572 ,00	1	1.981.572 ,00	
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							32.000.00 0,00		22.055. 069,00		17.821.29 6,00		23.182.06 0,00		23.670.29 4,88		23.670.29 4,88	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	SDM pelayanan adalah personil yang terlibat dalam proses pelayanan publik kepada masyarakat	Jumlah SDM pelayanan yang ada	laporan	1	1	32.000.00 0,00	1	22.055. 069,00	1	17.821.29 6,00	1	23.182.06 0,00	1	23.670.29 4,88	1	23.670.29 4,88	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
	Wilayah Kecamatan (Laporan)																	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							13.904.81 5.568,00		11.135.438.267 ,00		11.256.64 4.065,00		11.148.51 0.665,00		11.091.77 0.698,00		11.091.77 0.698,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Kepanjenkidul
Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif (Kelompok)	Kelompok masyarakat adalah kelompok masyarakat yang secara kolektif dan berkelanjutan menjalankan usaha ekonomi nyata, yang dapat diobservasi melalui partisipasi anggota, proses produksi/jasa, dan orientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya.	jumlah kelompok masyarakat yang aktif dan produktif pada tahun berjalan	kelo mpok	-	7	13.904.81 5.568,00	7	11.135.438.267 ,00	7	11.256.64 4.065,00	7	11.148.51 0.665,00	7	11.091.77 0.698,00	7	11.091.77 0.698,00	
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	lembaga kemasyarakatan yang aktif adalah lembaga kemasyarakatan yang berperan aktif dan di fasilitasi pada kegiatan pemberdayaan masyarakat	(jumlah lembaga yang aktif/jumlah lembaga kemasyarakatan) x 100%	%	-	100		100		100		100		100		100		
	Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM (%)	pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM adalah pemenuhan kegiatan pada bidang pemberdayaan masyarakat dan sarpras kelurahan (Karya MAS) untuk 6 bidang pelayanan dasar, yaitu : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibum dan sosial (Permendagri No 100 Tahun 2018)	(jumlah bidang pelayanan dasar dan sarpras kelurahan yang dilaksanakan pada program Karya Mas/6) x 100% dihitung rata-rata capaian 7 kelurahan	%	70	70		70		70		75		75		75		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							1.359.375.064,77		945.130.219,00		955.240.085,48		947.152.185,00		888.283.860,00		888.283.860,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Kepanjenkidul
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	usulan masyarakat yang terakomodir adalah usulan yang disampaikan pada kegiatan musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan yang terakomodir pada daftar skala prioritas	(jumlah usulan yang terakomodir/jumlah seluruh usulan) x 100%	%	100	100	1.359.375.064,77	100	945.130.219,00	100	955.240.085,48	100	947.152.185,00	100	888.283.860,00	100	888.283.860,00	
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							74.999.904,77		68.696.833,00		69.144.273,48		68.808.389,00		69.780.295,00		69.780.295,00	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	peserta yang berpartisipasi dalam musrenbang adalah masyarakat yang hadir dan berpartisipasi mengikuti	Jumlah masyarakat yang hadir pada kegiatan musrenbang pada tahun berjalan	Lemb aga Kema	9	9	74.999.904,77	9	68.696.833,00	9	69.144.273,48	9	68.808.389,00	9	69.780.295,00	9	69.780.295,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	kegiatan musrenbang kelurahan dan kecamatan		syarakatan														
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara adalah sarpras lingkungan yang di usulkan dan terakomodir untuk di bangun/dipelihara	Jumlah titik sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara	unit	7	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							1.284.375.160,00		876.433.386,00		886.095.812,00		878.343.796,00		818.503.565,00		818.503.565,00	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah laporan kegiatan yang dilaksanakan pada seksi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Pokmas / Ormas	14	14	1.284.375.160,00	14	876.433.386,00	14	886.095.812,00	14	878.343.796,00	14	818.503.565,00	14	818.503.565,00	
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							802.750.503,23		678.347.455,75		657.385.023,38		678.922.457,50		709.426.568,25		709.426.568,25	
Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berjalan	(Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan/Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang seharusnya dilaksanakan)x 100%	%	100	100	802.750.503,23	100	678.347.455,75	100	657.385.023,38	100	678.922.457,50	100	709.426.568,25	100	709.426.568,25	
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan							481.075.550,26		383.706.788,75		360.825.282,38		383.803.323,50		410.138.923,25		410.138.923,25	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (Ekokesra) di tingkat kecamatan dalam rangka memperkuat peran, fungsi, dan kinerja lembaga kemasyarakatan melalui pemberian fasilitasi, pembinaan, dan dukungan anggaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya pada tahun berjalan	lembaga masyarakat	6	6	481.075.550,26	6	383.706.788,75	6	360.825.282,38	6	383.803.323,50	6	410.138.923,25	6	410.138.923,25	
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat							321.674.952,97		294.640.667,00		296.559.741,00		295.119.134,00		299.287.645,00		299.287.645,00	
Terlaksananya Fasilitasi	Jumlah Laporan Fasilitasi	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	laporan	3	3	321.674.952,97	3	294.640.667,00	3	296.559.741,00	3	295.119.134,00	3	299.287.645,00	3	299.287.645,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	adalah kegiatan kecamatan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha dan kelompok masyarakat melalui pemberian dukungan berupa fasilitasi keikutsertaan dalam pameran/bazar dan pembinaan ekonomi produktif kepada peserta pelatihan keterampilan, yang difokuskan pada peserta atau kelompok	Masyarakat pada tahun berjalan															
Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan							13.904.81 5.568,00		11.135. 438.267 ,00		11.256.64 4.065,00		11.148.51 0.665,00		11.091.77 0.698,00		11.091.77 0.698,00	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							2.415.718. 000,00		2.114.1 11.769, 75		2.132.644 .350,38		2.115.799 .474,50		1.849.171 .628,74		1.849.171 .628,74	7.01.0.00.0.00. 01.0001 - Kelurahan Kepanjenkidul
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	usulan masyarakat yang terakomodir adalah usulan yang disampaikan pada kegiatan musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan yang terakomodir pada daftar skala prioritas	(jumlah usulan yang terakomodir/jumlah seluruh usulan) x 100%	%	100	100	2.415.718. 000,00	100	2.114.1 11.769, 75	100	2.132.644 .350,38	100	2.115.799 .474,50	100	1.849.171 .628,74	100	1.849.171 .628,74	
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							33.918.00 0,00		34.694. 889,00		35.316.66 2,00		34.727.27 6,00		35.818.59 6,00		35.818.59 6,00	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	peserta yang berpartisipasi dalam musrenbang adalah masyarakat yang hadir dan berpartisipasi mengikuti kegiatan musrenbang kelurahan dan kecamatan	Jumlah masyarakat yang hadir pada kegiatan musrenbang pada tahun berjalan	Lembaga Kemasayarakatan	9	9	33.918.00 0,00	9	34.694. 889,00	9	35.316.66 2,00	9	34.727.27 6,00	9	35.818.59 6,00	9	35.818.59 6,00	
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							1.690.000. 000,00		1.371.7 71.247, 75		1.377.000 .212,38		1.372.765 .976,50		1.347.243 .629,25		1.347.243 .629,25	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara adalah sarpras lingkungan yang di usulkan dan terakomodir untuk di bangun/dipelihara	Jumlah titik sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara	unit	47	47	1.690.000. 000,00	47	1.371.7 71.247, 75	47	1.377.000 .212,38	47	1.372.765 .976,50	47	1.347.243 .629,25	47	1.347.243 .629,25	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							691.800.0 00,00		707.645 .633,00		720.327.4 76,00		708.306.2 22,00		466.109.4 03,49		466.109.4 03,49	
Terlaksananya Pemberdayaan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Pokmas /	14	14	691.800.0 00,00	14	707.645 .633,00	14	720.327.4 76,00	14	708.306.2 22,00	14	466.109.4 03,49	14	466.109.4 03,49	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Masyarakat di Kelurahan	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	masyarakat adalah laporan kegiatan yang dilaksanakan pada seksi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan		Ormas														
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							80.957.100,00		82.811.416,00		84.295.493,00		82.888.719,00		85.493.534,00		85.493.534,00	
Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berjalan	(Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan/Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang seharusnya dilaksanakan)x 100%	%	100	100	80.957.100,00	100	82.811.416,00	100	84.295.493,00	100	82.888.719,00	100	85.493.534,00	100	85.493.534,00	
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan							70.054.300,00		71.658.889,00		72.943.100,00		71.725.782,00		73.979.797,00		73.979.797,00	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (Ekokesra) di tingkat kecamatan dalam rangka memperkuat peran, fungsi, dan kinerja lembaga kemasyarakatan melalui pemberian fasilitasi, pembinaan, dan dukungan anggaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya pada tahun berjalan	lembaga masyarakat	3	3	70.054.300,00	3	71.658.889,00	3	72.943.100,00	3	71.725.782,00	3	73.979.797,00	3	73.979.797,00	
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat							10.902.800,00		11.152.527,00		11.352.393,00		11.162.937,00		11.513.737,00		11.513.737,00	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat adalah kegiatan kecamatan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha dan kelompok masyarakat melalui pemberian dukungan berupa fasilitasi keikutsertaan dalam pameran/bazar dan pembinaan ekonomi produktif kepada peserta pelatihan keterampilan, yang difokuskan pada peserta atau kelompok	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat pada tahun berjalan	laporan	1	1	10.902.800,00	1	11.152.527,00	1	11.352.393,00	1	11.162.937,00	1	11.513.737,00	1	11.513.737,00	
Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan							13.904.815.568,00		11.135.438.267,00		11.256.644.065,00		11.148.510.665,00		11.091.770.698,00		11.091.770.698,00	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							948.000.000,00		640.838.416,00		655.849.819,00		642.150.683,00		637.755.292,88		637.755.292,88	7.01.0.00.0.00.01.0002 - Kelurahan Ngadirejo

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	usulan masyarakat yang terakomodir adalah usulan yang disampaikan pada kegiatan musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan yang terakomodir pada daftar skala prioritas	(jumlah usulan yang terakomodir/jumlah seluruh usulan) x 100%	%	100	100	948.000.000,00	100	640.838.416,00	100	655.849.819,00	100	642.150.683,00	100	637.755.292,88	100	637.755.292,88	
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							16.800.000,00		17.682.115,00		18.592.091,00		17.896.920,00		19.134.015,00		19.134.015,00	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	peserta yang berpartisipasi dalam musrenbang adalah masyarakat yang hadir dan berpartisipasi mengikuti kegiatan musrenbang kelurahan dan kecamatan	Jumlah masyarakat yang hadir pada kegiatan musrenbang pada tahun berjalan	Lembaga Kemasyarakatan	6	6	16.800.000,00	6	17.682.115,00	6	18.592.091,00	6	17.896.920,00	6	19.134.015,00	6	19.134.015,00	
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							630.000.000,00		306.141.234,00		307.013.801,00		306.357.867,00		273.351.351,88		273.351.351,88	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara adalah sarpras lingkungan yang diusulkan dan terakomodir untuk di bangun/dipelihara	Jumlah titik sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara	unit	18	18	630.000.000,00	18	306.141.234,00	18	307.013.801,00	18	306.357.867,00	18	273.351.351,88	18	273.351.351,88	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							301.200.000,00		317.015.067,00		330.243.927,00		317.895.896,00		345.269.926,00		345.269.926,00	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah laporan kegiatan yang dilaksanakan pada seksi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Pokmas / Ormas	6	6	301.200.000,00	6	317.015.067,00	6	330.243.927,00	6	317.895.896,00	6	345.269.926,00	6	345.269.926,00	
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							63.145.200,00		66.460.756,00		67.129.302,00		66.544.512,00		71.144.291,00		71.144.291,00	
Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berjalan	(Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan/Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang seharusnya dilaksanakan)x 100%	%	100	100	63.145.200,00	100	66.460.756,00	100	67.129.302,00	100	66.544.512,00	100	71.144.291,00	100	71.144.291,00	
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan							51.647.500,00		54.359.348,00		54.541.996,00		54.427.854,00		58.190.089,00		58.190.089,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (Ekokesra) di tingkat kecamatan dalam rangka memperkuat peran, fungsi, dan kinerja lembaga kemasyarakatan melalui pemberian fasilitasi, pembinaan, dan dukungan anggaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya pada tahun berjalan	lembaga masyarakat	5	5	51.647.500,00	5	54.359.348,00	5	54.541.996,00	5	54.427.854,00	5	58.190.089,00	5	58.190.089,00	
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat							11.497.700,00		12.101.408,00		12.587.306,00		12.116.658,00		12.954.202,00		12.954.202,00	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat adalah kegiatan kecamatan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha dan kelompok masyarakat melalui pemberian dukungan berupa fasilitasi keikutsertaan dalam pameran/bazar dan pembinaan ekonomi produktif kepada peserta pelatihan keterampilan, yang difokuskan pada peserta atau kelompok	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat pada tahun berjalan	laporan	1	1	11.497.700,00	1	12.101.408,00	1	12.587.306,00	1	12.116.658,00	1	12.954.202,00	1	12.954.202,00	
Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan							13.904.815.568,00		11.135.438.267,00		11.256.644.065,00		11.148.510.665,00		11.091.770.698,00		11.091.770.698,00	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							1.630.832.100,00		1.286.378.663,00		1.304.164.559,00		1.287.679.919,00		1.283.671.077,00		1.283.671.077,00	7.01.0.00.0.00.01.0003 - Kelurahan Sentul
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	usulan masyarakat yang terakomodir adalah usulan yang disampaikan pada kegiatan musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan yang terakomodir pada daftar skala prioritas	(jumlah usulan yang terakomodir/jumlah seluruh usulan) x 100%	%	100	100	1.630.832.100,00	100	1.286.378.663,00	100	1.304.164.559,00	100	1.287.679.919,00	100	1.283.671.077,00	100	1.283.671.077,00	
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							29.903.800,00		30.132.725,00		30.931.050,00		30.167.935,00		31.559.488,00		31.559.488,00	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	peserta yang berpartisipasi dalam musrenbang adalah masyarakat yang hadir dan berpartisipasi mengikuti	Jumlah masyarakat yang hadir pada kegiatan musrenbang pada tahun berjalan	Lembaga Masyarakat	6	6	29.903.800,00	6	30.132.725,00	6	30.931.050,00	6	30.167.935,00	6	31.559.488,00	6	31.559.488,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Pembangunan di Kelurahan	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	kegiatan musrenbang kelurahan dan kecamatan																
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							1.160.000.000,00		811.942.161,00		817.158.508,00		812.689.019,00		786.770.314,00		786.770.314,00	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara adalah sarpras lingkungan yang di usulkan dan terakomodir untuk di bangun/dipelihara	Jumlah titik sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara	unit	31	31	1.160.000.000,00	31	811.942.161,00	31	817.158.508,00	31	812.689.019,00	31	786.770.314,00	31	786.770.314,00	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							440.928.300,00		444.303.777,00		456.075.001,00		444.822.965,00		465.341.275,00		465.341.275,00	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah laporan kegiatan yang dilaksanakan pada seksi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Pokmas / Ormas	31	31	440.928.300,00	31	444.303.777,00	31	456.075.001,00	31	444.822.965,00	31	465.341.275,00	31	465.341.275,00	
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							62.200.000,00		62.676.164,00		64.336.683,00		62.749.402,00		66.143.837,00		66.143.837,00	
Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berjalan	(Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan/Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang seharusnya dilaksanakan)x 100%	%	100	100	62.200.000,00	100	62.676.164,00	100	64.336.683,00	100	62.749.402,00	100	66.143.837,00	100	66.143.837,00	
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan							52.200.000,00		52.599.611,00		53.993.166,00		52.661.075,00		55.090.167,00		55.090.167,00	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (Ekokesra) di tingkat kecamatan dalam rangka memperkuat peran, fungsi, dan kinerja lembaga kemasyarakatan melalui pemberian fasilitas, pembinaan, dan dukungan anggaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya pada tahun berjalan	lembaga masyarakat	6	6	52.200.000,00	6	52.599.611,00	6	53.993.166,00	6	52.661.075,00	6	55.090.167,00	6	55.090.167,00	
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat							10.000.000,00		10.076.553,00		10.343.517,00		10.088.327,00		11.053.670,00		11.053.670,00	
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat adalah kegiatan kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi	laporan	1	1	10.000.000,00	1	10.076.553,00	1	10.343.517,00	1	10.088.327,00	1	11.053.670,00	1	11.053.670,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Usaha Ekonomi Masyarakat	Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha dan kelompok masyarakat melalui pemberian dukungan berupa fasilitasi keikutsertaan dalam pameran/bazar dan pembinaan ekonomi produktif kepada peserta pelatihan keterampilan, yang difokuskan pada peserta atau kelompok	Masyarakat pada tahun berjalan															
Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan							13.904.81 5.568,00		11.135. 438.267 ,00		11.256.64 4.065,00		11.148.51 0.665,00		11.091.77 0.698,00		11.091.77 0.698,00	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							1.575.028. 800,00		1.230.4 03.219, 75		1.247.571 .658,38		1.231.655 .448,50		1.226.537 .236,25		1.226.537 .236,25	7.01.0.00.0.00. 01.0004 - Kelurahan Kauman
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	usulan masyarakat yang terakomodir adalah usulan yang disampaikan pada kegiatan musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan yang terakomodir pada daftar skala prioritas	(jumlah usulan yang terakomodir/jumlah seluruh usulan) x 100%	%	100	100	1.575.028. 800,00	100	1.230.4 03.219, 75	100	1.247.571 .658,38	100	1.231.655 .448,50	100	1.226.537 .236,25	100	1.226.537 .236,25	
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							30.378.80 0,00		30.616. 280,00		31.444.11 0,00		30.652.37 1,00		32.094.71 7,00		32.094.71 7,00	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	peserta yang berpartisipasi dalam musrenbang adalah masyarakat yang hadir dan berpartisipasi mengikuti kegiatan musrenbang kelurahan dan kecamatan	Jumlah masyarakat yang hadir pada kegiatan musrenbang pada tahun berjalan	Lemb aga Kema syara katan	6	6	30.378.80 0,00	6	30.616. 280,00	6	31.444.11 0,00	6	30.652.37 1,00	6	32.094.71 7,00	6	32.094.71 7,00	
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							1.150.000. 000,00		802.051 .832,75		807.638.1 16,38		802.799.0 95,50		777.501.0 65,25		777.501.0 65,25	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara adalah sarpras lingkungan yang di usulkan dan terakomodir untuk di bangun/dipelihara	Jumlah titik sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara	unit	33	33	1.150.000. 000,00	33	802.051 .832,75	33	807.638.1 16,38	33	802.799.0 95,50	33	777.501.0 65,25	33	777.501.0 65,25	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							394.650.0 00,00		397.735 .107,00		408.489.4 32,00		398.203.9 82,00		416.941.4 54,00		416.941.4 54,00	
Terlaksananya Pemberdayaan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah laporan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Pokm as /	5	5	394.650.0 00,00	5	397.735 .107,00	5	408.489.4 32,00	5	398.203.9 82,00	5	416.941.4 54,00	5	416.941.4 54,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	kegiatan yang dilaksanakan pada seksi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan		Ormas														
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							64.976.300,00		65.484.240,00		67.254.861,00		65.561.434,00		68.946.424,00		68.946.424,00	
Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berjalan	(Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan/ Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang seharusnya dilaksanakan)x 100%	%	100	100	64.976.300,00	100	65.484.240,00	100	67.254.861,00	100	65.561.434,00	100	68.946.424,00	100	68.946.424,00	
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan							54.976.300,00		55.406.067,00		56.904.186,00		55.471.382,00		58.381.585,00		58.381.585,00	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (Ekokesra) di tingkat kecamatan dalam rangka memperkuat peran, fungsi, dan kinerja lembaga kemasyarakatan melalui pemberian fasilitasi, pembinaan, dan dukungan anggaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya pada tahun berjalan	lembaga masyarakat	7	7	54.976.300,00	7	55.406.067,00	7	56.904.186,00	7	55.471.382,00	7	58.381.585,00	7	58.381.585,00	
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat							10.000.000,00		10.078.173,00		10.350.675,00		10.090.052,00		10.564.839,00		10.564.839,00	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat adalah kegiatan kecamatan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha dan kelompok masyarakat melalui pemberian dukungan berupa fasilitasi keikutsertaan dalam pameran/bazar dan pembinaan ekonomi produktif kepada peserta pelatihan keterampilan, yang difokuskan pada peserta atau kelompok	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat pada tahun berjalan	laporan	2	2	10.000.000,00	2	10.078.173,00	2	10.350.675,00	2	10.090.052,00	2	10.564.839,00	2	10.564.839,00	
Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan							13.904.815.568,00		11.135.438.267,00		11.256.644.065,00		11.148.510.665,00		11.091.770.698,00		11.091.770.698,00	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							1.718.616.400,00		1.416.274.304,75		1.433.823.732,38		1.417.648.765,50		1.654.294.419,00		1.654.294.419,00	7.01.0.00.0.00.01.0005 - Kelurahan Tanggung

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	usulan masyarakat yang terakomodir adalah usulan yang disampaikan pada kegiatan musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan yang terakomodir pada daftar skala prioritas	(jumlah usulan yang terakomodir/jumlah seluruh usulan) x 100%	%	100	100	1.718.616.400,00	100	1.416.274.304,75	100	1.433.823.732,38	100	1.417.648.765,50	100	1.654.294.419,00	100	1.654.294.419,00	
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							26.399.000,00		27.528.411,00		28.200.641,00		27.559.358,00		28.733.085,00		28.733.085,00	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	peserta yang berpartisipasi dalam musrenbang adalah masyarakat yang hadir dan berpartisipasi mengikuti kegiatan musrenbang kelurahan dan kecamatan	Jumlah masyarakat yang hadir pada kegiatan musrenbang pada tahun berjalan	Lembaga Kemasyarakatan	3	3	26.399.000,00	3	27.528.411,00	3	28.200.641,00	3	27.559.358,00	3	28.733.085,00	3	28.733.085,00	
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							1.500.000.000,00		1.190.189.351,75		1.202.217.897,38		1.191.309.644,50		1.418.315.724,00		1.418.315.724,00	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara adalah sarpras lingkungan yang di usulkan dan terakomodir untuk di bangun/dipelihara	Jumlah titik sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara	unit	33	33	1.500.000.000,00	33	1.190.189.351,75	33	1.202.217.897,38	33	1.191.309.644,50	33	1.418.315.724,00	33	1.418.315.724,00	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							192.217.400,00		198.556.542,00		203.405.194,00		198.779.763,00		207.245.610,00		207.245.610,00	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah laporan kegiatan yang dilaksanakan pada seksi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Pokmas / Ormas	11	11	192.217.400,00	11	198.556.542,00	11	203.405.194,00	11	198.779.763,00	11	207.245.610,00	11	207.245.610,00	
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							66.079.700,00		68.355.810,00		70.025.025,00		68.432.657,00		71.547.140,00		71.547.140,00	
Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berjalan	(Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan/Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang seharusnya dilaksanakan)x 100%	%	100	100	66.079.700,00	100	68.355.810,00	100	70.025.025,00	100	68.432.657,00	100	71.547.140,00	100	71.547.140,00	
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan							56.079.700,00		57.841.628,00		59.254.092,00		57.906.655,00		60.572.846,00		60.572.846,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (Ekokesra) di tingkat kecamatan dalam rangka memperkuat peran, fungsi, dan kinerja lembaga kemasyarakatan melalui pemberian fasilitasi, pembinaan, dan dukungan anggaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya pada tahun berjalan	lembaga masyarakat	11	11	56.079.700,00	11	57.841.628,00	11	59.254.092,00	11	57.906.655,00	11	60.572.846,00	11	60.572.846,00	
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat							10.000.000,00		10.514.182,00		10.770.933,00		10.526.002,00		10.974.294,00		10.974.294,00	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat adalah kegiatan kecamatan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha dan kelompok masyarakat melalui pemberian dukungan berupa fasilitasi keikutsertaan dalam pameran/bazar dan pembinaan ekonomi produktif kepada peserta pelatihan keterampilan, yang difokuskan pada peserta atau kelompok	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat pada tahun berjalan	laporan	1	1	10.000.000,00	1	10.514.182,00	1	10.770.933,00	1	10.526.002,00	1	10.974.294,00	1	10.974.294,00	
Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan							13.904.815.568,00		11.135.438.267,00		11.256.644.065,00		11.148.510.665,00		11.091.770.698,00		11.091.770.698,00	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							1.507.598.800,00		1.162.844.288,00		1.180.126.754,00		1.164.616.354,00		1.159.441.566,00		1.159.441.566,00	7.01.0.00.0.00.01.0006 - Kelurahan Bendo
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	usulan masyarakat yang terakomodir adalah usulan yang disampaikan pada kegiatan musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan yang terakomodir pada daftar skala prioritas	(jumlah usulan yang terakomodir/jumlah seluruh usulan) x 100%	%	100	100	1.507.598.800,00	100	1.162.844.288,00	100	1.180.126.754,00	100	1.164.616.354,00	100	1.159.441.566,00	100	1.159.441.566,00	
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							22.636.800,00		22.819.738,00		23.457.023,00		22.846.994,00		23.956.549,00		23.956.549,00	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	peserta yang berpartisipasi dalam musrenbang adalah masyarakat yang hadir dan berpartisipasi mengikuti	Jumlah masyarakat yang hadir pada kegiatan musrenbang pada tahun berjalan	Lembaga Masyarakat	2	2	22.636.800,00	2	22.819.738,00	2	23.457.023,00	2	22.846.994,00	2	23.956.549,00	2	23.956.549,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Pembangunan di Kelurahan	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	kegiatan musrenbang kelurahan dan kecamatan																
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							1.130.000.000,00		782.193.944,00		788.254.896,00		782.935.595,00		758.424.631,00		758.424.631,00	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara adalah sarpras lingkungan yang di usulkan dan terakomodir untuk di bangun/dipelihara	Jumlah titik sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara	unit	29	29	1.130.000.000,00	29	782.193.944,00	29	788.254.896,00	29	782.935.595,00	29	758.424.631,00	29	758.424.631,00	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							354.962.000,00		357.830.606,00		368.414.835,00		358.833.765,00		377.060.386,00		377.060.386,00	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah laporan kegiatan yang dilaksanakan pada seksi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Pokmas / Ormas	9	9	354.962.000,00	9	357.830.606,00	9	368.414.835,00	9	358.833.765,00	9	377.060.386,00	9	377.060.386,00	
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							71.132.300,00		71.707.151,00		73.709.712,00		71.792.802,00		75.379.390,00		75.379.390,00	
Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berjalan	(Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan/Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang seharusnya dilaksanakan)x 100%	%	100	100	71.132.300,00	100	71.707.151,00	100	73.709.712,00	100	71.792.802,00	100	75.379.390,00	100	75.379.390,00	
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan							61.883.300,00		62.383.406,00		64.125.584,00		62.457.921,00		65.591.165,00		65.591.165,00	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (Ekokesra) di tingkat kecamatan dalam rangka memperkuat peran, fungsi, dan kinerja lembaga kemasyarakatan melalui pemberian fasilitasi, pembinaan, dan dukungan anggaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya pada tahun berjalan	lembaga masyarakat	6	6	61.883.300,00	6	62.383.406,00	6	64.125.584,00	6	62.457.921,00	6	65.591.165,00	6	65.591.165,00	
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat							9.249.000,00		9.323.745,00		9.584.128,00		9.334.881,00		9.788.225,00		9.788.225,00	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat adalah kegiatan kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	laporan	2	2	9.249.000,00	2	9.323.745,00	2	9.584.128,00	2	9.334.881,00	2	9.788.225,00	2	9.788.225,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Usaha Ekonomi Masyarakat	Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha dan kelompok masyarakat melalui pemberian dukungan berupa fasilitasi keikutsertaan dalam pameran/bazar dan pembinaan ekonomi produktif kepada peserta pelatihan keterampilan, yang difokuskan pada peserta atau kelompok	Masyarakat pada tahun berjalan															
Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan							13.904.81 5.568,00		11.135. 438.267 ,00		11.256.64 4.065,00		11.148.51 0.665,00		11.091.77 0.698,00		11.091.77 0.698,00	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							1.468.900. 000,00		1.171.5 72.359, 00		1.189.009 .401,00		1.172.787 .377,00		1.168.862 .844,88		1.168.862 .844,88	7.01.0.00.0.00. 01.0007 - Kelurahan Kepanjenlor
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	usulan masyarakat yang terakomodir adalah usulan yang disampaikan pada kegiatan musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan yang terakomodir pada daftar skala prioritas	(jumlah usulan yang terakomodir/jumlah seluruh usulan) x 100%	%	100	100	1.468.900. 000,00	100	1.171.5 72.359, 00	100	1.189.009 .401,00	100	1.172.787 .377,00	100	1.168.862 .844,88	100	1.168.862 .844,88	
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							26.000.00 0,00		26.948. 922,00		27.710.37 3,00		26.981.25 7,00		28.506.63 7,00		28.506.63 7,00	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	peserta yang berpartisipasi dalam musrenbang adalah masyarakat yang hadir dan berpartisipasi mengikuti kegiatan musrenbang kelurahan dan kecamatan	Jumlah masyarakat yang hadir pada kegiatan musrenbang pada tahun berjalan	Lemb aga Kema syara katan	3	3	26.000.00 0,00	3	26.948. 922,00	3	27.710.37 3,00	3	26.981.25 7,00	3	28.506.63 7,00	3	28.506.63 7,00	
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							985.000.0 00,00		670.011 .459,00		673.276.7 26,00		670.624.6 59,00		641.232.7 49,88		641.232.7 49,88	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara adalah sarpras lingkungan yang di usulkan dan terakomodir untuk di bangun/dipelihara	Jumlah titik sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara	unit	28	28	985.000.0 00,00	28	670.011 .459,00	28	673.276.7 26,00	28	670.624.6 59,00	28	641.232.7 49,88	28	641.232.7 49,88	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							457.900.0 00,00		474.611 .978,00		488.022.3 02,00		475.181.4 61,00		499.123.4 58,00		499.123.4 58,00	
Terlaksananya Pemberdayaan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah laporan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Pokm as /	6	6	457.900.0 00,00	6	474.611 .978,00	6	488.022.3 02,00	6	475.181.4 61,00	6	499.123.4 58,00	6	499.123.4 58,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SA TUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	kegiatan yang dilaksanakan pada seksi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan		Ormas														
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							69.505.300,00		72.042.035,00		74.077.606,00		72.128.475,00		75.671.589,00		75.671.589,00	
Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berjalan	(Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan/Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang seharusnya dilaksanakan)x 100%	%	100	100	69.505.300,00	100	72.042.035,00	100	74.077.606,00	100	72.128.475,00	100	75.671.589,00	100	75.671.589,00	
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan							56.937.500,00		59.015.548,00		60.683.052,00		59.086.359,00		61.988.815,00		61.988.815,00	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (Ekokesra) di tingkat kecamatan dalam rangka memperkuat peran, fungsi, dan kinerja lembaga kemasyarakatan melalui pemberian fasilitasi, pembinaan, dan dukungan anggaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya pada tahun berjalan	lembaga masyarakat	7	7	56.937.500,00	7	59.015.548,00	7	60.683.052,00	7	59.086.359,00	7	61.988.815,00	7	61.988.815,00	
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat							12.567.800,00		13.026.487,00		13.394.554,00		13.042.116,00		13.682.774,00		13.682.774,00	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat adalah kegiatan kecamatan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha dan kelompok masyarakat melalui pemberian dukungan berupa fasilitasi keikutsertaan dalam pameran/bazar dan pembinaan ekonomi produktif kepada peserta pelatihan keterampilan, yang difokuskan pada peserta atau kelompok	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat pada tahun berjalan	laporan	2	2	12.567.800,00	2	13.026.487,00	2	13.394.554,00	2	13.042.116,00	2	13.682.774,00	2	13.682.774,00	

Program prioritas pembangunan daerah merupakan merupakan program yang dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program perangkat daerah yang dipilih karena memiliki keterhubungan langsung dengan pencapaian sasaran. Dalam implementasinya, program pembangunan daerah dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Program Prioritas Pembangunan Daerah ini juga dapat dimaknai sebagai program pembangunan daerah yang nantinya sekaligus akan menjadi program perangkat daerah.

Tabel 4.3.
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome/Output	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Ket
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1	Optimalisasi program RT Keren menjadi RT SAE atau Karya Mas dengan meningkatkan kemanfaatan bagi warga Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	- Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan - Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan - Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	

1.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan di kecamatan mengacu pada pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam berbagai bidang, seperti urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, serta pelayanan publik. Penilaian kinerja ini mencakup pencapaian target yang telah ditetapkan dalam renstra, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Indikator Kinerja Utama perangkat daerah yang merupakan indikator terseleksi dari indikator tujuan dan sasaran yang menjadi target keberhasilan perangkat daerah mulai tahun 2025 sampai tahun 2030.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sesuai Permendagri yang mengatur tentang IKK.

[illegible]

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar disusun sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD, adalah perencanaan Satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (Lima) tahun. Perubahan Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama Tahun 2025 – 2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025 - 2029. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategis ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2025- 2029.

Indikator-indikator kinerja digunakan dalam pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan dan program. Pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan pengolahan masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kecamatan Kepanjenkidul.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan proses penting dalam rangka menerjemahkan visi, misi, dan arah kebijakan Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan sektoral yang operasional. Terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Renstra PD, antara lain:

1. Keterpaduan dan keselarasan
 - Selaras dengan Visi, Misi dan RPJMD Kota Blitar 2025–2029.
 - Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan transformasi digital.
2. Isu Strategis Kecamatan
 - Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance).
 - Optimalisasi pelayanan publik digital dan integrasi data.
 - Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis lokal.
 - Peningkatan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan.
3. Strategi Utama
 - Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

- Peningkatan kapasitas aparatur dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
- Penguatan koordinasi lintas sektor (Forkopimcam, FKDM, FKUB).
- Pembinaan RT/RW dan lembaga kemasyarakatan.
- Peningkatan sarana prasarana pelayanan sesuai standar.

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah perlu berlandaskan pada sejumlah kaidah agar dokumen ini benar-benar dapat menjadi pedoman strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Adapun kaidah-kaidah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Keterpaduan dan Sinkronisasi

Pelaksanaan Renstra Kecamatan Kepanjenkidul berpedoman pada prinsip keterpaduan dan keselarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, dan kota. Setiap kebijakan dan program harus sejalan dengan arah pembangunan Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029. Sinkronisasi lintas sektor dan antarperangkat daerah diupayakan agar tidak terjadi tumpang tindih program, serta memastikan seluruh kegiatan di wilayah kecamatan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif.

2. Prinsip Pelaksanaan

Kecamatan Kepanjenkidul dalam melaksanakan Renstra menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, baik keuangan, sumber daya manusia, maupun sarana prasarana. Transparansi dijaga dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat, sementara akuntabilitas diwujudkan melalui pelaporan kinerja yang berbasis hasil. Setiap kegiatan wajib dilaksanakan dengan prinsip pertanggungjawaban publik yang jelas dan terukur.

3. Pendekatan Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2025–2029 dilaksanakan melalui pendekatan yang komprehensif, terukur, dan berorientasi hasil. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun tidak hanya menjadi dokumen perencanaan strategis, tetapi juga pedoman operasional bagi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama periode lima tahun ke depan. Agar Renstra dapat diimplementasikan secara konsisten dan terukur, maka diperlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Penjabaran ke dalam Dokumen Perencanaan Tahunan

Renstra PD akan diturunkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya, yang kemudian menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta penganggaran dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

2. Penyusunan Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam Renstra akan dijadikan dasar dalam penyusunan perjanjian kinerja kepala perangkat daerah dengan kepala daerah, sehingga arah kinerja dapat lebih terukur dan terikat secara formal.

3. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Dibangun sistem monitoring dan evaluasi secara periodik untuk menilai capaian program dan kegiatan sesuai indikator yang

ditetapkan, sekaligus menjadi umpan balik bagi penyempurnaan perencanaan di tahun-tahun berikutnya.

4. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Hasil pelaksanaan Renstra PD akan dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya, yang memuat capaian indikator, analisis pencapaian, serta rekomendasi perbaikan kinerja.

5. Penyesuaian terhadap Perubahan Kebijakan dan Kondisi Lingkungan Strategis

Apabila terdapat perubahan kebijakan nasional, peraturan perundangan, maupun dinamika sosial-ekonomi, Renstra PD dapat dilakukan penyesuaian melalui mekanisme *review* Renstra atau perubahan Renstra sesuai ketentuan yang berlaku.